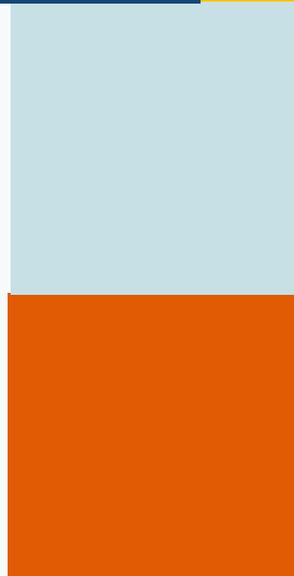
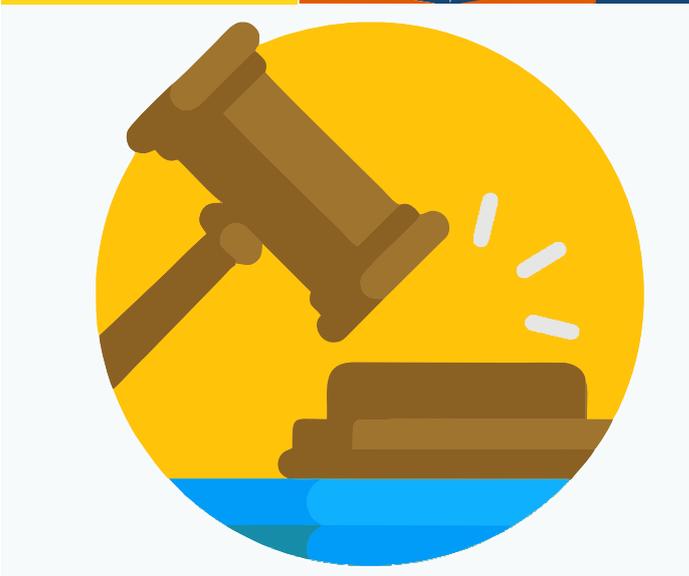
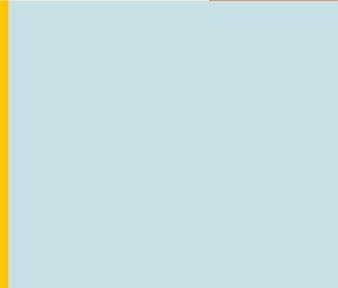
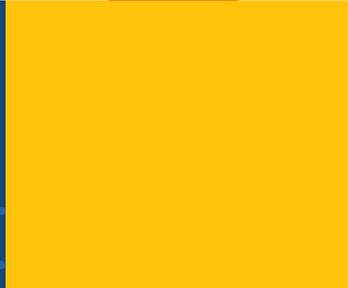
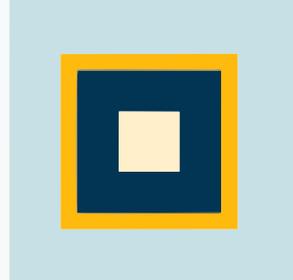


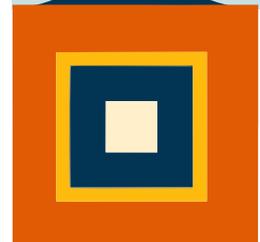
LAPORAN KINERJA 2023

BIRO HUKUM
SEKRETARIAT JENDERAL
KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN





DAFTAR ISI DAFTAR TABEL DAFTAR GAMBAR



Daftar Isi

Daftar Isi	i
Daftar Gambar	iii
Daftar Tabel	iv
Kata Pengantar	v
Ringkasan Eksekutif	vi

Pendahuluan

1.1 Organisasi dan Sumber Daya Manusia	2
1.2 Tugas, Fungsi, Program, dan Kegiatan Biro Hukum	2
1.3 Sumber Daya Manusia Biro Hukum	4
1.4 Potensi	5
1.5 Pengoptimalisasian Kinerja	6
1.6 Sistematisasi Penyusunan Laporan Kinerja	8

Perencanaan Kinerja

2.1 Sasaran Strategis	10
2.2 Penetapan Kinerja Tahun 2023	11
2.3 Program dan Kegiatan	13

Daftar Isi

Akuntabilitas Kinerja

15	3.1 Capaian Kinerja Organisasi
17	3.2 Analisis Capaian Kinerja
101	3.3 Efisiensi Sumber Daya
104	3.4 Penghargaan

Kesimpulan

4.1 Hasil	107
4.2 Tindak Lanjut Mencapai Target Kinerja	110

Daftar Gambar

- Gambar 1. Kedudukan Biro Hukum
- Gambar 2. Struktur Organisasi
- Gambar 3. Demografi Pegawai Biro Hukum
- Gambar 4. Capaian Kinerja Biro Hukum

Daftar Tabel

- Tabel 1. Perjanjian Kinerja Biro Hukum Tahun 2023
- Tabel 2. Indikator Kinerja Target dan Presentase Capaian Kegiatan Biro Hukum Tahun 2023
- Tabel 3. Indikator Kinerja Utama 1
- Tabel 4. Indikator Kinerja Utama 2
- Tabel 5. Indikator Kinerja Utama 3
- Tabel 6. Indikator Kinerja Utama 4
- Tabel 7. Indikator Kinerja Utama 5
- Tabel 8. Indikator Kinerja Utama 6
- Tabel 9. Indikator Kinerja Utama 7
- Tabel 10. Indikator Kinerja Utama 8
- Tabel 11. Indikator Kinerja Utama 9
- Tabel 12. Indikator Kinerja Utama 10
- Tabel 13. Indikator Kinerja Utama 11
- Tabel 14. Indikator Kinerja Utama 12
- Tabel 15. Indikator Kinerja Utama 13
- Tabel 16. Indikator Kinerja Utama 14
- Tabel 17. Indikator Kinerja Utama 15
- Tabel 19. Indikator Kinerja Utama 16

KATA



PENGANTAR

Puji dan syukur senantiasa kami panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah Nya sehingga kami dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Kinerja Biro Hukum Tahun 2023.

Dalam rangka penyelenggaraan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan kinerja di Biro Hukum, disusun Laporan Kinerja Tahun 2023 dimana telah ditetapkan pada perjanjian kinerja tahun 2023, sebagai bentuk akuntabilitas organisasi kepada pimpinan dan publik atas amanat tanggung jawab yang telah dipercayakan kepada kami. Laporan ini mendeskripsikan rencana kinerja, pencapaian kinerja, realisasi anggaran, efisiensi, inovasi, dan achievement dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Biro Hukum.

Laporan Kinerja Tahun 2023 diharapkan dapat memberikan informasi yang akurat dan bermanfaat bagi Biro Hukum, Sekretariat Jenderal, Kementerian Kelautan dan Perikanan, maupun pihak pihak lain. Oleh karena itu, kami sangat mengharapkan masukan, tanggapan, maupun saran yang membangun demi kesempurnaan dan kelancaran dalam pencapaian target kinerja di tahun berikutnya, serta semakin meningkatkan transparansi dalam pelaksanaan good governance.

Terima kasih kami ucapkan kepada semua pihak, baik di internal maupun eksternal Biro Hukum atas segala dukungan dan kerja samanya sehingga seluruh kegiatan Biro Hukum Tahun 2023 dapat terlaksana dengan baik.

Jakarta, 1 Januari 2024


Effin Mariani



Ringkasan Eksekutif

Laporan Kinerja Biro Hukum Tahun 2023 berisikan tentang capaian, tantangan, dan kegiatan yang dihadapi Biro Hukum dalam rangka pencapaian target yang telah ditetapkan pada tahun 2023. Selama tahun 2023, Biro Hukum telah mengalami penyesuaian Perjanjian sebanyak 3 (tiga) kali. Pada pengesahan tanggal 9 Januari 2023, Biro Hukum menetapkan Perjanjian Kinerja Tahun 2023 dengan menetapkan 14 IKU. Pada tanggal 20 Maret 2023 mengesahkan 16 IKU untuk penyesuaian Tim Kerja sebagaimana pasca penetapan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 43 Tahun 2023 tentang Mekanisme Kerja untuk Penyederhanaan Birokrasi di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan Kepmen KP 43/2023, berikut merupakan IKU yang mengalami perubahan yaitu 1) Permasalahan Hukum melalui jalur pengadilan/litigasi di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan yang Ditangani, 2) Permasalahan Hukum di luar jalur pengadilan/nonlitigasi di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan yang Ditangani, 3) Perjanjian Nasional Bidang Kelautan dan Perikanan yang Siap untuk Ditandatangani, 4) Instrumen Hukum Internasional Bidang Kelautan dan Perikanan yang Diberikan Pertimbangan Hukum. Pada 21 November 2023, telah ditetapkan Perjanjian Kinerja sebanyak 16 IKU, terdapat perubahan IKU pada Sasaran Kegiatan Terwujudnya Layanan Dukungan Manajemen yang Baik lingkup Biro Hukum yaitu Nilai Rekonsiliasi Kinerja Biro Hukum menjadi Nilai Penilaian Mandiri SAKIP Biro Hukum dan penyesuaian nomenklatur sebagaimana roadmap RB KKP yaitu Nilai Penilaian Mandiri Reformasi Hukum KKP menjadi Indeks Reformasi Hukum KKP.

Pada tahun 2023, terdapat 2 Sasaran Kegiatan dan 16 indikator kinerja. Pengukuran atas capaian kinerja dilakukan secara berkala. Pencapaian atas target indikator akan menjadi Nilai Kinerja Organisasi yang selanjutnya disingkat menjadi NKO. NKO atau nilai pencapaian sasaran Kegiatan Biro



Ringkasan Eksekutif

Hukum pada Tahun 2023 mencapai **110,90%**, dengan rincian sebagai berikut

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	PK 2023		
			Target	Capaian	%
Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik di Bidang Penyiapan Produk Hukum KKP	1. Nilai Komponen RB KKP yang Menjadi Tanggung Jawab Biro Hukum	Nilai	4,32	4,49	103,94
	2. Indeks Reformasi Hukum KKP	Indeks	79	96,44	120,00
	3. Indeks Kualitas Kebijakan KKP	Indeks	65	83,34	120,00
	4. Persentase Penyelesaian Program Penyusunan Peraturan Menteri dan Keputusan Menteri di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan	%	100	100	100,00
	5. Permasalahan Hukum melalui jalur pengadilan/litigasi di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan yang Ditangani	%	100	160	120,00
	6. Permasalahan Hukum di luar jalur pengadilan/nonlitigasi di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan yang Ditangani	%	100	100	100,00
	7. Perjanjian Nasional Bidang Kelautan dan Perikanan yang Siap untuk Ditandatangani	%	100	109,09	109,09
	8. Instrumen Hukum Internasional Bidang Kelautan dan Perikanan yang Diberikan Pertimbangan Hukum	%	100	120	120,00
	9. Nilai Kinerja Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Kementerian Kelautan dan Perikanan	Nilai	91	98	107,69
Terwujudnya Layanan Dukungan Manajemen	10. Nilai Penilaian Mandiri SAKIP Biro Hukum	Nilai	80,5	87,6	108,82

Ringkasan Eksekutif



Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	PK 2023		
			Target	Capaian	%
yang Baik Lingkup Biro Hukum	11. Indeks Profesionalitas ASN Biro Hukum	Indeks	79	89,64	113,47
	12. Persentase Penyelesaian Temuan BPK di Lingkup Biro Hukum	Persentase	100	100	100
	13. Persentase Unit Kerja yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan yang Terstandar di Lingkungan Biro Hukum	Persentase	92	133,33	120
	14. Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Biro Hukum	Persentase	75	100	120
	15. Persentase Penyerapan Anggaran Biro Hukum	Persentase	95	99,31	104,54
	16. Persentase Penyelesaian Program Penyusunan Peraturan Perundang-undangan Bidang Pengelolaan Regulasi dan Advokasi	Persentase	100	100	100

Untuk mendukung pencapaian kinerja di atas, Biro Hukum mengelola anggaran sebesar Rp13.001.664.000 dengan realisasi Rp12.912.457.558, dengan rincian sebagai berikut

No.	Rincian Ouput	Pagu	Realisasi		Sisa
			Keuangan	%	
1	Layanan Hukum	6,090,564,000	6,075,912,664	99.76%	14,651,336
2	Layanan Bantuan Hukum	1,511,982,000	1,510,256,309	99.89%	1,725,691
3	Layanan Umum	3,336,576,000	3,303,292,989	99.00%	33,283,011
4	Layanan Perkantoran	2,062,542,000	2,022,995,596	98.08%	39,546,404
TOTAL		13,001,664,000	12,912,457,558	99.31%	89,206,442

Ringkasan Eksekutif

Pada tahun 2023, terdapat beberapa prestasi yang telah di peroleh Biro Hukum. Hal ini menjadi suatu pembuktian atas kinerja Biro Hukum dan pemacu untuk berkinerja dengan lebih baik. Berikut beberapa prestasi yang telah diraih, diantaranya

- a. Kementerian Kelautan dan Perikanan berhasil meraih penghargaan sebagai Anggota JDIH Nasional Terbaik V Tingkat Kementerian pada JDIHN Award Tahun 2023.
- b. Kementerian Kelautan dan Perikanan meraih penghargaan Juristica Awards 2023 dengan kategori JDIH dengan Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi Terbaik.
- c. Selama 2023, terdapat 7 Kasus Inkracht dan seluruhnya dimenangkan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan. KKP melalui Biro Hukum telah menyelamatkan potensi pengeluaran negara sebesar Rp4,3 Triliun.

Selain memiliki tugas melaksanakan koordinasi dan penyusunan rancangan peraturan perundang- undangan, rancangan perjanjian, hukum internasional bidang kelautan dan perikanan, advokasi, dokumentasi, dan informasi hukum, Biro Hukum se melakukan kegiatan sosialisasi peraturan perundang–undangan, juga melaksanakan kegiatan konsultasi publik yang merupakan salah satu tugas dan fungsi Biro Hukum, Sekretariat Jenderal, Kementerian Kelautan dan Perikanan guna memberikan informasi kepada publik sehingga mereka dapat berpartisipasi dalam penyusunan peraturan perundang-undangan. Pada tahun 2023, Biro Hukum telah melaksanakan 18 kegiatan yang terdiri dari



Ringkasan Eksekutif



No	Acara	Tempat Pelaksanaan	Peserta	Dokumentasi
1.	Konsultasi Publik Rancangan Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 126 Tahun 2022 tentang Percepatan Pembangunan Pergaraman Nasional	Novotel Samator Surabaya	Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Sekretariat Kabinet, Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan, Kementerian Kesehatan, Kementerian PUPR, BPPT, BMKG, BIG, BSN, Instansi Terkait, Akademisi, Pelaku Usaha	
2.	Konsultasi Publik 2 (dua) Rancangan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan yakni Rancangan Perubahan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 31 Tahun 2021 tentang Pengenaan Sanksi Administratif di Bidang Kelautan dan Perikanan dan Rancangan Perubahan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 23 Tahun 2021 tentang Standar Laik Operasi dan Sistem Pemantauan Kapal Perikanan	Hotel Swiss-Belhotel Maleosan Manado	Unit kerja eselon I terkait di lingkungan KKP, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Utara, Dinas Pertanian, Kelautan, dan Perikanan Kota Manado, Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bitung, Unit Pelaksana Teknis KKP, satuan kerja perangkat daerah Provinsi Sulawesi Utara, Akademisi Universitas Negeri Manado, Akademisi Universitas Sam Ratulangi, penyuluh perikanan di Provinsi Sulawesi Utara, dan Pelaku usaha subsektor pengelolaan ruang laut dan subsektor perikanan tangkap, di Provinsi Sulawesi Utara dan sekitarnya baik perseorangan maupun badan hukum	

Ringkasan Eksekutif



No	Acara	Tempat Pelaksanaan	Peserta	Dokumentasi
3.	Konsultasi Publik Rancangan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Pemberlakuan Secara Wajib Standar Nasional Indonesia Tuna dalam Kemasan Kaleng dan Standar Nasional Indonesia Sarden dan Makarel dalam Kemasan Kaleng	The Luxton Cirebon Hotel & Convention	Kementerian/ lembaga, instansi terkait, akademisi, lembaga sertifikasi produk, pelaku usaha	<p>6.711092S 108.5530302E ±14.3172 60 Jalan Karti Sukapa Kecamatan Kelaks Kota Cirebon Jawa Barat Altitude: 21 m Index number: 2 8 Jun 2023 09:21</p>
4.	Sosialisasi Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2023 tentang Penangkapan Ikan Terukur dan Konsultasi Publik Rancangan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2023 tentang Penangkapan Ikan Terukur	Hotel Aryaduta Manado	Unit kerja eselon I terkait di lingkungan KKP, Pelabuhan Perikanan Samudera Bitung, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Utara, Dinas Pertanian, Kelautan, dan Perikanan Kota Manado, Dinas Pertanian, Kelautan, dan Perikanan Kota Bitung, Akademisi Universitas Sam Ratulangi, pelaku usaha/asosiasi/ LSM di Provinsi Sulawesi Utara	<p>25 Mei 2023 12.04:26 Wenang Utara Kecamatan Wenang Kota Manado Sulawesi Utara</p>

Ringkasan Eksekutif



No	Acara	Tempat Pelaksanaan	Peserta	Dokumentasi
5.	Sosialisasi Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2023 tentang Penangkapan Ikan Terukur dan Konsultasi Publik Rancangan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2023 tentang Penangkapan Ikan Terukur	Hotel Harris Sentraland, Semarang	Unit kerja eselon I terkait di lingkungan KKP, Balai Besar Penangkapan Ikan Semarang, Pelabuhan Perikanan Nusantara Pekalongan, Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah, Pelabuhan Perikanan Pantai Tegalsari, Pelabuhan Perikanan Pantai Klidanglor, Pelabuhan Perikanan Pantai Morodemak, Pelabuhan Perikanan Pantai Bajomulyo, Pelabuhan Perikanan Pantai Larangan, Pelabuhan Perikanan Pantai Asemdayong, Pelabuhan Perikanan Pantai Wonokerto, Pelabuhan Perikanan Pantai Tawang, Pelabuhan Perikanan Pantai Karimunjawa, Dinas Perikanan Kota Semarang, Akademisi Universitas Diponegoro, Asosiasi dan Pelaku Usaha Perikanan di Provinsi Jawa Tengah	
6.	Sosialisasi Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2023 tentang Penangkapan Ikan Terukur dan Konsultasi Publik Rancangan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2023 tentang Penangkapan Ikan Terukur	Swiss-Belhotel Harbour Bay Batam	Unit kerja eselon I terkait di lingkungan KKP, Pangkalan PSDKP Batam, Stasiun KIPM I Batam, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Riau, Dinas Perikanan Kota Batam, Akademisi Universitas Maritim Raja Ali Haji, Pelaku Usaha/asosiasi/ LSM di Provinsi Kepulauan Riau	

Ringkasan Eksekutif



No	Acara	Tempat Pelaksanaan	Peserta	Dokumentasi
7.	Konsultasi Publik Pengenaan Kewajiban Untuk Memasukkan Devisa Hasil Ekspor dari Barang Ekspor Sumber Daya Alam ke dalam Sistem Keuangan Indonesia	Konferensi video	Perwakilan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Keuangan (Direktur Teknis Kepabeanaan dan perwakilan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai), Bank Indonesia, pelaku usaha bidang kelautan dan perikanan, dan KKP (Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut, Direktorat Jenderal PDSPKP, BKIPM, dan Biro Hukum);	
8.	Sosialisasi Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut dan Konsultasi Publik Rancangan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut	Swiss-Belhotel Lampung	Pemerintah daerah/instansi terkait, Non-Governmental Organization (NGO), akademisi, dan pelaku usaha	

Ringkasan Eksekutif



No	Acara	Tempat Pelaksanaan	Peserta	Dokumentasi
9.	Sosialisasi Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut dan Konsultasi Publik Rancangan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut	Swiss-Belinn Modern Cikande	Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, BPKP, Pemerintah daerah/instansi terkait, Non-Governmental Organization (NGO), akademisi, dan pelaku usaha	
10.	Konsultasi Publik Rancangan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Penangkapan, Pembudidayaan, dan Pengelolaan Lobster (<i>Panulirus</i> spp.), Kepiting (<i>Scylla</i> spp.), dan Rajungan (<i>Portunus</i> spp.)	Anugrah Hotel Sukabumi	Instansi terkait, akademisi, pelaku usaha, Kelompok Nelayan Lobster Sukabumi	
11.	Konsultasi Publik Rencana Pengesahan <i>Cape Town Agreement 2012</i> (Konvensi Internasional IMO terkait Keselamatan Kapal Penangkap Ikan)	Harris Hotel & Conventions, Denpasar, Bali	Unit kerja eselon I terkait di lingkungan KKP, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali, Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan Kota Denpasar, Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengambangan, Pangkalan PSDKP Benoa, Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas II Benoa, Asosiasi dan Industri Perikanan di Provinsi Bali	

Ringkasan Eksekutif



No	Acara	Tempat Pelaksanaan	Peserta	Dokumentasi
12.	Konsultasi Publik Revisi Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kelautan dan Perikanan	Harris Hotel & Residences Sunset Rooda, Kuta, Bali	Unit kerja eselon I terkait di lingkungan KKP, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali, Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan Kota Denpasar, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bali, Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengambangan, Pangkalan PSDKP Benoa, BKIPM Kelas I Denpasar, Asosiasi/Pelaku Usaha di Provinsi Bali	 <p>Kota Denpasar, Bali, Indonesia Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Bali, Indonesia Lat: -8.707787, Long: 115.187817 11/16/2023 08:53 AM GMT+08:00</p>
13.	Pendalaman Materi Jabatan Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan dan Analisis Hukum di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan	Grand Candi Hotel, Jalan Sisinga mangaraja No. 16, Kaliwiru, Kec. Candisari, Kota Semarang, Jawa Tengah	27 (dua puluh tujuh) orang pejabat fungsional perancang peraturan perundang-undangan dan 32 (tiga puluh dua) orang pejabat fungsional analis hukum di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, selain itu turut hadir perwakilan dari Pemerintah Daerah Provinsi Semarang, Pemerintah Daerah Kota Semarang, dan Pemerintah Daerah Kabupaten Semarang	 <p>Kota Semarang, Jawa Tengah, Indonesia Kota Semarang, Jawa Tengah, Indonesia Lat: -6.993111, Long: 110.428222 10/21/2023 08:50 AM GMT+07:00 Note: Courtesy by GPS Map, Indonesia</p>

Ringkasan Eksekutif



No	Acara	Tempat Pelaksanaan	Peserta	Dokumentasi
14.	Focus Group Discussion Hasil Perundingan Delimitasi Batas Maritim dan Peta Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia,	Hotel Aryaduta Jakarta	dihadiri oleh perwakilan dari Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Badan Informasi Geospasial, Pushidrosal, dan KKP (Setditjen Pengelolaan Ruang Laut, Dit. Perencanaan Ruang Laut, Setditjen Perikanan Tangkap, Dit. Pengelolaan Sumber Daya Ikan, Setditjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, Dit. Penanganan Pelanggaran, Dit. Pemantauan dan Operasi Armada, Setitjen, Biro Humas dan Kerja Sama Luar Negeri, dan Biro Hukum)	 

Ringkasan Eksekutif



No	Acara	Tempat Pelaksanaan	Peserta	Dokumentasi
15.	Reviu Perjanjian Penggunaan Sebagian Tanah/Bangunan di Kawasan Pelabuhan Perikanan Sebagai Tindak Lanjut LHP BPK	Hotel Ibis Styles Semarang Simpang Lima	perwakilan dari KKP (Setditjen PT, Dit Kepelabuhanan Perikanan, PPS dan PPN di lingkungan Ditjen PT, Itjen, Biro Keuangan, dan Biro Hukum) dan Biro Hukum Pemerintah Provinsi Jawa Tengah	
16.	Pendalaman Materi Jabatan Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan dan Analisis Hukum di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan	Savero Style Hotel Bogor, Jawa Barat	Sebanyak 75 (tujuh puluh lima) orang pejabat fungsional perancang peraturan perundang-undangan dan analis hukum serta pegawai di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan yang berminat untuk pindah ke dalam jabatan fungsional perancang peraturan perundang-undangan dan analis hukum	
17.	Pelaksanaan Pendalaman Materi Jabatan Fungsional Perancang Peraturan Perundang-Undangan dan Analisis Hukum di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan	Semarang	Para Perancang dan Analisis Hukum di Lingkungan KKP	

Ringkasan Eksekutif

No	Acara	Tempat Pelaksanaan	Peserta	Dokumentasi
18.	Forum Hukum 2023	Bandung	Seluruh unit kerja di KKP, akademisi, pelaku usaha bidang KP, stakeholder bidang KP	

Berdasarkan hasil capaian kinerja tahun 2023, Biro Hukum telah menyelesaikan target dengan sangat baik dan optimal. Untuk mempertahankan capaian kerjanya, terdapat beberapa hal yang sudah disiapkan dalam menentukan target dan rencana kerja di Tahun 2024 antara lain

1. Biro Hukum telah menetapkan rencana kerja yang terdiri dari 2 sasaran kinerja dan 16 turunannya;
2. Pada tahun 2024 terdapat pengurangan 1 IKU terkait Komponen Nilai RB KKP yang menjadi tanggung jawab Biro Hukum dikarenakan pada tahun 2024 IKU tersebut diubah menjadi konsep RB Tematik, merupakan upaya dan sarana untuk mengurai dan menjawab atau mengatasi akar permasalahan tata kelola pemerintahan (debottlenecking) yang akan dirasakan secara langsung oleh masyarakat.
3. Berdasarkan hasil Dialog Kinerja Organisasi di Lingkungan Sekretariat Jenderal KKP, Biro Hukum diusulkan untuk penilaian inovasi pelayanan publik di Lingkungan Sekretariat Jenderal.
4. Dalam menindaklanjuti masukan dan catatan untuk optimalisasi tugas dan fungsi, Biro Hukum akan melakukan perbaikan internal dalam penyusunan PUU, Bantuan Hukum, dan Penyusunan Rancangan Perjanjian dan Hukum Internasional.



Ringkasan Eksekutif

5. Biro Hukum akan melakukan koordinasi eksternal untuk indikator kinerja yang dinilai oleh K/L lain.

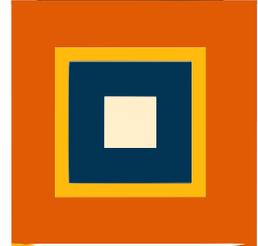
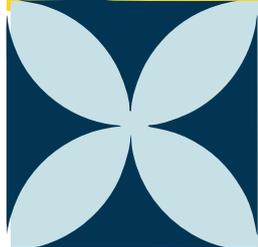
Dengan disusunnya Laporan Kinerja Tahun 2023 ini, diharapkan dapat menjadi memotivasi aparatur negara di Lingkungan Biro Hukum untuk meningkatkan kinerjanya, sehingga dadaran dan tujuan yang ditargetkan dalam Perjanjian Kinerja (PK) tahun dapat dicapai dengan baik. Rangkuman keberhasilan kegiatan yang telah dilakukan oleh Biro Hukum dapat dilihat pada tabel aplikasi Kinerjaku untuk Tahun 2023.





BAB 1

PENDAHULUAN



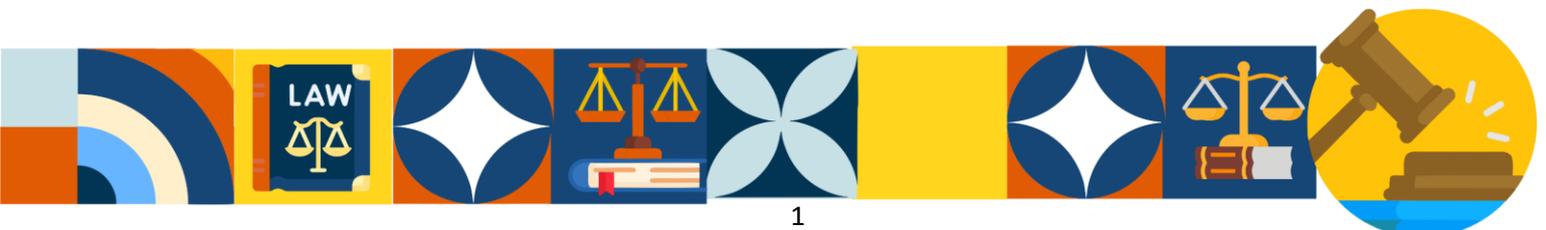


BAB I PENDAHULUAN

Dalam rangka mendorong terciptanya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagai salah satu prasyarat untuk terciptanya pemerintah yang baik dan terpercaya diperlukan penyelenggaraan SAKIP yang mengintegrasikan dari sistem perencanaan, pemrograman, penganggaran, pelaksanaan program, dan kegiatan yang kemudian dituangkan dalam Laporan Kinerja. Berdasarkan Peraturan Menteri PAN dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah menjadi latar belakang penyusunan laporan kinerja yang merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (*disclosure*) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja. Dijelaskan juga tujuan dari penyusunan laporan kinerja yaitu memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dilaksanakan dan seharusnya dicapai serta sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya.

Laporan Kinerja Biro Hukum Tahun 2023 merupakan gambaran kinerja Biro Hukum termasuk pengukuran dan evaluasi serta hasil analisis terhadap kinerja pencapaian sasaran dan kegiatan yang telah ditetapkan dan dilaksanakan selama tahun 2023, serta bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada Biro Hukum atas penggunaan anggaran.

Tujuan dari penyusunan Laporan Kinerja adalah sebagai laporan atas kinerja yang telah diperjanjikan kepada Sekretaris Jenderal, memberikan informasi kinerja kepada publik atas kinerja yang seharusnya tercapai, dan sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi Biro Hukum untuk meningkatkan kinerjanya di kemudian hari dan juga sebagai alat kendali dan pemacu peningkatan kinerja

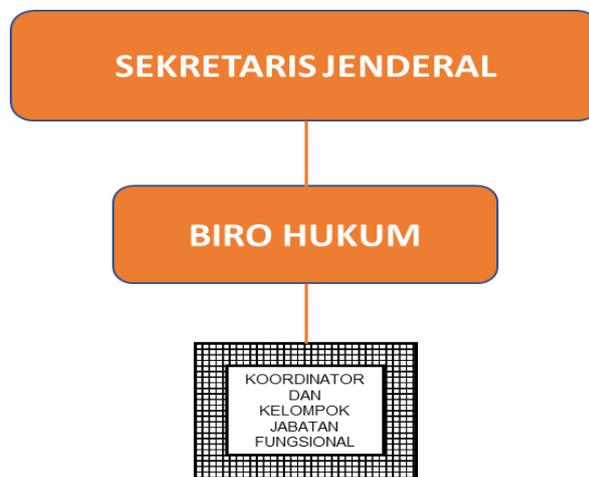




setiap unit organisasi di lingkungan Sekretariat Jenderal dan sekaligus untuk mendapatkan masukan dari *stakeholders* demi perbaikan kinerja Kementerian Kelautan dan Perikanan.

1.1. Organisasi dan Sumber Daya Manusia

Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 48/PERMEN-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1114), Biro Hukum merupakan salah satu unit kerja eselon II yang berada di bawah Sekretariat Jenderal, Kementerian Kelautan dan Perikanan dengan struktur organisasi sebagai berikut

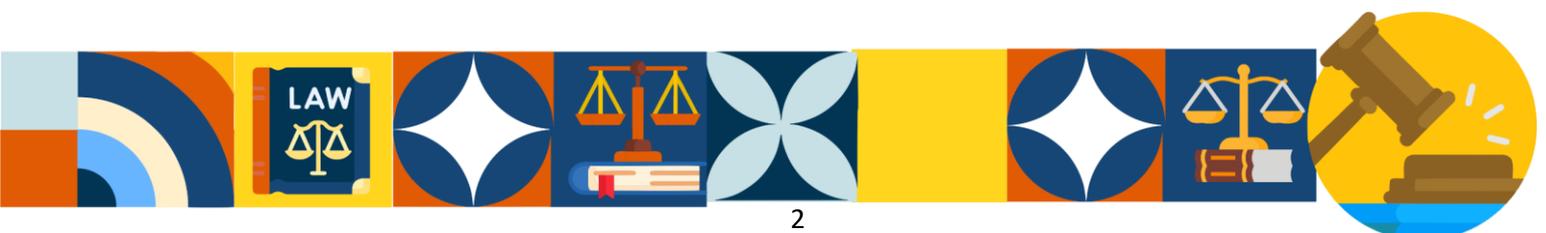


Gambar 1
Kedudukan Biro Hukum

1.2. Tugas, Fungsi, Program, dan Kegiatan Biro Hukum

Biro Hukum mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan, rancangan perjanjian, hukum internasional bidang kelautan dan perikanan, advokasi, dokumentasi, dan informasi hukum. Dalam melaksanakan tugas, Biro Hukum menyelenggarakan 4 (empat) fungsi yang terdiri dari

1. Penyusunan Rancangan PUU, Koordinasi dan fasilitasi perencanaan, penelaahan, penyusunan, pembahasan, dan harmonisasi rancangan peraturan perundang-undangan dan instrumen hukum, serta monitoring,



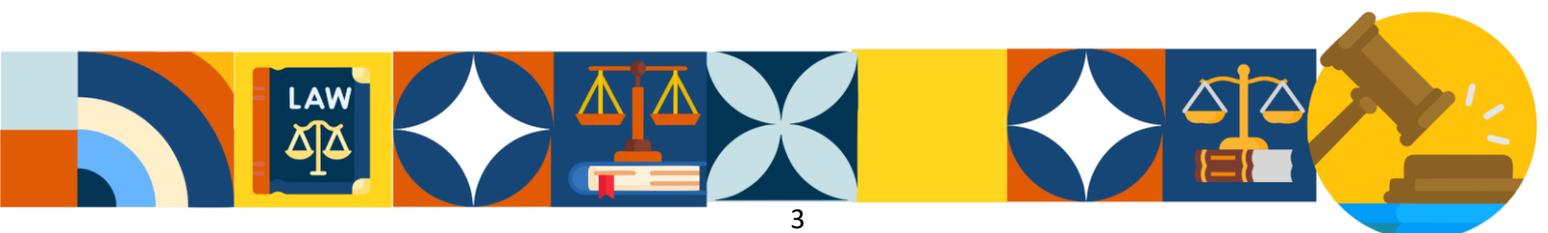


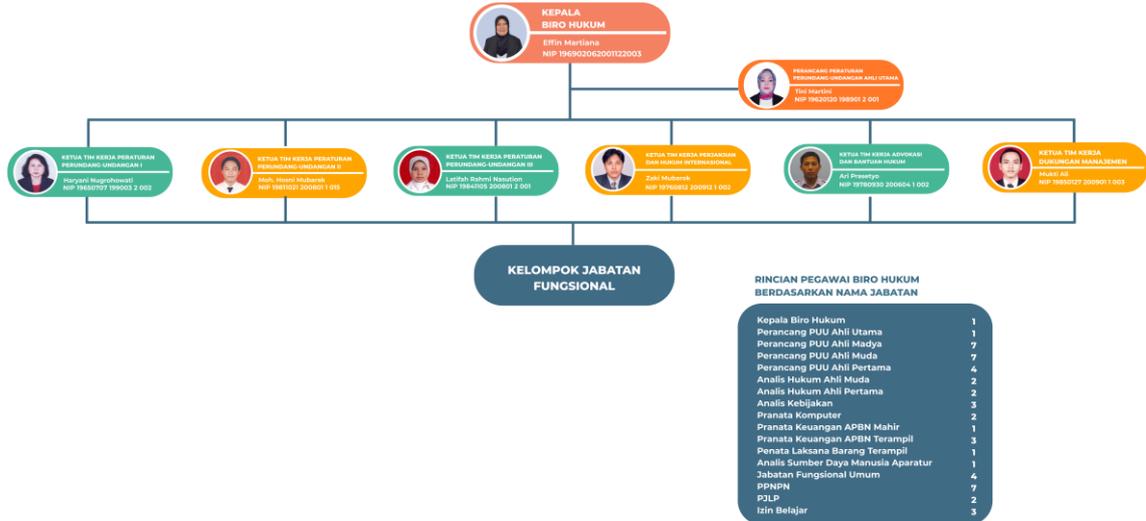
evaluasi, dan bimbingan teknis peraturan perundang-undangan di Bidang Kelautan dan Perikanan;

2. Advokasi dan Bantuan Hukum, Koordinasi dan fasilitasi konsultasi hukum, pendapat hukum, pendampingan, penyelesaian perkara hukum, dan diseminasi hukum
3. Rancangan Perjanjian dan Hukum Internasional, Koordinasi dan fasilitasi perencanaan, penelaahan, penyusunan, dan pembahasan rancangan perjanjian dan hukum internasional di bidang kelautan dan perikanan
4. Dokumentasi dan Informasi Hukum, Pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum; dan
5. Dukungan Manajemen, Pelaksanaan urusan ketatausahaan biro.

Program dan kegiatan Biro Hukum secara konsisten mendukung pelaksanaan program Sekretariat Jenderal melalui Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Kelautan dan Perikanan. Untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana tersebut di atas terdapat satu Kepala Biro dan 6 ketua tim kerja yaitu

- a. Ketua Tim Kerja Peraturan Perundang-undangan I;
- b. Ketua Tim Kerja Peraturan Perundang-undangan II;
- c. Ketua Tim Kerja Peraturan Perundang-undangan III;
- d. Ketua Tim Kerja Advokasi dan Bantuan Hukum;
- e. Ketua Tim Kerja Perjanjian dan Hukum Internasional;
- f. Ketua Tim Kerja Dukungan Manajemen.





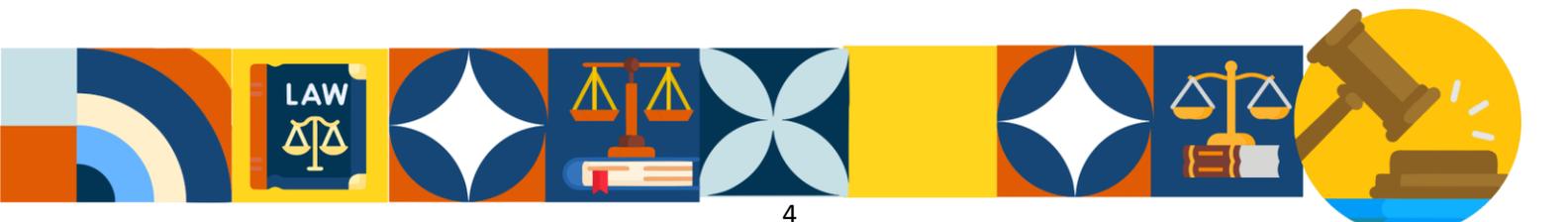
Gambar 2
Susunan Keanggotaan Tim Kerja

1.3. Sumber Daya Manusia Biro Hukum

Sumber daya manusia adalah aset utama organisasi dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi organisasi Biro Hukum. Pada tahun 2023, total pegawai Biro Hukum sebanyak 48 orang yang terdiri dari jabatan pimpinan tinggi pratama, pejabat fungsional, dan pejabat administrasi dengan komposisi sebagai berikut



Gambar 3
Demografi Pegawai Biro Hukum

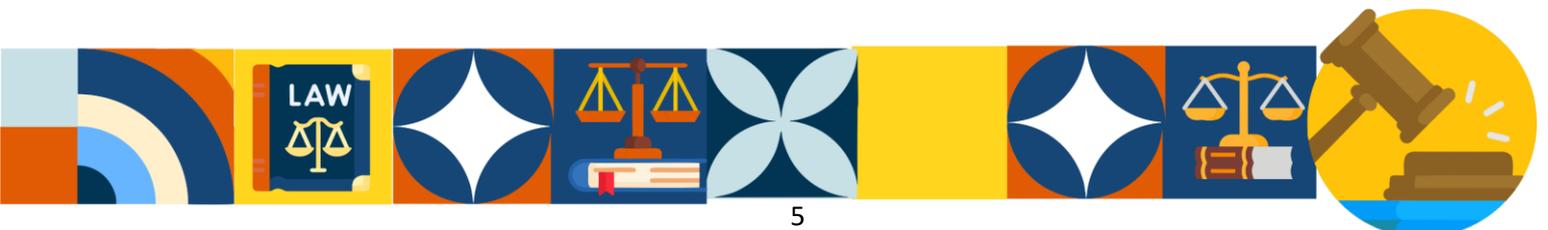




1.4. Potensi

Saat ini, mengembangkan potensi unit kerja sangatlah berpengaruh untuk hasil kinerja yang lebih maksimal. Beberapa potensi yang telah dimiliki oleh Biro Hukum, antara lain;

- a. komitmen kuat dari pimpinan dan seluruh aparatur Biro Hukum dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik;
- b. mendorong generasi milenial untuk terus mengembangkan potensi diri dan melahirkan ide-ide baru yang dapat menunjang kinerja organisasi agar terus berkembang;
- c. mengadakan pelatihan-pelatihan, pendalaman materi, dan bimbingan teknis untuk menciptakan sumber daya manusia aparatur Perancang Peraturan Perundang-undangan dan Analis Hukum yang handal dan profesional dalam melaksanakan tugas dan fungsi Biro Hukum;
- d. sarana dan prasarana yang memadai dalam menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi Biro Hukum;
- e. pembaharuan informasi hukum pada JDIH yang transparan, komunikatif, dan adaptif;
- f. menindaklanjuti Program Legislasi Nasional Bidang Kelautan dan Perikanan Tahun 2023;
- g. komitmen Biro Hukum untuk terus menciptakan peraturan perundang-undangan yang menjadi payung dalam setiap program kegiatan di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan dengan melakukan evaluasi pelaksanaan Progsun 2023 secara berkala;
- h. selalu terbuka dalam memberikan pelayanan pendampingan hukum di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan; dan
- i. komitmen Biro Hukum untuk terus melakukan pendampingan dalam penyusunan draft perjanjian agar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kelaziman.





1.5. Pengoptimalisasian Kinerja

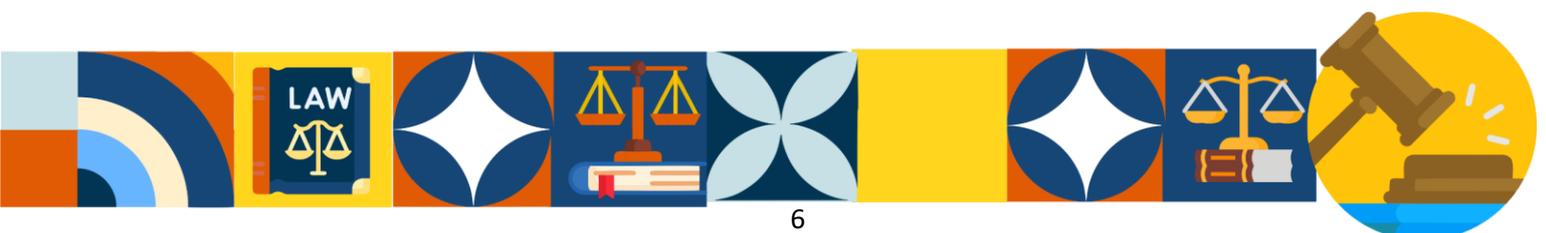
Untuk menghasilkan *output* yang lebih baik dan meningkatkan optimalisasi kinerja dalam organisasi, perlu dilakukan penyempurnaan dari faktor internal dan faktor eksternal di lingkungan Biro Hukum untuk pencapaian kinerja yang lebih optimal, di antaranya

a. Faktor Internal

1. Keterbatas jumlah ASN dan non-ASN yang menangani tugas dan fungsi Biro Hukum tidak optimal dalam menangani beban kerja yang semakin meningkat dan beragam; dan
2. Terbatasnya pendidikan dan pelatihan yang diperoleh masing-masing ASN dan non-ASN yang dapat meningkatkan kompetensi;

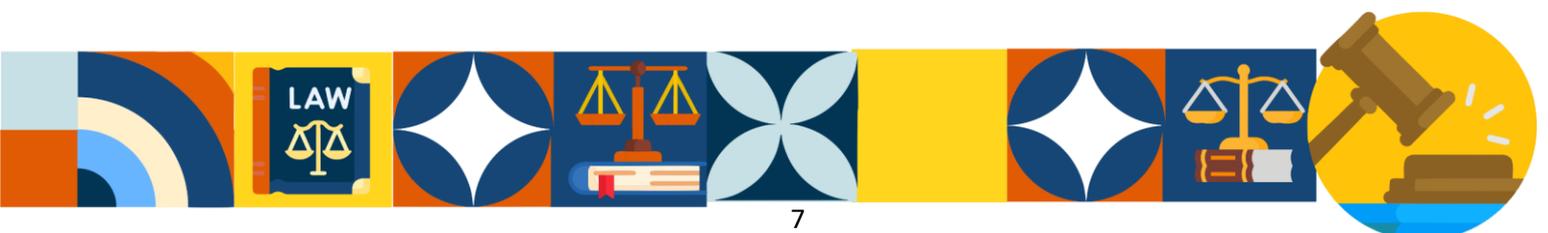
b. Faktor Eksternal

1. Pada tahap perencanaan penyusunan Perundang-undangan, Kesiapan program penyusunan produk hukum di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan yang belum optimal, sehingga pada tahun 2023 usulan Izin Prakarsa lebih banyak daripada Program Penyusunan Peraturan Perundang-undangan Tahun 2023.
2. Pada tahap penyusunan Perundang-undangan, terdiri dari
 - a. Kesiapan materi muatan rancangan produk hukum yang tercantum dalam program penyusunan belum dapat menjawab kebutuhan regulasi yang diusulkan.
 - b. Banyaknya peraturan perundang-undangan terkait perizinan berusaha yang harus direvisi dan materi muatannya masih banyak yang tumpang tindih.
 - c. Ditetapkan atau belum ditetapkannya peraturan perundang-undangan kementerian/lembaga lain yang menjadi pedoman penyusunan peraturan perundang-undangan di lingkungan KKP.
3. Pada tahap Penetapan Rancangan Perundang-undangan, Kelambatan proses permohonan paraf dalam pengesahan atau penetapan produk hukum.





4. Pada tahap Pengundangan Rancangan Perundang-undangan, Kelambatan dalam proses pengundangan.
5. Dalam penanganan kasus hukum di lingkungan kelautan dan perikanan,
 - a. Unit kerja yang mengalami permasalahan hukum belum kooperatif saat meminta pendampingan hukum.
 - b. Terbatasnya informasi terkait permasalahan hukum dari pihak terkait(pindah/pensiun/meninggal), sehingga Inventarisasi dan penyiapan bukti berupa surat/dokumen penanganan permasalahan hukum menjadi terhambat.
 - c. Pemeriksaan/penyidikan bisa diadakan berulang kali karena kurangnya pemahaman terhadap tugas dan fungsi yang diemban sehingga masih timbul perasaan takut menghadapi penyidik saat pemeriksaan maupun menghadapi jaksa, hakim, dan pengacara dalam persidangan.
 - d. Dilakukan penjadwalan ulang untuk pemeriksaan karena pemanggilan pemeriksaan yang mendadak sedangkan terperiksa sudah terdapat agenda lain.
6. Dalam penyusunan draf perjanjian
 - a. Pembahasan dan penandatanganan perjanjian internasional menjadi berlarut-larut serta bisa merugikan kepentingan Kementerian Kelautan dan Perikanan karena unit kerja terkait di Kementerian Kelautan dan Perikanan kurang memahami *legal english* dan kurang maksimal dalam hal kemampuan negosiasi pembuatan suatu perjanjian internasional.
 - b. Perjanjian yang disusun cenderung belum sesuai dengan kaidah penyusunan suatu perjanjian yang lazim di Kementerian Kelautan dan Perikanan, peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan hukum internasional karena kurang pahamnya pihak mitra dalam hal penyusunan perjanjian.





- c. Perjanjian yang disusun harus melalui proses reviu yang bertahap di unit kerja eselon I sehingga terkadang mengakibatkan proses tindak lanjut menjadi lebih lama karena terdapat kepentingan internal dan kurang memahami bentuk perjanjian sehingga membuat perjanjian menjadi beragam.

1.6. Sistematika Penyusunan Laporan Kinerja

Pada dasarnya Laporan Kinerja Tahun 2023 merupakan capaian kinerja Biro Hukum berdasarkan rencana kerja yang sudah ditetapkan pada penetapan kinerja tahun 2023 dan sesuai dengan target kinerja sebagai tolok ukur keberhasilan tahunan. Dengan membandingkan antara capaian kinerja (*performance result*) tahun 2023 dengan rencana kerja (*performance plan*) tahun 2022 sebagai tolok ukur keberhasilan, maka akan teridentifikasi sejumlah celah kinerja (*performance gap*). Dari hasil analisis terhadap celah kinerja tersebut, dapat diperoleh masukan bagi perbaikan kinerja di masa yang akan datang.

Agar laporan ini dapat dipahami oleh pembaca dan dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya, maka laporan ini akan disajikan dengan sistematika sebagai berikut

1. Bab I Pendahuluan

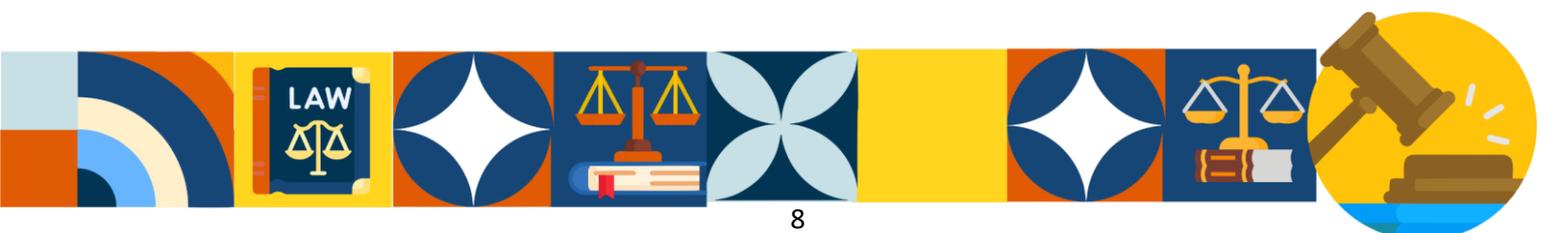
Bab ini menyajikan penjelasan tentang latar belakang, stuktur organisasi Biro Hukum tugas, fungsi, program, dan kegiatan Biro Hukum, sumber daya manusia Biro Hukum, dan pada bagian akhir bab ini disajikan mengenai sistematika penyajian laporan.

2. BAB II Perencanaan Kinerja

Bab ini menjelaskan secara umum ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja Biro Hukum yang telah dicapai dalam satu tahun.

3. Bab III Akuntabilitas Kinerja

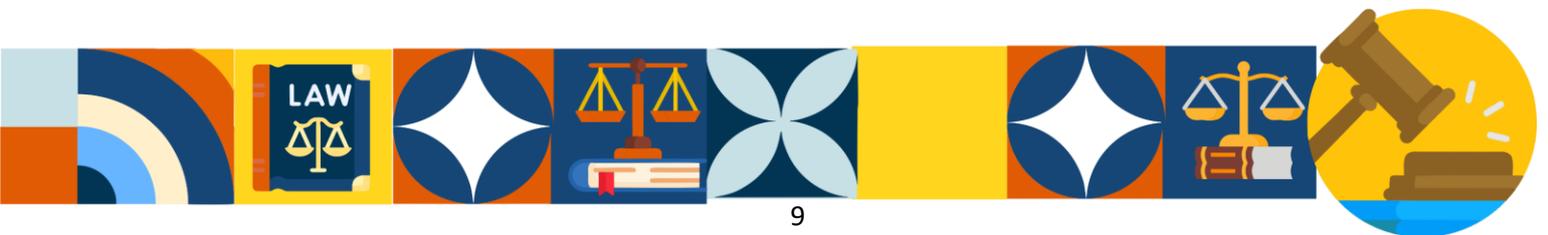
Bab ini menjelaskan capaian kinerja untuk setiap indikator kinerja sasaran strategis sesuai dengan hasil pengukuran kinerja.





4. Bab IV Simpulan

Bab ini menjelaskan simpulan Laporan Kinerja Biro Hukum Tahun Anggaran 2023 dan menguraikan rencana tindak lanjut yang diperlukan bagi perbaikan kinerja di masa yang akan datang.

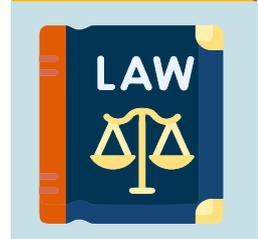
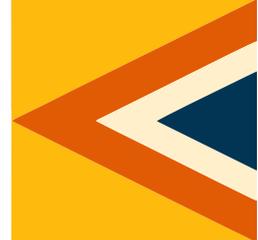
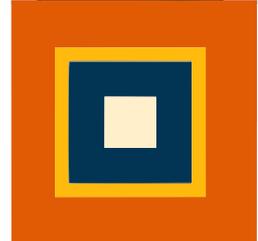
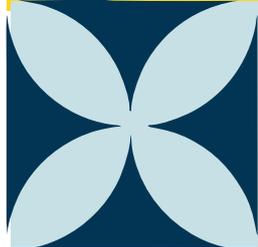




BAB 2

PERENCANAAN

KINERJA





BAB II

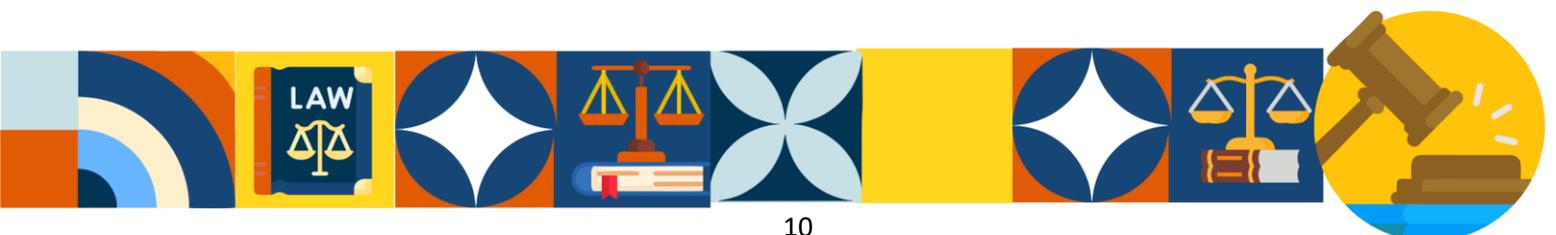
PERENCANAAN KINERJA

2.1. Sasaran Kegiatan

Sebagai bagian dari manajemen kinerja, kedudukan perencanaan kinerja menjadi suatu isu strategis yang harus diperhatikan dan dipecahkan oleh pimpinan instansi sebagai manajer dan pemimpin yang mengarahkan instansinya kepada arah pencapaian visi dan pelaksanaan misi organisasi. Perencanaan kinerja juga merupakan tahap penting dalam melaksanakan rencana strategis yang akan menuntun manajemen dan seluruh anggota organisasi pada capaian kinerja yang diinginkan. Dengan berdasarkan pada perencanaan kinerja yang baik maka pelaksanaan rencana strategis juga dapat dipantau tingkat pencapaiannya secara lebih operasional serta dengan melihat berbagai kemungkinan dan alternatif untuk meningkatkan pencapaian dan sasaran organisasi secara.



Sasaran merupakan bagian integral dari proses perencanaan strategis organisasi. Fokus utama penentuan sasaran adalah tindakan dan alokasi sumber daya organisasi. Oleh karena itu, sasaran harus lebih fokus, bersifat spesifik, terinci, dan dapat diukur. Berdasarkan kriteria tersebut di atas, dalam konteks percepatan pembangunan Sekretariat Jenderal, Kementerian Kelautan dan Perikanan melalui Biro Hukum memberikan kontribusi sesuai tugas melaksanakan koordinasi dan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan, rancangan perjanjian, hukum internasional bidang kelautan dan perikanan, advokasi, dokumentasi, dan

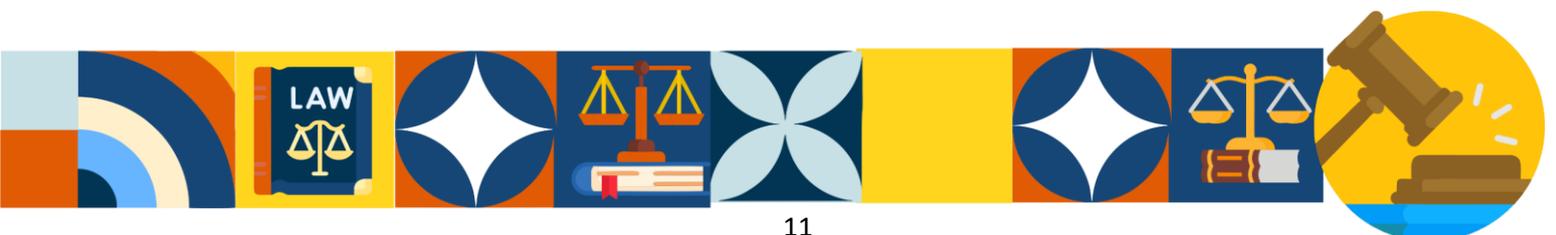




informasi hukum telah menetapkan sasaran yang didasari oleh terwujudnya birokrasi Kementerian Kelautan dan Perikanan yang efektif, efisien, dan berorientasi pada layanan prima untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan diperlukan indikator sasaran. Indikator sasaran adalah ukuran tingkat keberhasilan pencapaian sasaran untuk diwujudkan pada tahun bersangkutan. Setiap indikator sasaran disertai rencana tingkat capaiannya (targetnya) masing-masing. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu/tahunan secara berkesinambungan. Pada masing-masing sasaran ditetapkan indikator yang dapat mengukur keberhasilan organisasi dalam mencapai tujuannya. Dengan demikian, setiap tujuan yang ditetapkan memiliki indikator yang terukur.

2.2. Penetapan Kinerja Tahun 2023

Biro Hukum telah menetapkan target kinerja program dan kegiatan dalam dokumen Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2023 yang disusun secara berjenjang. Dokumen tersebut telah ditandatangani oleh pejabat eselon II dengan pejabat eselon I, dan pejabat eselon I dengan Menteri Kelautan dan Perikanan. Biro Hukum telah mengalami penyesuaian Perjanjian sebanyak 3 (tiga) kali. Pada pengesahan tanggal 9 Januari 2023, Biro Hukum menetapkan Perjanjian Kinerja Tahun 2023 dengan menetapkan 14 IKU. Pada tanggal 20 Maret 2023 mengesahkan 16 IKU untuk penyesuaian Tim Kerja sebagaimana pasca penetapan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 43 Tahun 2023 tentang Mekanisme Kerja untuk Penyederhanaan Birokrasi di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan Kepmen KP 43/2023, berikut merupakan IKU yang mengalami perubahan yaitu 1) Permasalahan Hukum melalui jalur pengadilan/litigasi di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan yang Ditangani, 2) Permasalahan Hukum di luar jalur pengadilan/nonlitigasi di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan yang Ditangani, 3) Perjanjian Nasional Bidang Kelautan dan Perikanan yang Siap untuk Ditandatangani, 4) Instrumen Hukum Internasional Bidang Kelautan dan Perikanan yang Diberikan Pertimbangan Hukum. Pada 21 November 2023, telah ditetapkan Perjanjian Kinerja sebanyak 16 IKU, terdapat perubahan IKU pada Sasaran

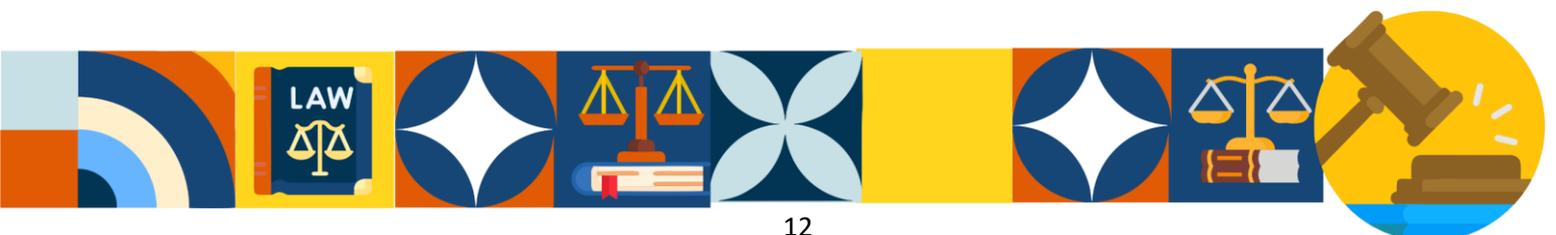




Kegiatan Terwujudnya Layanan Dukungan Manajemen yang Baik lingkup Biro Hukum yaitu Nilai Rekonsiliasi Kinerja Biro Hukum menjadi Nilai Penilaian Mandiri SAKIP Biro Hukum dan penyesuaian nomenklatur sebagaimana roadmap RB KKP yaitu Nilai Penilaian Mandiri Reformasi Hukum KKP menjadi Indeks Reformasi Hukum KKP. Perjanjian Kinerja Biro Hukum Tahun 2023 sesuai dengan *Balance Score Card (BSC)* adalah sebagai berikut

**Tabel 1
Perjanjian Kinerja Biro Hukum Tahun 2023**

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET TAHUN 2023	TARGET TAHUN 2023	TARGET TAHUN 2023
		(9 Januari 2023)	(20 Maret 2023)	(21 November 2023)
Tata Kelola Pemerintahan yang Baik di Bidang Penyiapan Produk Hukum Kementerian Kelautana dan Perikanan	1. Komponen Nilai RB KKP yang Menjadi Tanggung Jawab Biro Hukum	4.32	4.32	4.32
	2. Indeks Reformasi Hukum KKP	-	-	79
	3. Indeks Kualitas Kebijakan KKP	65	65	65
	4. Persentase Penyelesaian Program Penyusunan Peraturan Menteri dan Keputusan Menteri di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan	100	100	100
	5. Permasalahan Hukum melalui jalur pengadilan/litigasi di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan yang Ditangani	-	100	100
	6. Permasalahan Hukum di luar jalur pengadilan/nonlitigasi di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan yang Ditangani	-	100	100
	7. Perjanjian Nasional Bidang Kelautan dan Perikanan yang Siap untuk Ditandatangani	-	100	100
	8. Instrumen Hukum Internasional Bidang Kelautan dan Perikanan yang Diberikan Pertimbangan Hukum	-	100	100
	9. Nilai Kinerja Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan	91	91	91



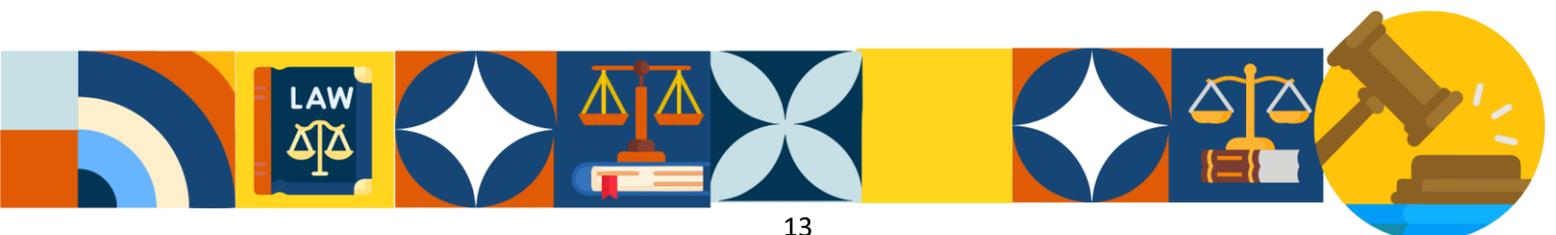


SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET TAHUN 2023	TARGET TAHUN 2023	TARGET TAHUN 2023
		(9 Januari 2023)	(20 Maret 2023)	(21 November 2023)
	Informasi Hukum (JDIH) Kementerian Kelautan dan Perikanan			
Terwujudnya Layanan Dukungan Manajemen yang Baik Lingkup Biro Hukum	10. Nilai Penilaian Mandiri SAKIP Biro Hukum	-	-	80.5
	11. Indeks Profesionalitas ASN di Lingkungan Biro Hukum	79	79	79
	12. Persentase Penyelesaian Temuan BPK di Lingkungan Biro Hukum	100	100	100
	13. Persentase Unit Kerja yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan yang Terstandar di Lingkungan Biro Hukum	92	92	92
	14. Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Biro Hukum	75	75	75
	15. Persentase Penyerapan Anggaran Biro Hukum	95	95	95
	16. Persentase Penyelesaian Program Penyusunan Peraturan Perundang-undangan Bidang Pengelolaan Regulasi dan Advokasi	100	100	100

2.3. Program dan Kegiatan

Biro Hukum melaksanakan program kerja yang mendukung pelaksanaan program pembangunan kelautan dan perikanan secara keseluruhan yaitu Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Kelautan dan Perikanan. Tahun Anggaran 2023, Biro Hukum melaksanakan beberapa kegiatan yaitu penyiapan produk hukum, advokasi, serta perjanjian dan dijabarkan dalam 9 (sembiliah) *output* sebagai berikut

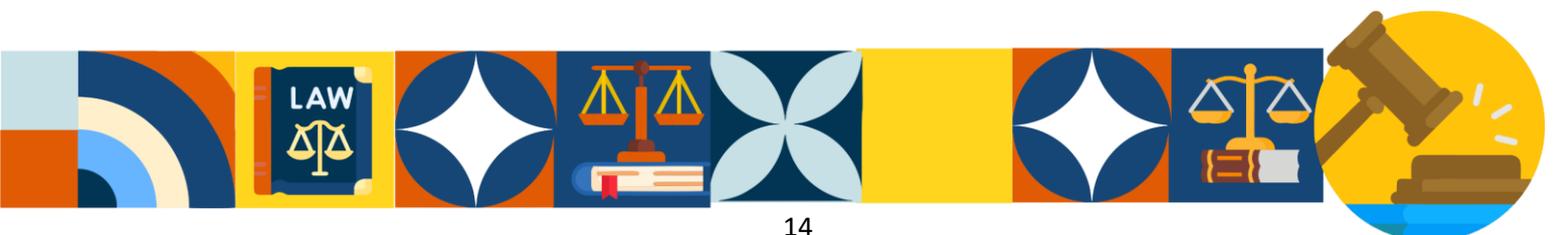
1. Layanan Penyusunan Peraturan Perundang-undangan;
2. Layanan Penyusunan Perjanjian Nasional;
3. Layanan Penyusunan Perjanjian Internasional;





4. Layanan Pelaksanaan Hukum Internasional di Bidang Kelautan dan Perikanan;
5. Layanan Dokumentasi, Informasi Hukum, dan Penerjemahan Peraturan Perundang-undangan;
6. Layanan Bantuan Hukum;
7. Layanan perkantoran;
8. Layanan Persuratan, Tata Usaha, dan Kearsipan; dan
9. Layanan Saran Internal.

Output-output tersebut untuk memenuhi sasaran strategis Tata Kelola Pemerintahan yang Baik di Lingkungan Biro Hukum.

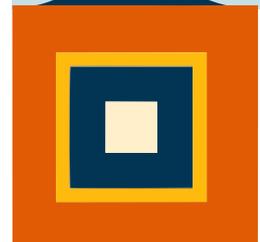
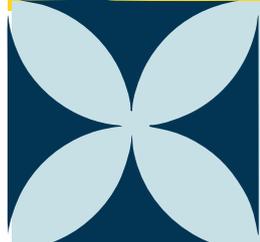




BAB 3

AKUNTABILITAS

KINERJA



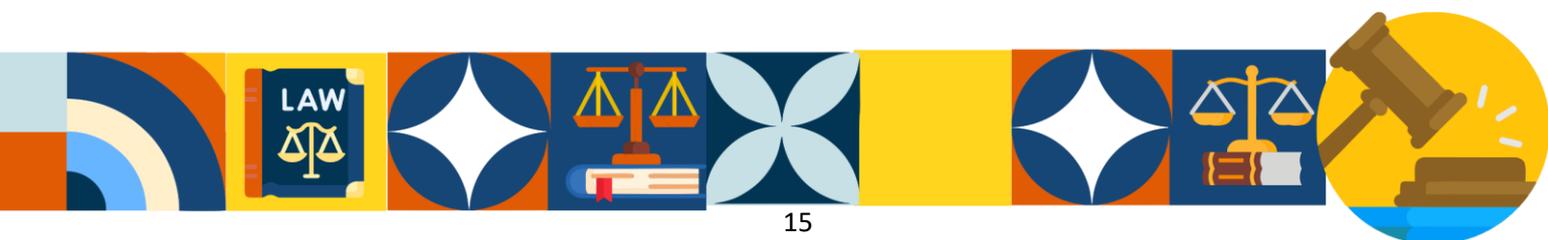


BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. Capaian Kinerja Organisasi

Pengukuran kinerja adalah suatu proses penilaian atas pelaksanaan suatu program dan kegiatan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya termasuk hasil (*output*) dan manfaat (*outcome*) yang didapatkan dari capaian kinerja tersebut. Pengukuran kinerja selain digunakan untuk melihat pencapaian target kinerja, efisiensi, dan efektivitas penggunaan anggaran serta sarana dan prasarana namun juga ditujukan untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja organisasi kepada para pemangku kepentingan (*stakeholder*). Hasil dari pengukuran kinerja ini dapat menggambarkan sejauh mana Biro Hukum dapat merealisasikan visi dan misi Sekretariat Jenderal serta tujuan yang tertuang dalam perencanaan kinerja, sedangkan dari pengukuran capaian kinerja dapat diperoleh informasi kinerja yang dapat menjadi masukan bagi perencanaan program dan kegiatan yang lebih baik lagi di masa mendatang. Sesuai dengan perjanjian kinerja tahun 2023, Biro Hukum telah melakukan usaha yang maksimal dengan melibatkan sumber daya manusia dan anggaran yang ada dalam rangka mencapai target kinerja yang telah ditetapkan sebagai bentuk pertanggungjawaban penggunaan anggaran dan untuk mengetahui tingkat ketercapaian pencapaian sasaran kegiatan dan bahan evaluasi kinerja. Dalam suatu organisasi, pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan oleh Biro Hukum.

Metode dalam mengukur evaluasi kinerja adalah *Balance Score Card* (BSC) yang mendasarkan pengukuran antara lain terhadap Pernyataan Penetapan Kinerja Tahun Anggaran 2023, Sasaran Strategis, Indikator Kinerja Utama, dan Pengukuran Kinerja. Metode ini dilakukan dengan membandingkan antara rencana dan realisasi untuk masing-masing indikator kinerja.

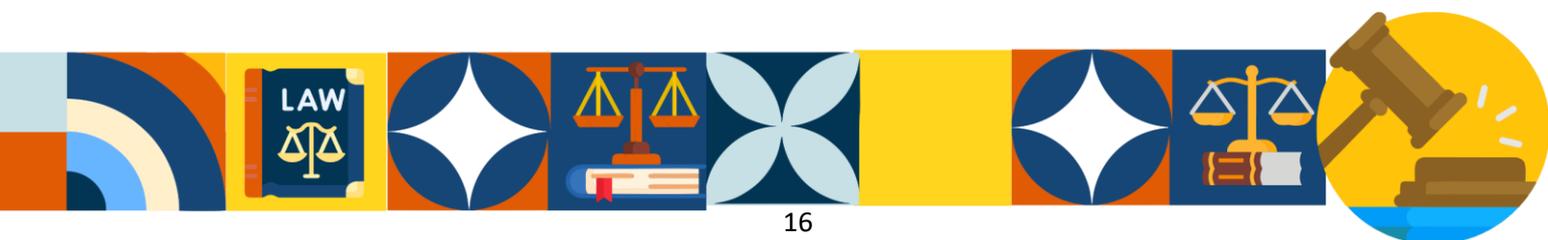




Realisasi capaian kinerja Biro Hukum dapat dilihat pada Tabel berikut

Tabel 2
Indikator Kinerja Target dan Presentase Capaian Kegiatan
Biro Hukum Tahun 2023

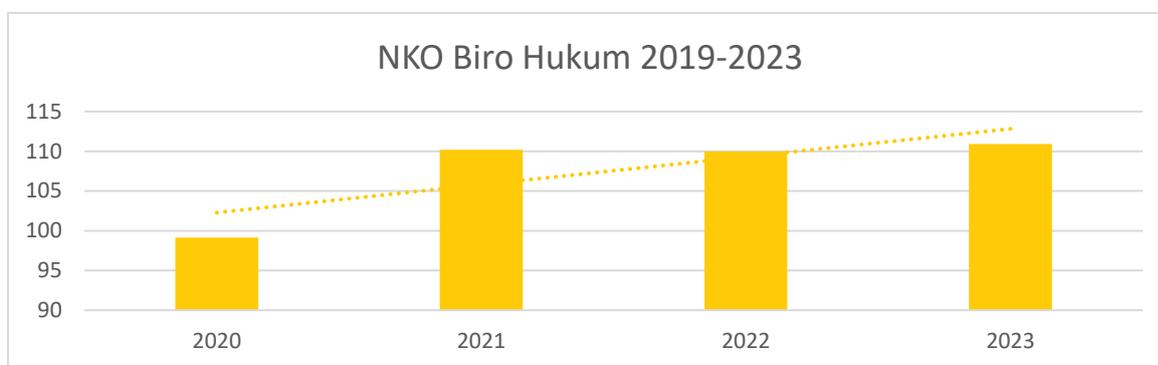
Sasaran/Indikator Kinerja	Satuan	Perhitungan	Target 2023	Capaian	%
SK.01 - Tata Kelola Pemerintahan yang Baik di Bidang Penyiapan Produk Hukum Kementerian Kelautan dan Perikanan				112,05	112,05
1. Nilai Komponen RB KKP yang Menjadi Tanggung Jawab Biro Hukum	nilai	Nilai Posisi Akhir	4,32	4,49	103,94
2. Indeks Reformasi Hukum KKP	Indeks	Nilai Posisi Akhir	79	96,44	120
3. Indeks Kualitas Kebijakan KKP	Indeks	Nilai Posisi Akhir	65	83,34	120
4. Persentase Penyelesaian Program Penyusunan Peraturan Menteri dan Keputusan Menteri di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan	persentase	Nilai Posisi Akhir	100	100	100
5. Permasalahan Hukum melalui jalur pengadilan/litigasi di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan yang Ditangani	persentase	Nilai Posisi Akhir	100	160	120
6. Permasalahan Hukum di luar jalur pengadilan/nonlitigasi di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan yang Ditangani	persentase	Nilai Posisi Akhir	100	100	100
7. Perjanjian Nasional Bidang Kelautan dan Perikanan yang Siap untuk Ditandatangani	persentase	Nilai Posisi Akhir	100	109,09	109,09
8. Instrumen Hukum Internasional Bidang Kelautan dan Perikanan yang Diberikan Pertimbangan Hukum	persentase	Nilai Posisi Akhir	100	120	120
9. Nilai Kinerja Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Kementerian Kelautan dan Perikanan	nilai	Akumulasi	91	98	107,69
SK.02 - Terwujudnya Layanan Dukungan Manajemen yang Baik Lingkup Biro Hukum				109,55	109,55
Nilai Penilaian Mandiri SAKIP Biro Hukum	nilai	Nilai Posisi Akhir	80,5	87,6	108,82
Indeks Profesionalitas ASN Biro Hukum	Indeks	Nilai Posisi Akhir	79	89,64	113,47
Persentase Penyelesaian Temuan BPK di Lingkup Biro Hukum	persentase	Nilai Posisi Akhir	100	100	100
Persentase Unit Kerja yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan yang Terstandar di Lingkungan Biro Hukum	Persentase	Nilai Posisi Akhir	92	133,33	120



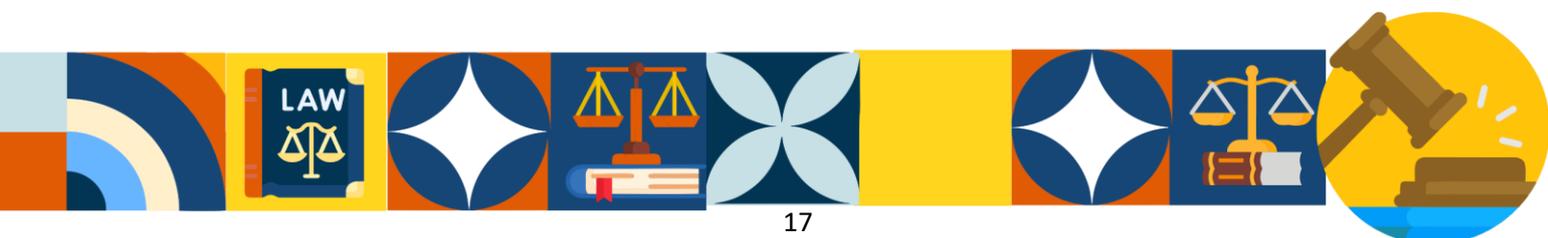


Sasaran/Indikator Kinerja	Satuan	Perhitungan	Target 2023	Capaian	%
Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Biro Hukum	Persentase	Nilai Posisi Akhir	75	100	120
Persentase Penyerapan Anggaran Biro Hukum	Persentase	Nilai Posisi Akhir	95	99,31	104,54
Persentase Penyelesaian Program Penyusunan Peraturan Perundang-undangan Bidang Pengelolaan Regulasi dan Advokasi	Persentase	Nilai Posisi Akhir	100	100	100

3.2. Analisis Capaian Kinerja



Dalam mencapai sasaran program, Biro Hukum telah mengevaluasi dan menganalisis kinerja dalam rangka menggambarkan keterkaitan pencapaian kinerja kegiatan dan kebijakan dalam rangka mewujudkan sasaran dan tujuan. Capaian kinerja Biro Hukum Tahun 2023 sebesar 110,9%, bila dibandingkan dengan capaian kinerja Biro Hukum Tahun 2022, terdapat kenaikan nilai poin sebesar 0.9%. Pada tahun 2023, dari 16 IKU terdapat 12 IKU yang capaiannya melebihi 100 persen yaitu 1) Nilai Komponen RB KKP yang Menjadi Tanggung Jawab Biro Hukum; 2) Indeks Reformasi Hukum KKP, 3) Indeks Kualitas Kebijakan KKP; 4) Permasalahan Hukum melalui jalur pengadilan/litigasi di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan yang Ditangani; 5) Perjanjian Nasional Bidang Kelautan dan Perikanan yang Siap untuk Ditandatangani; 6) Instrumen Hukum Internasional Bidang Kelautan dan Perikanan yang Diberikan Pertimbangan Hukum; 7) Nilai Kinerja Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Kementerian Kelautan dan





Perikanan; 8) Nilai Penilaian Mandiri SAKIP Biro Hukum; 9) Indeks Profesionalitas ASN Biro Hukum; 10) Persentase Unit Kerja yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan yang Terstandar di Lingkungan Biro Hukum; 11) Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Biro Hukum; dan 12) Persentase Penyerapan Anggaran Biro Hukum. Tercapainya Kinerja Biro Hukum pada didasarkan dengan analisis sasaran strategis yang telah ditetapkan yaitu

Sasaran Kinerja

1. **Tata kelola Pemerintahan yang Baik di Lingkungan Biro Hukum**
2. **Terwujudnya Layanan Dukungan Manajemen yang Baik Lingkup Biro Hukum**

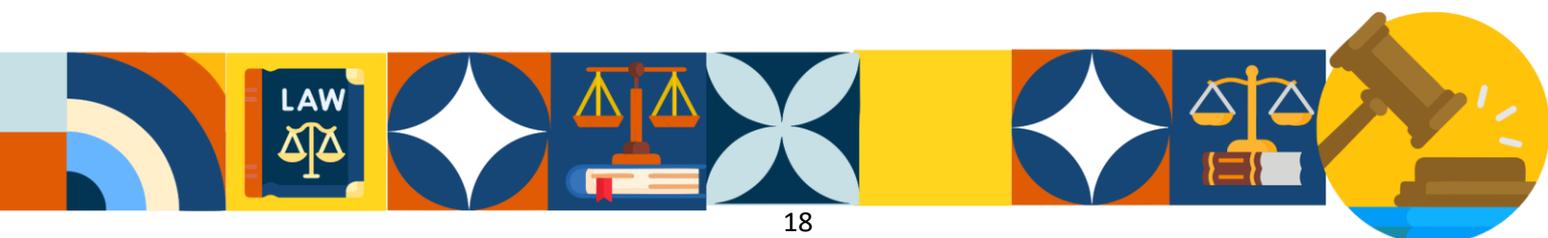
Nilai capaian sasaran strategis ini didukung oleh lima IKU dihitung secara triwulanan, dua IKU dihitung secara semesteran, dan lima IKU dihitung secara tahunan. Berikut IKU dengan prestasi kinerja sebagai uraian berikut

IKU 1 Komponen Nilai RB KKP yang menjadi tanggung jawab Biro Hukum

**Tabel 3
Indikator Kinerja Utama 1**

SK-1 Tata Kelola Pemerintahan yang Baik di Bidang Penyiapan Produk Hukum KKP													
IKU-1 Komponen Nilai RB KKP yang menjadi tanggung jawab Biro Hukum													
Realisasi					Realisasi Tahun 2023				Renstra Setjen 2020-2024				
2018	2019	2020	2021	2022	Target	Realisasi	% Capaian	% kenaikan 2022-2023	Target 2023	% Capaian thd Target 2023	Target 2024	% Capaian thd Target 2024	
5	4,09	11,78	3,91	4,58	4,32	4,58	106,02	0	0	0	10,36	43,62	

Reformasi birokrasi adalah upaya untuk melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan terutama menyangkut aspek-aspek: (i) kelembagaan atau organisasi; (ii) ketatalaksanaan atau business process; dan (iii) sumber daya manusia aparatur. Reformasi birokrasi dilaksanakan dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance). Nilai Reformasi Birokrasi KKP diperoleh berdasarkan hasil evaluasi Kementerian PAN dan RB terhadap pelaksanaan Reformasi Birokrasi di KKP.



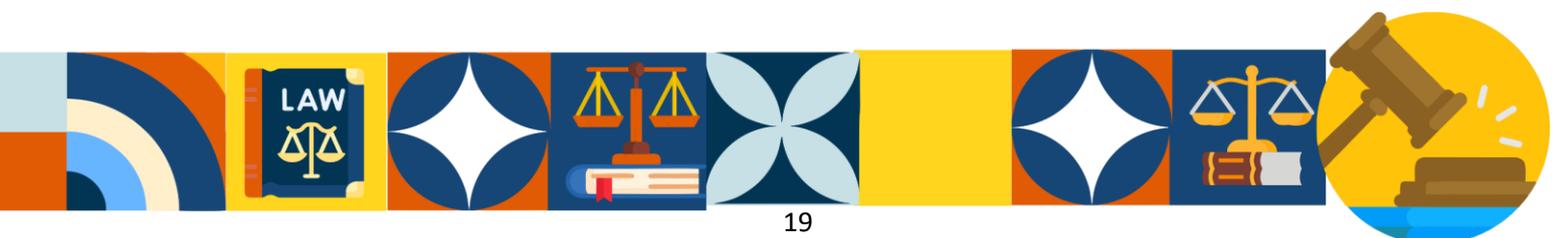


Penilaian menggunakan instrumen Lembar Kerja Evaluasi (LKE) yang disusun berdasarkan Permen PAN dan RB Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi. Penilaian mengukur 3 aspek, yaitu (1) Aspek Pemenuhan (2) Aspek Hasil Antara (3) Aspek Reform. Komponen nilai RB yang menjadi tanggung jawab Biro Hukum adalah: (1) Aspek Pemenuhan: Nilai Deregulasi Kebijakan dan (2) Aspek Reform: Deregulasi Kebijakan dan harapan masyarakat. KKP telah menetapkan Keputusan Menteri KP Nomor 32 Tahun 2021 tentang Road Map Reformasi Birokrasi KKP 2020-2024, telah disusun kegiatan prioritas pada level mikro RB terdapat kegiatan prioritas pada area Deregulasi Kebijakan yang terdiri dari

- a. Melakukan indentifikasi dan pemetaan regulasi lingkup instansi pemerintah (menghilangkan overlapping peraturan);
- b. deregulasi aturan yang menghambat birokrasi penguatan Sistem Regulasi Nasional di lingkup Instansi Pemerintah;
- c. melakukan perencanaan kebijakan yang meliputi agenda setting dan formulasi kebijakan;
- d. melakukan evaluasi kemanfaatan kebijakan yang telah disusun.

Pada tahun 2023, telah ditetapkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 166 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 32 Tahun 2021 tentang Road Map Reformasi Birokrasi KKP 2020-2024. Perubahan Kepmen bertujuan untuk melakukan penyempurnaan dalam penyusunan road map RB dan evaluasi RB, serta konsep RB Tematik, merupakan upaya dan sarana untuk mengurai dan menjawab atau mengatasi akar permasalahan tata kelola pemerintahan (debottlenecking) yang akan dirasakan secara langsung oleh masyarakat. Berdasarkan Kepmen tersebut, terdapat 2 (dua) indikator capaian implementasi Kebijakan RB yang menjadi tanggung jawab Biro Hukum yang terdiri dari

- a. Indeks Reformasi Hukum yang bertujuan untuk penguatan pembentukan peraturan perundang-undangan yang tertib dan pengelolaan database peraturan perundang-undangan yang lengkap, akurat, mudah, dan cepat





- b. Indeks Kualitas Kebijakan yang bertujuan untuk penyusunan kebijakan berbasis publik dan prinsip-prinsip tata kelola yang baik dalam proses pembuatan kebijakan publik, khususnya dalam membangun kebijakan berbasis bukti (*evidence-based policy*)

Dalam pelaksanaan, terdapat beberapa upaya telah dilakukan untuk mendukung keberhasilan indikator capaian implementasi Kebijakan RB yaitu

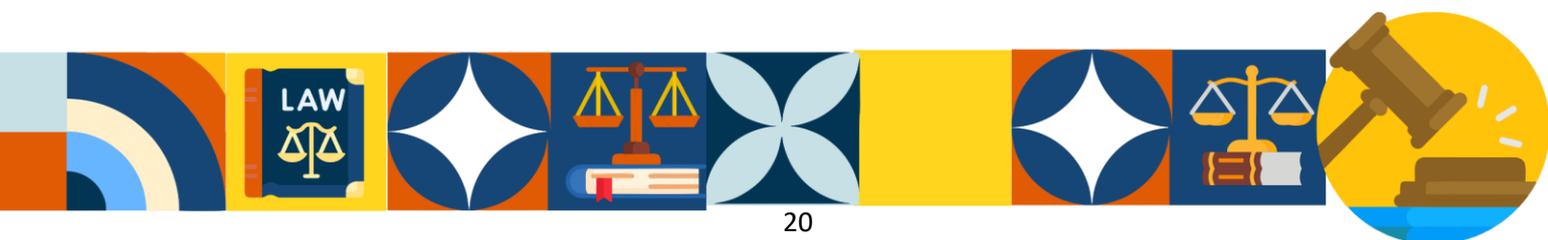
1. meningkatkan koordinasi melalui rapat tim internal IRH dan tim internal IKK;
2. mengoptimalkan peran dan kapasitas para pejabat fungsional Perancang, Analis Hukum, dan Analis Kebijakan dalam melakukan inventarisasi data dukung;
3. mengadakan pertemuan dengan para tim penilai Lembaga Administrasi Negara dan Kementerian Hukum dan HAM; dan
4. melakukan reviu terkait data dukung yang dibutuhkan.

Berdasarkan memorandum Kepala Biro SDM Aparatur dan Organisasi, Nomor 1778/SJ.3/OT.710/X/2023, tanggal 31 Oktober 2023, hal Penyampaian Capaian Nilai Komponen RB KKP Capaian Triwulan IV Lingkup Sekretariat Jenderal, hasil evaluasi yang telah dilaksanakan, nilai hasil evaluasi dengan indeks reformasi birokrasi Kementerian Kelautan dan Perikanan tahun 2022 adalah 78,43 dengan kategori "BB". Adapun capaian hasil evaluasi reformasi birokrasi tahun 2023 Biro Hukum yaitu 4.58.

No.	Nama Unit Organisasi	Target	Capaian TW IV 2023
1.	Biro Perencanaan	13.32%	14.31%
2.	Biro Keuangan *	3.45%	3.66%
3.	Biro SDMAO	19.18%	20.33%
4.	Biro Hukum	4.32%	4.58%
5.	Biro Humas dan KLN	3.70%	3.92%
6.	Biro Umum dan PBJ*	1.23%	1.31%
7.	Pusdatin	13.88%	14.71%

* Non PJ Area RB

Dalam menunjang capaian implementasi Kebijakan RB, Biro Hukum didukung oleh seluruh perancang, analis hukum dan analis kebijakan di Lingkungan KKP dan diperlukan biaya untuk dapat melaksanakan kegiatan demi mencapai *output* sesuai dengan tugas dan fungsi dari Biro Hukum. Biaya-biaya tersebut dituangkan pada





Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA K/L) yang disusun 1 (satu) tahun sebelum pelaksanaan kerja dan anggaran dilaksanakan. Sehubungan dengan hal tersebut pada tahun 2023, target anggaran Komponen Nilai RB KKP yang menjadi tanggung jawab Biro Hukum sebesar Rp138.763.000 dan telah terealisasi sebesar Rp134.504.130.

Adapun yang menyebabkan anggaran tidak terealisasi dengan baik adalah masing-masing indikator penilaian merupakan IKU pada Biro Hukum yang memiliki mata anggaran.

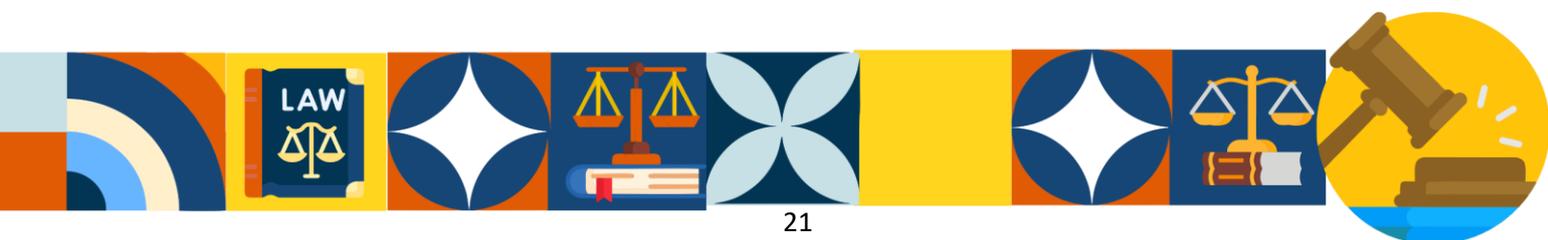
IKU 2 Indeks Reformasi Hukum KKP

**Tabel 4
Indikator Kinerja Utama 2**

SK-1 Tata Kelola Pemerintahan yang Baik di Bidang Penyiapan Produk Hukum KKP												
IKU-2 Indeks Reformasi Hukum KKP												
Realisasi					Realisasi Tahun 2023				Renstra Setjen 2020-2024			
2018	2019	2020	2021	2022	Target	Realisasi	% Capaian	% kenaikan 2022-2023	Target 2023	% Capaian thd Target 2023	Target 2024	% Capaian thd Target 2024
				77,66	79	96,44	120	18,78	-	-	-	-

Menindaklanjuti Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 17 Tahun 2022 tentang Penilaian Indeks Reformasi Hukum (IRH) pada Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah, Indeks Reformasi Hukum merupakan salah satu proses monitoring dan evaluasi dari regulasi yang telah berjalan, dengan harapan bahwa setiap regulasi yang dilaksanakan dapat tepat guna dan tepat sasaran dan tidak berbenturan dengan regulasi yang ada di tingkat atas. Penilaian Indeks Reformasi Hukum terbagi atas 4 (empat) variabel, yaitu

1. **Variabel I, Tingkat Koordinasi Kementerian Hukum dan HAM untuk Melakukan Harmonisasi Regulasi/Memperkuat Koordinasi untuk Melakukan Harmonisasi Regulasi (Bobot 25)**
 - a. Pengajuan permohonan pengharmonisasian sesuai dengan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 20 Tahun 2015 sebagaimana Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 40 Tahun

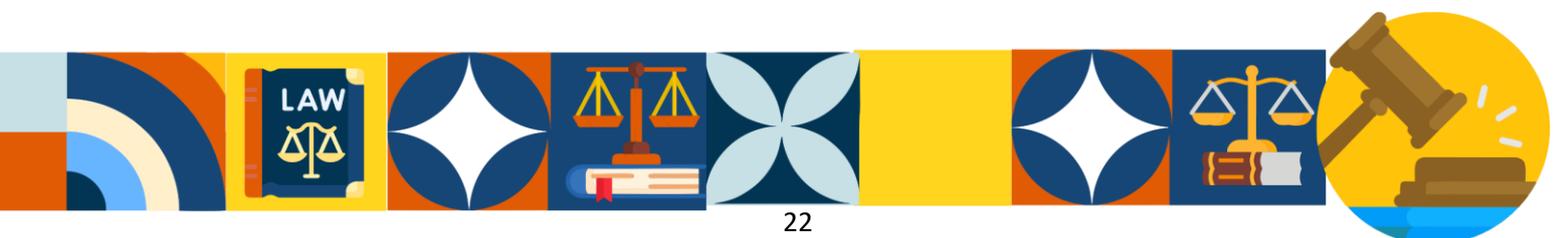




2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 20 Tahun 2015 tentang Tata Cara dan Prosedur Pengharmonisasian, Pembulatan, dan Pemanjapan Konsepsi RPUU untuk RUU, RPP dan Raperpres;

- b. Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pengharmonisasian Rancangan Peraturan Menteri, Rancangan Peraturan Lembaga, Pemerintah Nonkementerian atau Rancangan Peraturan dari Lembaga Nonstruktural oleh Perancang Peraturan Perundang-undangan untuk Rancangan Permen/lembaga. Kelengkapan persyaratan harus disampaikan dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak tanggal pemberitahuan diterima oleh Kementerian pemohon. Tingkat kesesuaian RPUU yang diajukan harmonisasi dengan daftar perencanaannya seperti: Prolegnas, Progsun PP/Perpres, Progsun Peraturan Menteri/Kepala Lembaga);
 - 1) Tingkat kesesuaian kelengkapan persyaratan permohonan harmonisasi RPUU yang diajukan dengan daftar perencanaan atau kebutuhan hukum tertentu berdasarkan izin Prakarsa dengan (bobot 6).
 - 2) Tingkat kesesuaian kelengkapan persyaratan permohonan harmonisasi Rpermen/RPerLPNK/RPerLNS yang diajukan dengan daftar perencanaan atau kebutuhan hukum tertentu berdasarkan izin Prakarsa dengan (bobot 4).
- c. Tingkat kehadiran pimpinan tinggi dalam rapat pleno pengharmonisasian yang memiliki kewenangan dalam pengambilan keputusan dengan melibatkan Ditjen PP/instansi pemrakarsa/K/L terkait. (bobot 15).

2. Variabel II, Kompetensi Aparatur Sipil sebagai Perancang Peraturan Perundang-Undangan (*legal drafter*) Pusat yang Berkualitas dengan (Bobot 25)





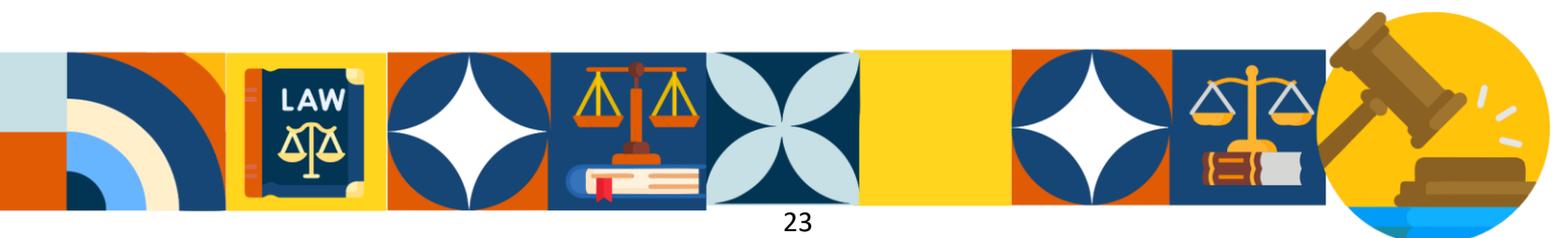
- a. Kebijakan pembinaan dan pengembangan kompetensi ASN perancang peraturan perundang-undangan dengan (bobot 19);
 - 1) K/L mengalokasikan anggaran untuk program pelatihan peningkatan kompetensi Perancang dengan (bobot 12); dan
 - 2) K/L menugaskan Pejabat Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Pertama yang memenuhi syarat untuk mengikuti pelatihan Perancang Peraturan Perundang-undangan yang memenuhi syarat dengan (bobot 7);
- b. Tingkat pengembangan kompetensi, keikutsertaan pejabat perancang peraturan perundang-undangan melalui bimbingan teknis, pelatihan, workshop baik secara klasikal maupun nonklasikal dengan (bobot 6).

3. Variabel III, Kualitas Re-Regulasi atau Deregulasi Berbagai Peraturan Perundang-Undangan Berdasarkan Hasil Reviu dengan (Bobot 35)

- a. Kebijakan tentang pemantauan dan peninjauan Undang-Undang dan/atau analisis dan evaluasi peraturan perundang-undangan dengan (bobot 8);
- b. Proporsi tahunan jumlah Peraturan Perundang-undangan yang dievaluasi dengan (bobot 12);
- c. Tindak lanjut rekomendasi hasil kegiatan pemantauan dan peninjauan Undang-Undang dan/atau analisis dan evaluasi peraturan perundang-undangan dengan (bobot 15); dan
- d. Tingkat keterlibatan pejabat fungsional analis hukum dalam melakukan pemantauan dan peninjauan Undang-Undang dan/atau analisis dan evaluasi peraturan perundang-undangan. Pada indikator ini tidak ada bobot dan tidak mempengaruhi penilaian.

4. Variabel IV, penataan database peraturan perundang-undangan (Bobot 15)

Pengelolaan JDIH terintegrasi sesuai dengan Standar Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum.

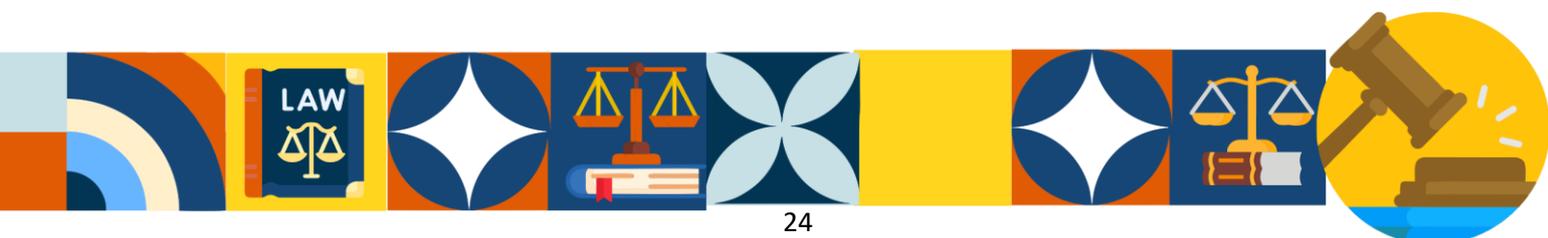




IKU Indeks Reformasi Hukum merupakan IKU Baru pada tahun 2023, berdasarkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 166 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 32 Tahun 2021 tentang Road Map Reformasi Birokrasi KKP 2020-2024. Biro Hukum menjadi penanggung jawab Indeks Reformasi Hukum. Sehingga IKU tersebut belum masuk pada Renstra 2020-2024 dan Renja 2023, namun telah diusulkan pada perubahan Restra 2024 dan Renja 2024.

Berdasarkan surat dinas a.n Menteri Hukum dan HAM, Kepala Badan Strategi Kebijakan Hukum dan HAM, Nomor PPH-LT.01.02-43, tanggal 27 November 2023, hal Hasil Penilaian atas IRH Tahun 2023, Kementerian Kelautan dan Perikanan berhasil mencapai nilai indeks reformasi hukum sebesar **96,44** dengan kategori AA (Istimewa) (nilai antara kementerian belum diterbitkan oleh Kementerian Hukum dan HAM). Capaian nilai tersebut diatas target yang telah ditetapkan yaitu nilai 79 dengan kategori baik. Adapun rincian hasil penilaian adalah sebagai berikut

No	Variabel dan Indikator	Bobot	Nilai
1	Tingkat koordinasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk melakukan harmonisasi regulasi/memperkuat koordinasi untuk melakukan harmonisasi regulasi	25	16,6
	1.a. Pengajuan permohonan pengharmonisasian sesuai dengan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 20 Tahun 2015 sebagaimana Perubahan Menteri Hukum dan HAM Nomor 40 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 20 Tahun 2015 tentang Tata Cara dan Prosedur Pengharmonisasian, Pembulatan, dan Pemantapan Konsepsi RPUU untuk RUU, RPP dan Raperpres; dan	10	1,6
	1. b. Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pengharmonisasian Rancangan Peraturan Menteri, Rancangan Peraturan Lembaga, Pemerintah Nonkementerian atau Rancangan Peraturan dari Lembaga Nonstruktural oleh Perancang Peraturan Perundang- undangan untuk Rancangan Permen/lembaga. Kelengkapan persyaratan harus disampaikan dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak tanggal pemberitahuan diterima oleh kementerian pemohon. (Tingkat kesesuaian RPUU yang diajukan harmonisasi dengan daftar perencanaannya seperti: Prolegnas, Progsun PP/Perpres, Progsun Peraturan Menteri/Kepala Lembaga)		
a.	Tingkat kesesuaian kelengkapan persyaratan permohonan harmonisasi RPUU yang diajukan dengan daftar perencanaan atau kebutuhan hukum tertentu berdasarkan izin prakarsa	6	0,6
b.	Tingkat kesesuaian kelengkapan persyaratan permohonan harmonisasi Rpermen/RPerLPNK/RPerLNS yang diajukan dengan daftar perencanaan atau kebutuhan hukum tertentu berdasarkan izin prakarsa	4	1
2	Tingkat kehadiran pimpinan tinggi dalam rapat plenopengharmonisasian Peraturan Perundang-undangan yang memiliki kewenangan dalam pengambilan keputusan (melibatkan Ditjen PP/nstansi pemrakarsa/K/L terkait)	15	
II.	Kompetensi ASN sebagai perancang peraturan perundang- undangan (legal drafter) pusat yang berkualitas	25	25

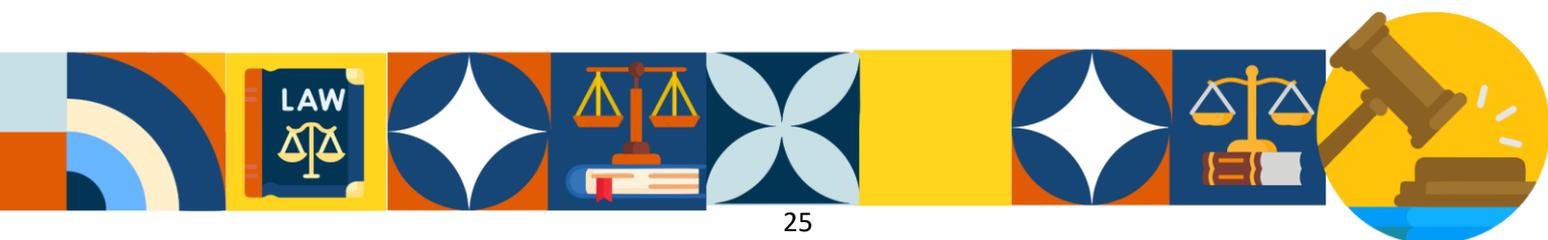




No	Variabel dan Indikator	Bobot	Nilai
1.	Kebijakan pembinaan dan pengembangan kompetensi ASN perancang peraturan perundang-undangan	19	19
a.	K/L mengalokasikan anggaran untuk program pelatihan peningkatan kompetensi Perancang	12	12
b.	K/L mengagaskan Pejabat Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Pertama yang memenuhi syarat untuk mengikuti pelatihan Perancang Peraturan Perundang-undangan yang memenuhi syarat	7	7
2.	Tingkat pengembangan kompetensi, keikutsertaan pejabat perancang peraturan perundang-undangan melalui bimbingan teknis, pelatihan, workshop baik secara klasikal maupun nonklasikal	6	
III.	Kualitas re-regulasi atau deregulasi berbagai peraturan perundang-undangan berdasarkan hasil reviu	35	25,6
1.	Kebijakan tentang pemantauan dan peninjauan Undang-Undang dan/atau analisis dan evaluasi Peraturan Perundang-Undang	8	
2.	Proporsi tahunan jumlah Peraturan Perundang-undangan yang dievaluasi	12	
3.	Tindak lanjut rekomendasi hasil kegiatan pemantauan dan peninjauan Undang-Undang dan/atau analisis dan evaluasi Peraturan Perundang-Undang	15	
4.	Tingkat keterlibatan pejabat fungsional analis hukum dalam melakukan pemantauan dan peninjauan Undang-Undang dan/atau analisis dan evaluasi Peraturan Perundang-undangan	-	
IV.	Penataan Database Peraturan Perundang-undangan	15	15
1.	Pengelolaan JDIH terintegrasi sesuai dengan Standar Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum	15	

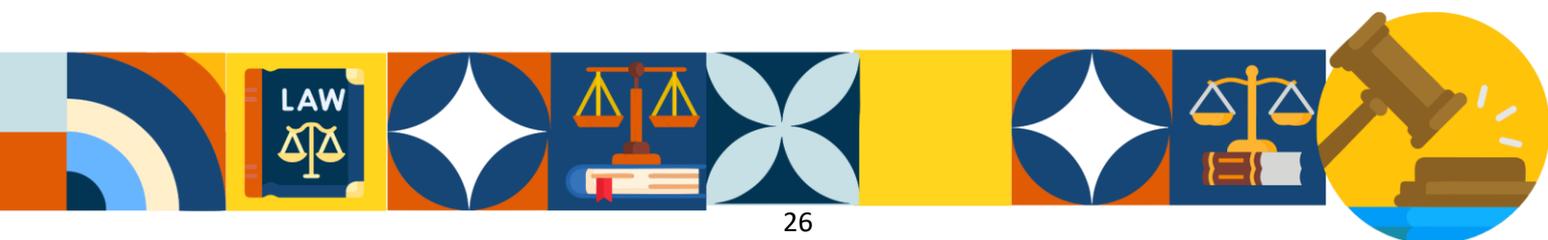
Penilaian seluruh data dukung indeks reformasi hukum tahun 2022 telah maksimal dilakukan, dengan beberapa hal-hal yang perlu diperbaiki;

No	Variabel dan Indikator	Saran Perbaikan
1	Tingkat koordinasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk melakukan harmonisasi regulasi/memperkuat koordinasi untuk melakukan harmonisasi regulasi	
	1.a. Pengajuan permohonan pengharmonisasian sesuai dengan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 20 Tahun 2015 sebagaimana Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 40 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 20 Tahun 2015 tentang Tata Cara dan Prosedur Pengharmonisasian, Pembulatan, dan Pemantapan Konsepsi RPUU untuk RUU, RPP dan Raperpres; dan	
	1. b. Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pengharmonisasian Rancangan Peraturan Menteri, Rancangan Peraturan Lembaga, Pemerintah Nonkementerian atau Rancangan Peraturan dari Lembaga Nonstruktural oleh Perancang Peraturan Perundang-undangan untuk Rancangan Permen/lembaga. Kelengkapan persyaratan harus disampaikan dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak tanggal pemberitahuan diterima oleh kementerian pemohon. (Tingkat kesesuaian RPUU yang diajukan harmonisasi dengan daftar perencanaannya seperti: Prolegnas, Progsun PP/Perpres, Progsun Peraturan Menteri/Kepala Lembaga)	
a.	Tingkat kesesuaian kelengkapan persyaratan permohonan harmonisasi RPUU yang diajukan dengan daftar perencanaan atau kebutuhan hukum tertentu berdasarkan izin prakarsa	Data dukung tidak dapat dibuka sehingga tim penilai tidak dapat memeriksa kebenaran dan kelengkapan data dukung
b.	Tingkat kesesuaian kelengkapan persyaratan permohonan harmonisasi Rpermen/RPerLPNK/RPerLNS yang diajukan dengan daftar perencanaan atau	Data dukung tidak dapat dibuka sehingga tim penilai tidak dapat memeriksa kebenaran dan





No	Variabel dan Indikator	Saran Perbaikan
	kebutuhan hukum tertentu berdasarkan izin prakarsa	kelengkapan data dukung
2	Tingkat kehadiran pimpinan tinggi dalam rapat pleno pengharmonisasian Peraturan Perundang-undangan yang memiliki kewenangan dalam pengambilan keputusan (melibatkan Ditjen PP/nstansi pemrakarsa/K/L terkait)	
II.	Kompetensi ASN sebagai perancang peraturan perundang-undangan (legal drafter) pusat yang berkualitas	
1.	Kebijakan pembinaan dan pengembangan kompetensi ASN perancang peraturan perundang-undangan	
a.	K/L mengalokasikan anggaran untuk program pelatihan peningkatan kompetensi Perancang	
b.	K/L menugaskan Pejabat Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Pertama yang memenuhi syarat untuk mengikuti pelatihan Perancang Peraturan Perundang-undangan yang memenuhi syarat	
2.	Tingkat pengembangan kompetensi, keikutsertaan pejabat perancang peraturan perundang-undangan melalui bimbingan teknis, pelatihan, workshop baik secara klasikal maupun nonklasikal	
III.	Kualitas re-regulasi atau deregulasi berbagai peraturan perundang-undangan berdasarkan hasil reuiu	
1.	Kebijakan tentang pemantauan dan peninjauan Undang-Undang dan/atau analisis dan evaluasi Peraturan Perundang-Undang	SK yang dilampirkan ada 3 dari ketiga SK tersebut pelaksanaannya dari bulan Juli 2022 sd Desember 2022
2.	Proporsi tahunan jumlah Peraturan Perundang-undangan yang dievaluasi	Untuk indikator Daftar jumlah Peraturan Perundang-undangan yang dievaluasi pada tahun penilaian; KKP hanya melampirkan matriks Daftar Jumlah Peraturan Perundang-undangan yang di evaluasi pada Tahun 2022 minim hasil analisis dan evaluasi sementara yang diminta adalah matrik laporan analisis dan evaluasi
3.	Tindak lanjut rekomendasi hasil kegiatan pemantauan dan peninjauan Undang-Undang dan/atau analisis dan evaluasi Peraturan Perundang-Undang	Untuk Dokumen kebijakan yang berisi tindak lanjut hasil analisis dan evaluasi (tindak lanjut non-regulasi), KKP tidak menyertakan Dokumen kebijakan yang berisi tindak lanjut hasil analisis dan evaluasi (tindak lanjut non-regulasi); dan atau Syarat berbentuk surat undangan rapat/notulensi rapat
4.	Tingkat keterlibatan pejabat fungsional analis hukum dalam melakukan pemantauan dan peninjauan Undang-Undang dan/atau analisis dan evaluasi Peraturan Perundang-undangan	data dukung yang diminta sudah sesuai
IV.	Penataan Database Peraturan Perundang-undangan	
1.	Pengelolaan JDIH terintegrasi sesuai dengan Standar Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum	Konsisten dalam Pengelolaan JDIH sesuai Standar Permenkumham No. 8 Tahun 2019 Nilai JDIH = 98 (Berdasarkan Kepmenkumham Nomor M.HH-01.HN.03.05 Tahun tentang Penetapan Hasil Penilaian Kinerja Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Tahun 2022)





Terdapat beberapa masukan sarab perbaikan untuk 2024, yaitu

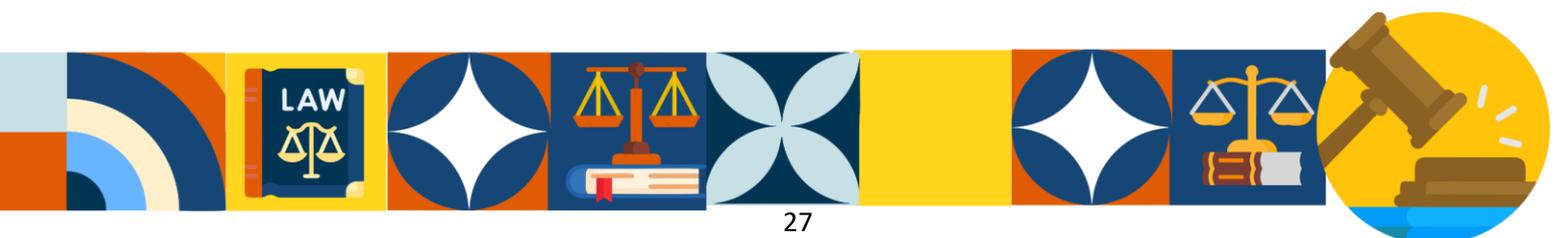
- a. Pada variabel I tim internal untuk mengecek kembali data dukung yang dimasukkan pada aplikasi karena pada tahun 2023 terdapat data dukung tidak dapat dibuka sehingga tim penilai tidak dapat memeriksa kebenaran dan kelengkapan data dukung;
- b. Pada variable III SK Tim Analisis dan Evaluasi perlu diperbaharui dan Dokumen kebijakan yang berisi tindak lanjut hasil analisis dan evaluasi (tindak lanjut non- regulasi), KKP belum menyertakan Dokumen kebijakan yang berisi tindak lanjut hasil analisis dan evaluasi (tindak lanjut non-regulasi); dan atau Syarat berbentuk surat undangan rapat/notulensi rapat;
- c. Pada variabel IV, perlu konsistensi dalam Pengelolaan JDIH sesuai Standar Permenkumham No. 8 Tahun 2019 Nilai JDIH = 98 (Berdasarkan Kepmenkumham Nomor M.HH-01.HN.03.05 Tahun tentang Penetapan Hasil Penilaian Kinerja Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Tahun 2022).

IKU Indeks Reformasi Hukum merupakan IKU Baru pada tahun 2023, berdasarkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 166 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 32 Tahun 2021 tentan Road Map Reformasi Birokrasi KKP 2020-2024 Biro Hukum menjadi penanggung jawab Indeks Reformasi Hukum. Sehingga IKU tersebut belum masuk pada Renstra 2020-2024 dan Renja 2023, namun telah diusulkan pada perubahan Restra 2024 dan Renja 2024.

A. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja

Dalam pelaksanaan, terdapat beberapa upaya telah dilakukan untuk mendukung keberhasilan indikator capaian implementasi Kebijakan RB yaitu

1. meningkatkan koordinasi melalui rapat tim internal IRH;
2. mengoptimalkan peran dan kapasitas para pejabat fungsional Perancang, Analis Hukum, dan Analis Kebijakan dalam melakukan inventarisasi data dukung;





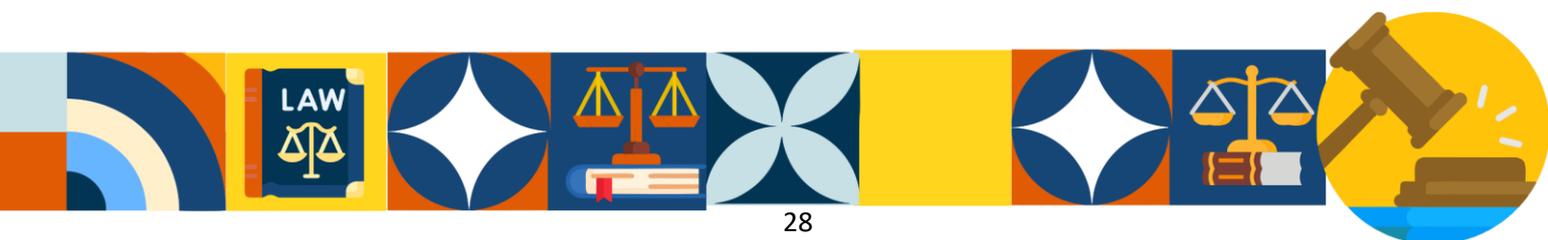
3. mengadakan pertemuan dengan para tim penilai Kementerian Hukum dan HAM; dan
4. melakukan reviu terkait data dukung yang dibutuhkan.

B. Penggunaan Anggaran yang Mendukung Indikator Kinerja

Menyoroti penerapan anggaran berbasis kinerja dikaitkan dengan isu yang berkembang saat ini sesuai fokus pemerintah yaitu melakukan penghematan dan efisiensi anggaran. Hal tersebut sejalan dengan tujuan reformasi di bidang anggaran yakni meningkatkan efisiensi dalam anggaran dari tujuan penerapan Anggaran Berbasis Kinerja (PBK). PBK adalah sistem anggaran yang mengaitkan antara pengalokasian dana dengan kinerja yang diharapkan. Kinerja adalah keluaran atau *output* dari suatu kegiatan baik berupa barang atau jasa yang dapat diukur kuantitas maupun kualitasnya. Kinerja juga diartikan sebagai sejauh mana "manfaat/hasil (*outcome*)" dari barang atau jasa tersebut bagi pengguna layanan. Realisasi anggaran Indeks Reformasi Hukum sebesar Rp207.455.826 dari target sebesar Rp207.455.826 dengan presentase capaian sebesar 100%.

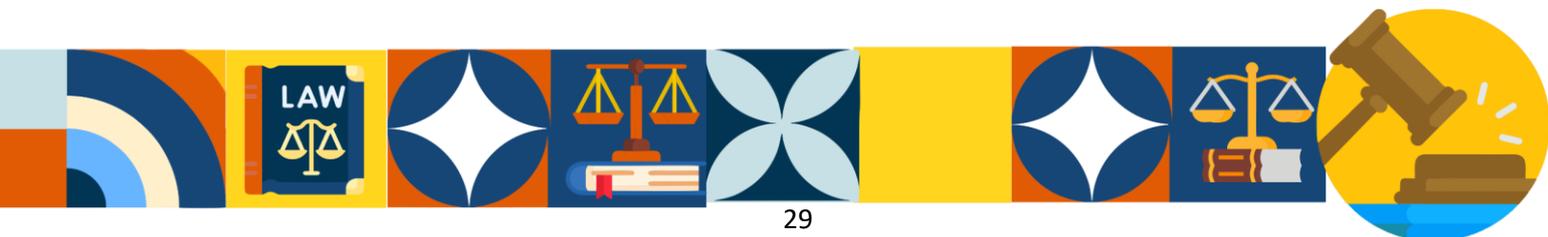
Kegiatan yang menunjang keberhasilan Indeks Reformasi Hukum Tahun 2023

NO.	HARI, TANGGAL	NOMOR DAN TANGGAL UNDANGAN	PELAKSANAAN KEGIATAN	PIMPINAN RAPAT	PESERTA	BUKTI FOTO
1.	Selasa, 27 Desember 2022	Undangan Kepala Biro Hukum, Nomor B Nomor B.778/SJ.4/TU.330/XII/2022 dan Nomor B.779/SJ.4/TU.330/XII/2022, tanggal 21 Desember 2022, hal Undangan	Ruang Rapat Biro Hukum Lantai 3B, Gedung Mina Bahari IV dan melalui konferensi video	Perancang PUU Ahli Madya selaku Koordinator PUU II	Perwakilan Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut, Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap, Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya, Direktorat Jenderal PDSPKP, Direktorat Jenderal PSDKP, Inspektorat Jenderal, BRSDM KP, BKIPM, dan Sekretariat Jenderal (Biro SDMAO dan Biro Hukum	





NO.	HARI, TANGGAL	NOMOR DAN TANGGAL UNDANGAN	PELAKSANAAN KEGIATAN	PIMPINAN RAPAT	PESERTA	BUKTI FOTO
2.	Rabu, tanggal 15 Februari 2023	Undangan Kepala Biro Hukum, Nomor B.67/SJ.4/TU.330/II/2023, tanggal 1 Februari 2023, hal Undangan	Hotel Ibis Styles Jakarta Gajah Mada	Kepala Biro Hukum	Perwakilan dari Kementerian Hukum dan HAM (Pusat Analisis dan Evaluasi Hukum Nasional, Pusat Perencanaan Hukum Nasional, dan Pusat Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional), serta seluruh Tim IRH KKP Tahun 2023	
3.	Senin, tanggal 3 Juli 2023	undangan Kepala Biro Hukum atas nama Sekretaris Jenderal Nomor B.378/SJ.4/TU.330/VI/2023, tanggal 23 Juni 2023, hal Undangan Rapat	Hotel Aloft Wahid Hasyim	Ketua Tim Kerja PUU I	Perwakilan dari Kementerian Hukum dan HAM (Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Hukum, Badan Strategi Kebijakan Hukum dan HAM), serta seluruh Tim IRH KKP Tahun 2023	
4.	12 Juli 2023	Kepala Biro Hukum atas nama Sekretaris Jenderal Nomor B.417/SJ.4/TU.330/VII/2023, tanggal 10 Juli 2023, hal Undangan Rapat	Hotel Ibis Style Tanah Abang Jakarta	Ketua Tim Kerja PUU I	seluruh anggota tim dan narasumber Bapak Oki Wahyu dari Koordinator Wilayah II Penilaian Indeks Reformasi Hukum Kementerian Hukum dan HAM	
5.	24 Juli 2023	Kepala Biro Hukum atas nama Sekretaris Jenderal Nomor B.432/SJ.4/TU.330/VII/2023, tanggal 20 Juli 2023, hal Undangan Rapat	Hotel Grand Mercure Harmoni Jakarta	Kepala Biro Hukum	seluruh anggota tim dan narasumber Bapak Yunan Hilmy dari Kepala Pusat Analisis dan Evaluasi BPHN Kementerian Hukum dan HAM	
6.	9 Agustus 2023	Kepala Biro Hukum atas nama Sekretaris Jenderal	Hotel Oria Jakarta	Perancang Perundang-	seluruh anggota tim dan narasumber	





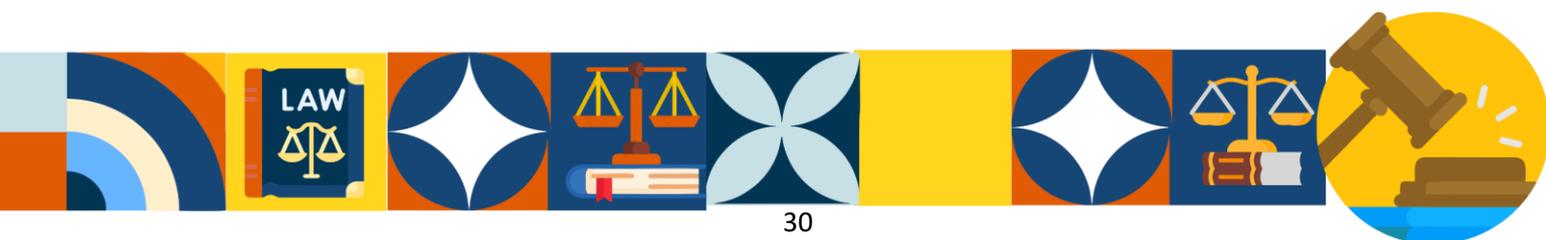
NO.	HARI, TANGGAL	NOMOR DAN TANGGAL UNDANGAN	PELAKSANAAN KEGIATAN	PIMPINAN RAPAT	PESERTA	BUKTI FOTO
		Nomor B.471/SJ.4/TU.330/VIII/2023, tanggal 4 Agustus 2023, hal Undangan Rapat		undangan Ahli Muda	Bapak Oki Wahyu dari Koordinator Wilayah II Penilaian Indeks Reformasi Hukum Kementerian Hukum dan HAM	
7.	14-16 Agustus 2023	Kepala Biro Hukum atas nama Sekretaris Jenderal Nomor B.484/SJ.4/TU.330/VIII/2023, tanggal 10 Agustus 2023, hal Undangan Rapat	Bigland Hotel International dan Convention Hall Bogor	Kepala Biro Hukum	seluruh anggota tim dan narasumber Badan Strategi Kebijakan Hukum dan HAM Kementerian Hukum dan HAM, Ditjen Peraturan Perundang-undangan, JDIHN, dan Pusanev BPHN Kementerian Hukum dan HAM	

IKU 3 Indeks Kualitas Kebijakan KKP

**Tabel 5
Indikator Kinerja Utama 3**

SK-1 Tata Kelola Pemerintahan yang Baik di Bidang Penyiapan Produk Hukum KKP												
IKU-2 Indeks Reformasi Hukum KKP												
Realisasi					Realisasi Tahun 2023				Renstra Setjen 2020-2024			
2018	2019	2020	2021	2022	Target	Realisasi	% Capaian	% kenaikan 2022-2023	Target 2023	% Capaian thd Target 2023	Target 2024	% Capaian thd Target 2024
-	-	-	33,54	-	65	83,34	120	49,8	-	-	-	-

Berdasarkan Surat Edaran Nomor 22/K.1.HKM.02.2/2021 tentang Pedoman Pengukuran Kualitas Kebijakan, Indeks Kualitas Kebijakan adalah instrumen untuk menilai kualitas kebijakan pemerintah dilihat dari proses pembuatan kebijakan dan bagaimana melakukan pengelolaan agenda, formulasi, implementasi dan proses evaluasi. Tujuan Indeks Kualitas Kebijakan adalah untuk mendorong penguatan partisipasi publik dan prinsip-prinsip tata kelola yang baik dalam proses pembuatan kebijakan publik, khususnya dalam membangun kebijakan berbasis bukti (*evidence-based*)





policy). Adapun Manfaat Pengukuran Indeks Kualitas Kebijakan yaitu

1. Instrumentasi menilai kualitas kebijakan secara mudah dan cepat;
2. Mengungkapkan profil kualitas kebijakan publik nasional;
3. Media apresiasi dan advokasi kepada instansi Pemerintah sebagai pembelajaran baik dalam tata kelola kebijakan;
4. Peningkatan kualitas pembinaan Analisis Kebijakan; dan
5. Tersedianya sarana sharing pembelajaran (best practice) antar instansi Pemerintah.

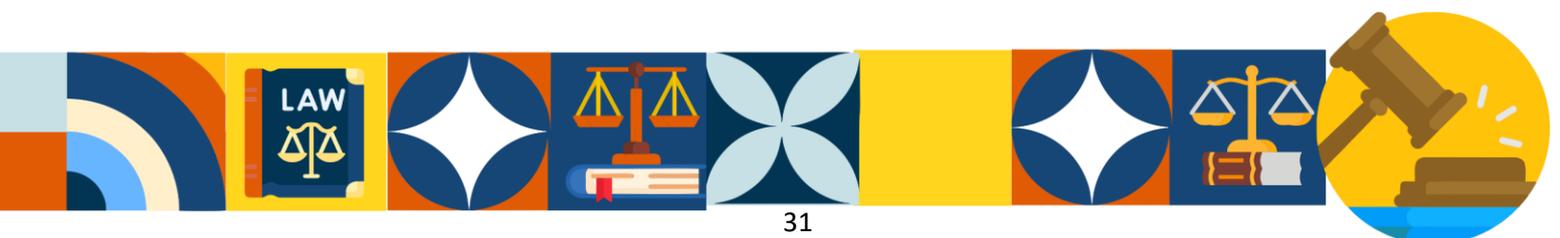
Metode pelaksanaan pengukuran IKK, yaitu

1. Pengukuran dilakukan setiap **2 tahun sekali**, dengan pertimbangan efektifitas dan efisiensi serta untuk memberikan kesempatan bagi K/L/D dilakukan perbaikan-perbaikan terhadap hasil pengukuran;
2. Pengukuran IKK dilakukan dengan mengambil populasi kebijakan K/L/D yang diterbitkan dalam 2 tahun terakhir dan telah diimplementasikan ≥ 1 tahun;
3. Pengukuran mengambil populasi Peraturan Menteri/Kepala LPNK (pusat) dan Perda dan Perkada (daerah) terakhir
4. Pengukuran dilakukan dengan dukungan sistem informasi IKK pada ikk.lan.go.id; dan
5. Sampel dalam sistem IKK ditentukan dengan formula statistik $\sqrt{N+1}$, dimana N merupakan populasi kebijakan terpilih.

Dalam pengukuran Indeks Kualitas Kebijakan, terdapat instrument pengukuran yang harus dipenuhi. Instrumen tersebut terdiri atas 2 dimensi, 4 sub dimensi, 13 indikator, dan 39 pertanyaan sebagai berikut

1. Perencanaan Kebijakan (Bobot 45%)
 - a. Agenda Setting (Bobot 55%)

Merupakan pengukuran terhadap proses identifikasi masalah kebijakan, analisis masalah kebijakan, dan partisipasi publik dalam perumusan kebijakan. Dalam tahapan ini terdapat 2 (dua) indikator dengan 7 (tujuh) pertanyaan yaitu





1) Identifikasi dan Validasi Masalah (Bobot 55%)

- a) Sumber masalah kebijakan yang mendorong inisiatif tindak lanjut perumusan kebijakan dengan bobot 25% atau nilai 2,78;
- b) Masalah kebijakan yang diidentifikasi merupakan isu kebijakan yang menjadi bagian dari program prioritas nasional dengan bobot 25% atau nilai 2,78;
- c) Masalah kebijakan yang diidentifikasi memiliki keterkaitan dengan masyarakat umum dan kelompok tertentu yang memiliki kerentanan di masyarakat atau di ranah publik sesuai sektor kebijakannya dengan bobot 25% atau nilai 2,78; dan
- d) Situasi perhatian stakeholder/publik terhadap masalah kebijakan dengan bobot 25% atau nilai 2,78.

2) Penyaringan dan Konsultasi publik terhadap masalah kebijakan (Bobot 45%)

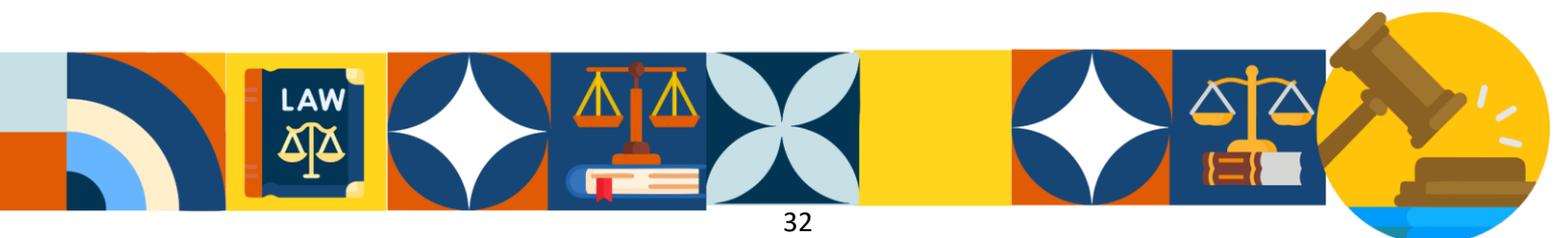
- a) Proses penyaringan masalah dilakukan secara demokratis dan ilmiah dengan bobot 30% atau nilai 2,73;
- b) Agenda kebijakan mendesak untuk mengatasi masalah dengan melihat kondisi saat itu dengan bobot 35% atau nilai 3,19; dan
- c) Faktor lain yang mendorong untuk mengangkat masalah menjadi agenda kebijakan dengan bobot 35% atau nilai 3,19.

b. Formulasi Kebijakan (Bobot 55%)

Merupakan pengukuran dengan melihat pada proses pengambilan keputusan kebijakan berdasarkan beberapa kriteria yang terukur. Dalam tahapan ini terdapat 5 (lima) indikator dengan 12 pertanyaan yaitu

1) Karakteristik Mendasar (Bobot 10%)

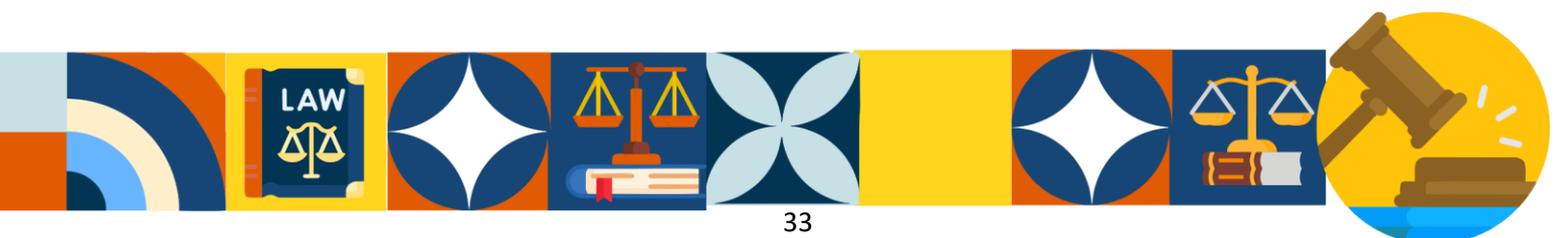
- a) Kebijakan memiliki tujuan yang jelas dengan bobot 50% atau nilai 1,24; dan
- b) Kebijakan didasarkan pada opsi kebijakan yang masing-masing opsi telah dikaji kemanfaatannya dengan bobot 50%





atau nilai 1,24.

- 2) Berorientasi ke Depan (Bobot 15%)
 - a) Kebijakan yang dibuat dapat menjawab permasalahan dan tantangan saat ini dan ke depan dengan bobot 50% atau nilai 1,86; dan
 - b) Muatan/substansi kebijakan telah mempertimbangkan risiko dan penanganan risiko yang mungkin timbul dengan bobot 50% atau nilai 1,86.
- 3) Outward Looking (Bobot 20%)
 - a) Rumusan kebijakan ditujukan untuk memenuhi kebutuhan stakeholder serta mempertimbangkan lingkungan eksternal kebijakan dengan bobot 40% atau nilai 1,98;
 - b) Rancangan kebijakan dikonsultasikan kepada stakeholder dan pihak yang akan terdampak dengan bobot 40% atau nilai 1,98; dan
 - c) Rancangan kebijakan mempertimbangkan kepentingan kelompok rentan yang berpotensi terdampak, baik langsung ataupun tidak langsung dengan bobot 20% atau nilai 0,99.
- 4) Berbasis Bukti (Bobot 40%)
 - a) Perumusan kebijakan dilakukan berdasarkan kajian dan analisis yang memadai dengan bobot 30% atau nilai 2,97;
 - b) Kajian dan analisis untuk perumusan kebijakan didukung dengan bukti yang memadai dengan bobot 40% atau nilai 3,96; dan
 - c) Penyusunan kebijakan didukung oleh dokumentasi yang lengkap dan memadai untuk pembelajaran di masa mendatang dengan bobot 30% atau nilai 2,97.
- 5) Inovatif (Bobot 15%)
 - a) Kebijakan menawarkan/memberikan alternatif solusi baru terhadap permasalahan dengan bobot 30% atau nilai 1,11;





- b) Kebijakan memberikan nilai tambah/manfaat baru bagi stakeholder dengan bobot 35% atau nilai 1,30; dan
- c) Kebijakan memberikan cara/metode baru untuk implementasinya dengan bobot 35% atau nilai 1,30.

2. Evaluasi Kemanfaatan Kebijakan (Bobot 55%)

a. Implementasi Kebijakan (Bobot 50%)

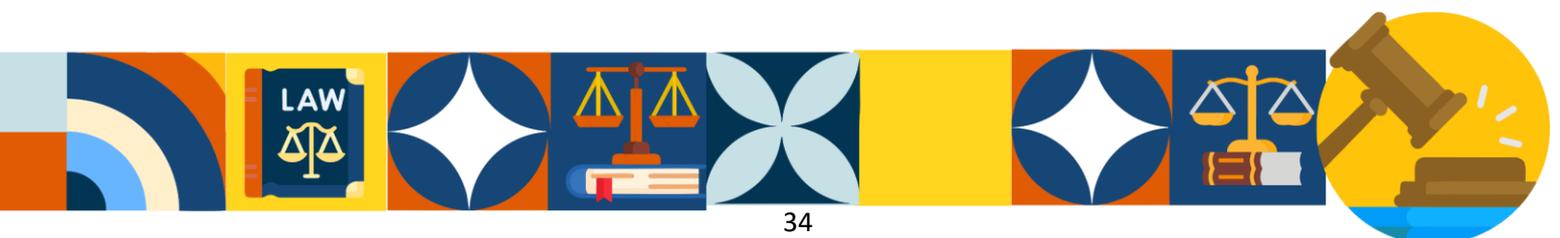
Merupakan Pengukuran dengan berfokus pada dimensi pengorganisasian, komunikasi kebijakan, dan monitoring kebijakan. Dalam tahapan ini terdapat 3 (tiga) indikator dengan 10 pertanyaan yaitu

1) Pengorganisasian (Bobot 30%)

- a) Dilakukan uji coba/piloting terhadap kebijakan dengan bobot 25% atau nilai 2,06;
- b) Kejelasan unit kerja/kelompok kerja/tim yang berwenang dan bertanggungjawab terhadap implementasi kebijakan dengan bobot 25% atau nilai 2,06;
- c) Terdapat kejelasan strategi implementasi kebijakan yang dilengkapi dengan ukuran/indikator keberhasilan tujuan kebijakan dengan bobot 25% atau nilai 2,06; dan
- d) Terdapat alokasi sumber daya manusia (SDM) dan anggaran sudah sesuai dengan kebutuhan dengan bobot 25% atau nilai 2,06.

2) Komunikasi Kebijakan (Bobot 35%)

- a) Terdapat strategi komunikasi kebijakan yang baik dengan bobot 35% atau nilai 3,37;
- b) Frekuensi sosialisasi kepada target audience/pemangku kepentingan dalam 1 (satu) tahun pertama dengan bobot 30% atau nilai 2,89;
- c) Variasi jenis media komunikasi kebijakan yang digunakan dengan bobot 35% atau nilai 3,37.





3) Monitoring Implementasi Kebijakan (Bobot 35%)

- a) Intensitas pelaksanaan kegiatan monitoring dengan bobot 30% atau nilai 2,89;
- b) Ruang lingkup kegiatan monitoring dengan bobot 35% atau nilai 3,37; dan
- c) Tindaklanjut hasil monitoring implementasi kebijakan dengan bobot 35% atau nilai 3,37.

b. Evaluasi Kebijakan (Bobot 50%)

Merupakan Pengukuran dengan melihat pada efektivitas, efisiensi, dampak dan kemanfaatan serta penerimaan dan responsivitas kebijakan. Dalam tahapan ini terdapat 3 (tiga) indikator dengan 9 pertanyaan yaitu

1) Efektivitas (Bobot 40%)

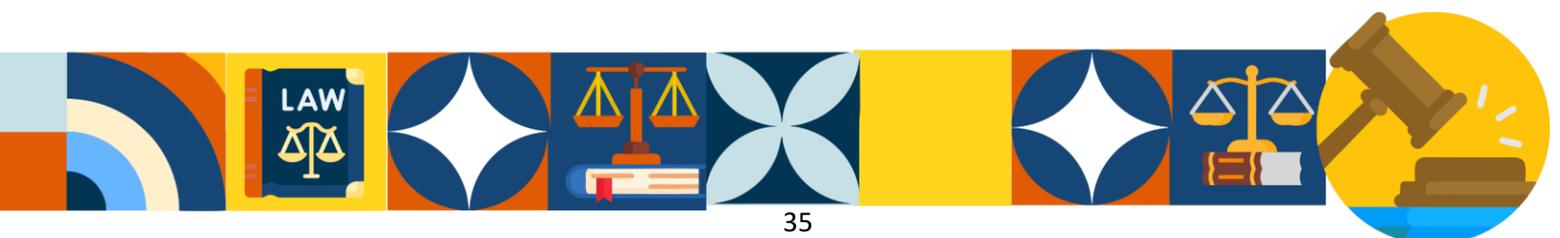
- a) Dilakukan evaluasi terhadap pencapaian tujuan kebijakan dengan bobot 50% atau nilai 5,50; dan
- b) Dilakukan evaluasi atas metode/strategi implementasi kebijakan dengan tujuan kebijakan dengan bobot 50% atau nilai 5,50.

2) Efisiensi (Bobot 15%)

- a) Dilakukan evaluasi atas efisiensi kebijakan dengan tujuan kebijakan dengan bobot 50% atau nilai 2,06; dan
- b) Dilakukan upaya-upaya efisiensi sumberdaya dalam pencapaian tujuan kebijakan dengan bobot 50% atau nilai 2,06.

3) Evaluasi atas Penerimaan, Responsivitas, Dampak dan Kemanfaatan Kebijakan (Bobot 45%)

- a) Kelompok sasaran menerima atas keberadaan kebijakan dengan bobot 20% atau nilai 2,48;
- b) Responsivitas kebijakan selaras dengan kebutuhan kelompok sasaran dengan bobot 20% atau nilai 2,48;

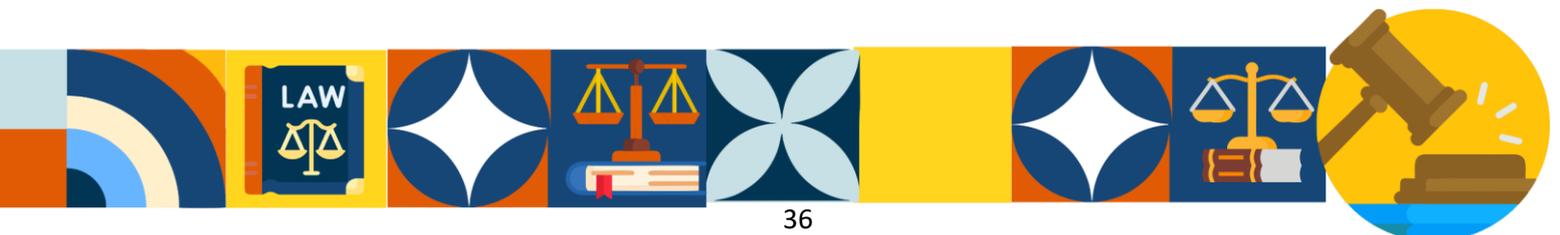




- c) Hasil kebijakan memenuhi preferensi kelompok sasaran dengan bobot 20% atau nilai 2,48;
- d) Hasil kebijakan memberikan dampak terhadap kelompok rentan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan dengan bobot 20% atau nilai 2,48; dan
- e) Kebijakan meningkatkan kualitas penggunaan sumberdaya dan proses kerja penyelesaian masalah menjadi lebih efisien dibandingkan dengan kebijakan yang ada sebelumnya dengan bobot 20% atau nilai 2,48.

Berdasarkan informasi pada portal Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi pada laman portalrb.menpan.go.id, Kementerian Kelautan dan Perikanan berhasil mencapai nilai indeks kualitas kebijakan sebesar **83,34** dengan kategori **sangat baik** (nilai antara kementerian belum diterbitkan oleh Lembaga Administrasi Negara). IKU Indeks Kualitas Keb. Capaian nilai tersebut diatas target yang telah ditetapkan yaitu nilai 65 dengan kategori baik. Capaian nilai tersebut didasarkan pada kondisi input *self assesment* yang dilakukan oleh enumerator. Penilaian seluruh sampel kebijakan instansi telah maksimal dilakukan karena progress pengisian sampel pada tujuh kebijakan telah mencapai 100%. Dalam pelaksana kegiatan terdapat beberapa rekomendasi perbaikan yaitu KKP perlu melengkapi dan mengunggah bukti dukung yang relevan dengan jawaban yang dipilih dari tiap-tiap pertanyaan yang diberikan.

ijakan merupakan IKU Baru pada tahun 2023, berdasarkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 166 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 32 Tahun 2021 tentang Road Map Reformasi Birokrasi KKP 2020-2024 Biro Hukum menjadi penanggung jawab Indeks Reformasi Hukum. Sehingga IKU tersebut belum masuk pada Renstra 2020-2024 dan Renja 2023, namun telah diusulkan pada perubahan Restra 2024 dan Renja 2024.





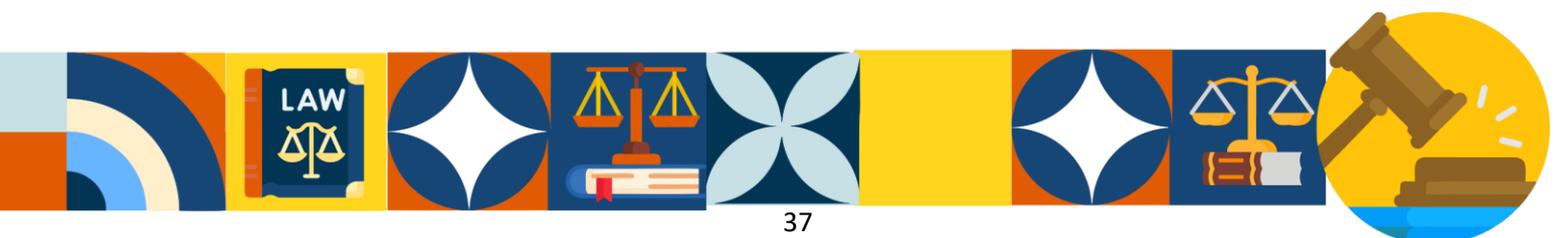
A. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja

Dalam pelaksanaan, terdapat beberapa upaya telah dilakukan untuk mendukung keberhasilan indikator capaian implementasi Kebijakan RB yaitu

1. meningkatkan koordinasi melalui rapat tim internal IKK;
2. mengoptimalkan peran dan kapasitas para pejabat fungsional Perancang, Analis Hukum, dan Analis Kebijakan dalam melakukan inventarisasi data dukung;
3. melengkapi data dukung dalam aspek implementasi kebijakan dan evaluasi kebijakan;
4. memperkuat koordinasi dengan eselon I yang merupakan pemrakarsa kebijakan; dan
5. melakukan koordinasi yang intens dengan Lembaga Administrasi Negara terkait kesesuaian data dukung yang telah dikumpulkan.

B. Penggunaan Anggaran yang Mendukung Indikator Kinerja

Menyoroti penerapan anggaran berbasis kinerja dikaitkan dengan isu yang berkembang saat ini sesuai fokus pemerintah yaitu melakukan penghematan dan efisiensi anggaran. Hal tersebut sejalan dengan tujuan reformasi di bidang penganggaran yakni meningkatkan efisiensi dalam penganggaran dari tujuan penerapan Penganggaran Berbasis Kinerja (PBK). PBK adalah sistem penganggaran yang mengaitkan antara pengalokasian dana dengan kinerja yang diharapkan. Kinerja adalah keluaran atau output dari suatu kegiatan baik berupa barang atau jasa yang dapat diukur kuantitas maupun kualitasnya. Kinerja juga diartikan sebagai sejauh mana "manfaat/hasil (outcome)" dari barang atau jasa tersebut bagi pengguna layanan. Realisasi anggaran Indeks Kualitas Kebijakan sebesar Rp. 130.679.500 dari target sebesar Rp. 130.688.000 dengan persentase capaian sebesar 99,99%.



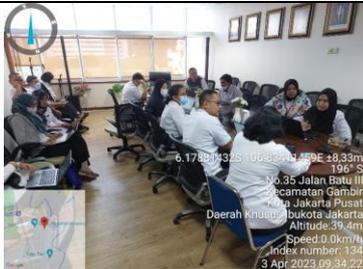
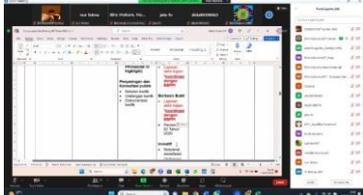


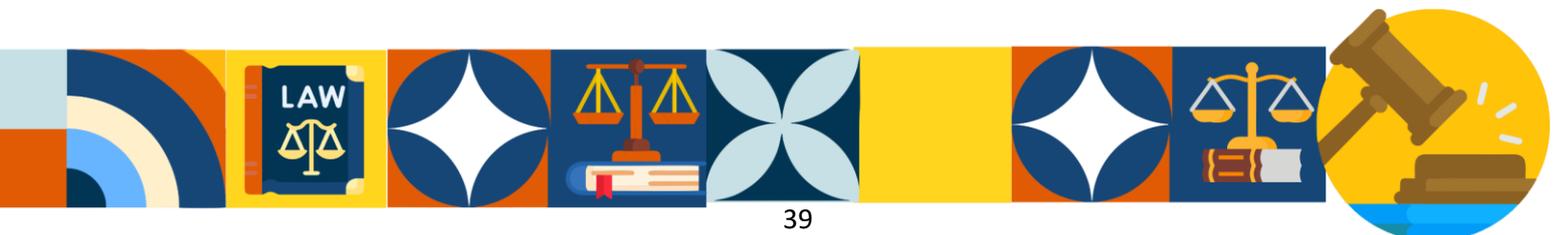
Kegiatan yang menunjang keberhasilan Indeks Kualitas Kebijakan Tahun 2023

NO.	HARI, TANGGAL	NOMOR DAN TANGGAL UNDANGAN	PELAKSANAAN KEGIATAN	PIMPINAN RAPAT	PESERTA	BUKTI FOTO
1.	Selasa, 27 Desember 2022	Undangan Kepala Biro Hukum, Nomor B.778/SJ.4/TU.330/XII/2022 dan Nomor B.779/SJ.4/TU.330/XII/2022, tanggal 21 Desember 2022, hal Undangan	Ruang Rapat Biro Hukum Lantai 3B, Gedung Mina Bahari IV dan melalui konferensi video	Perancang PUU Ahli Madya selaku Koordinator PUU II	Perwakilan Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut, Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap, Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya, Direktorat Jenderal PDSPKP, Direktorat Jenderal PSDKP, Inspektorat Jenderal, BRSDM KP, BKIPM, dan Sekretariat Jenderal (Biro SDMAO dan Biro Hukum	 <small>02/12/2022 14:29:49 Jalan Batu III Kacamatan Gambir Kota Jakarta Pusat Daerah Khusus Ibukota Jakarta</small>
2.	Selasa, tanggal 14 Februari 2023	Undangan Kepala Biro Hukum, Nomor B.66/SJ.4/TU.330/II/2023, tanggal 1 Februari 2023, hal Undangan	Hotel Ibis Styles Jakarta Gajah Mada	Kepala Biro Hukum	Perwakilan dari Lembaga Administrasi Negara dan seluruh tim IKK KKP Tahun 2023	 <small>Kota Administrasi Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Indonesia Jalan K.H. Zainal Arifin, Gambir, Kota Administrasi Jakarta Pusat, 10130, Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Indonesia Lat -6.160083, Long 106.817859 02/14/2023 08:57 AM GMT+07:00 Note: Captured by GPS Map Camera</small>





NO.	HARI, TANGGAL	NOMOR DAN TANGGAL UNDANGAN	PELAKSANAAN KEGIATAN	PIMPINAN RAPAT	PESERTA	BUKTI FOTO
3.	Senin-Selasa, tanggal 20-21 Maret 2023	Undangan Kepala Biro Hukum, Nomor B.146/SJ.4/TU.330/III/2023, tanggal 8 Maret 2023, hal Undangan	Hotel Ibis Styles Bogor Raya dan melalui konferensi video	Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Madya selaku Koordinator Perundang-Undangan II Biro Hukum	Perwakilan dari Lembaga Administrasi Negara dan seluruh tim IKK KKP Tahun 2023	
4.	Senin, tanggal 3 April 2023	Undangan Kepala Biro Hukum, Nomor B.185/SJ.4/TU.330/III/2023, tanggal 28 Maret 2023, hal Undangan	Ruang rapat Biro Hukum GMB IV	Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Muda Perundang-Undangan II Biro Hukum	Tim Enumerator IKK KKP Tahun 2023	
5.	Kamis, tanggal, 14 Juli 2023	undangan Kepala Biro Hukum, Nomor B.409/SJ.4/TU.330/VII/2023, tanggal 6 Juli 2023, hal Undangan	konferensi video melalui aplikasi zoom	Kepala Biro Hukum dan dipimpin oleh Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Madya selaku Ketua Tim Kerja Peraturan Perundang-undangan II	Tim Enumerator IKK KKP Tahun 2023	





NO.	HARI, TANGGAL	NOMOR DAN TANGGAL UNDANGAN	PELAKSANAAN KEGIATAN	PIMPINAN RAPAT	PESERTA	BUKTI FOTO
6.	Senin-Rabu, tanggal 21-23 Agustus 2023	Undangan Kepala Biro Hukum, Nomor B.497/SJ.4/TU.330/VIII/2023, tanggal 14 Agustus 2023, hal Undangan	Bigland Hotel International & Convention Hall Bogor	Kepala Biro Hukum	Perwakilan Lembaga Administrasi Negara dan Tim Enumerator IKK KKP Tahun 2023	
7.	Selasa, 12 September 2023	Undangan Kepala Biro Hukum, Nomor B.561/SJ.4/TU.330/IX/2023, tanggal 7 September 2023, hal Undangan	Swiss-bel Hotel Bogor	Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Madya selaku Ketua Tim Kerja Peraturan Perundang-undangan II	perwakilan Pusat Pembinaan Analisis Kebijakan Lembaga Administrasi Negara dan tim enumerator IKK (Ditjen Perikanan Tangkap, Ditjen Perikanan Budidaya, Ditjen PDSPKP, Ditjen PSDKP, Itjen, BKIPM, dan Biro Hukum)	





IKU 4 Persentase Penyelesaian Program Penyusunan Peraturan Perundang-undangan Kementerian Kelautan dan Perikanan

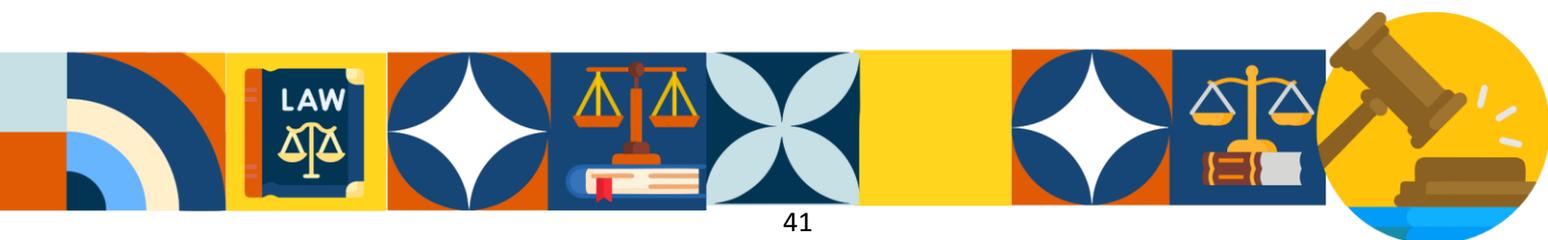
**Tabel 6
Indikator Kinerja Utama 4**

SK-1		Tata Kelola Pemerintahan yang Baik di Bidang Penyiapan Produk Hukum KKP											
IKU-4		Persentase Penyelesaian Program Penyusunan Peraturan Perundang-undangan Kementerian Kelautan dan Perikanan											
Realisasi					Realisasi Tahun 2023				Renstra Setjen 2020-2024				
2018	2019	2020	2021	2022	Target	Realisasi	% Capaian	% kenaikan 2022-2023	Target 2023	% Capaian thd Target 2023	Target 2024	% Capaian thd Target 2024	
100	100	66,3	100	94,53	100	100	100	5,47	100	100	100	100	

Peraturan Perundang-undangan di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan yang harus diselesaikan adalah sebagaimana tercantum dalam Program Penyusunan Peraturan Menteri dan Keputusan Menteri di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2023 serta yang diusulkan melalui mekanisme izin prakarsa di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Capaian diperoleh dari persentase perhitungan jumlah peraturan perundang-undangan yang diselesaikan (penyampaian permohonan harmonisasi Rancangan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan penetapan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan) hingga 31 Desember 2023, dibandingkan dengan jumlah peraturan perundang-undangan yang direncanakan sebagaimana tercantum dalam Program Penyusunan Peraturan Menteri dan Keputusan Menteri di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2023 serta yang diusulkan melalui mekanisme izin prakarsa di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Khusus untuk peraturan perundang-undangan yang diusulkan melalui mekanisme izin prakarsa di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, selain dinyatakan selesai pada saat penyampaian permohonan harmonisasi Rancangan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan/penetapan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan hingga 31 Desember 2023, juga dapat dinyatakan selesai dalam hal Rancangan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan/Rancangan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan dinyatakan tidak dapat diproses berdasarkan indikator:



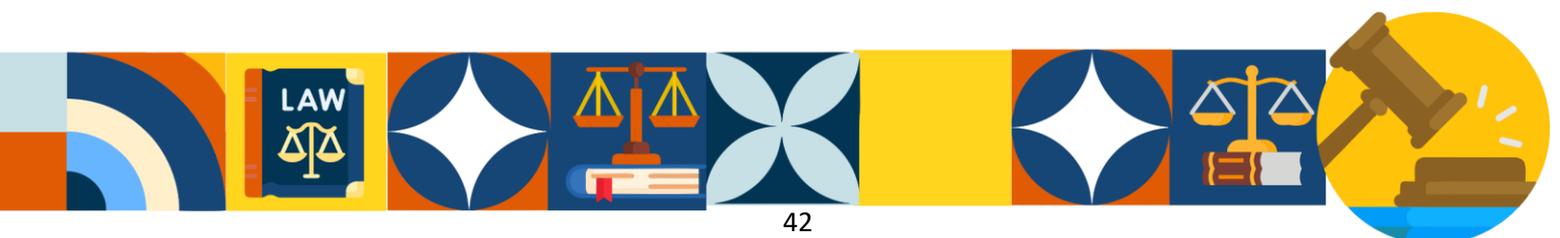


- a. materi muatan yang diatur bukan merupakan kewenangan Menteri Kelautan dan Perikanan;
- b. materi muatan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, peraturan/keputusan yang ditetapkan kementerian/lembaga lain, maupun Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan/Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan yang telah ada;
- c. materi muatan tidak perlu disusun karena telah ditetapkan dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan/Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan namun tidak perlu adanya perubahan/penyempurnaan terkait materi tersebut;
- d. Rancangan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan/Rancangan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan harus disusun berdasarkan penetapan/pemberlakuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi maupun peraturan perundang-undangan kementerian/lembaga lain yang menjadi pedoman, namun belum ditetapkan/belum berlaku; dan/atau
- e. Rancangan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan/Rancangan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan harus disusun setelah ditetapkan/diberlakukannya Rancangan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan/Rancangan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan lainnya.

Hasil capaian kinerja penyelesaian penyusunan peraturan perundang-undangan di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan berdasarkan:

- a. data capaian Program Penyusunan Peraturan Menteri dan Keputusan Menteri di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2023 (TW IV) sampai dengan 31 Desember 2023; dan
 - b. data capaian Nonprogram Penyusunan Peraturan Menteri dan Keputusan Menteri di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2023 (TW IV) sampai dengan 31 Desember 2023,
- diperoleh data sebagai berikut:

	PROGSUN		NONPROGSUN	
	YANG DIUSULKAN	YANG SELESAI	YANG DIUSULKAN	YANG SELESAI
PERMEN KP	54	54	9	9
KEPMEN KP	19	19	161	161
TOTAL	73	73	170	170





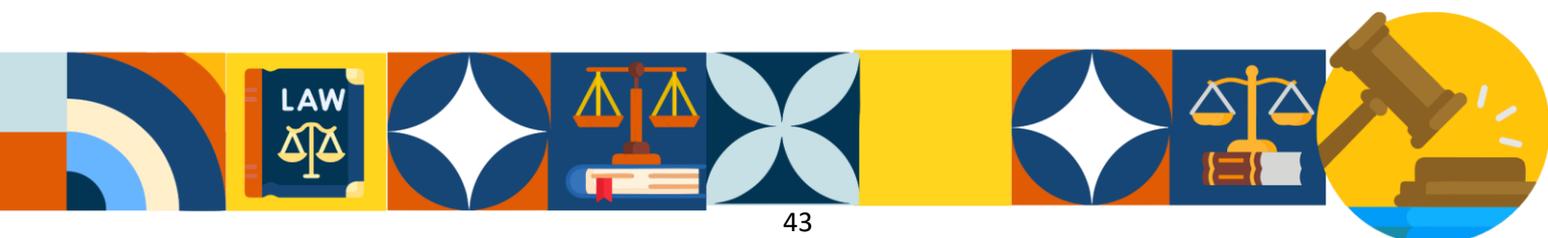
	PROGSUN		NONPROGSUN	
	YANG DIUSULKAN	YANG SELESAI	YANG DIUSULKAN	YANG SELESAI
PERSENTASE	100%		100%	
	100%			

Berdasarkan data tersebut, terdapat total **243 (dua ratus empat puluh tiga)** rancangan peraturan perundang-undangan sebagai usulan kinerja peraturan perundang-undangan yang terdiri atas **63 (enam puluh tiga)** rancangan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan dan **180 (seratus delapan puluh)** rancangan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan. Hingga 31 Desember 2023 terdapat **243 (dua ratus empat puluh tiga)** rancangan peraturan perundang-undangan yang telah selesai, terdiri atas 63 (enam puluh tiga) Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan dan 180 (seratus delapan puluh) Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan, sehingga capaiannya **100% (seratus persen)** untuk peraturan perundang-undangan yang masuk dalam program penyusunan Peraturan Menteri dan Keputusan Menteri di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan tahun 2023 dan **100% (seratus persen)** untuk yang nonprogram penyusunan Peraturan Menteri dan Keputusan Menteri di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan tahun 2023.

A. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja

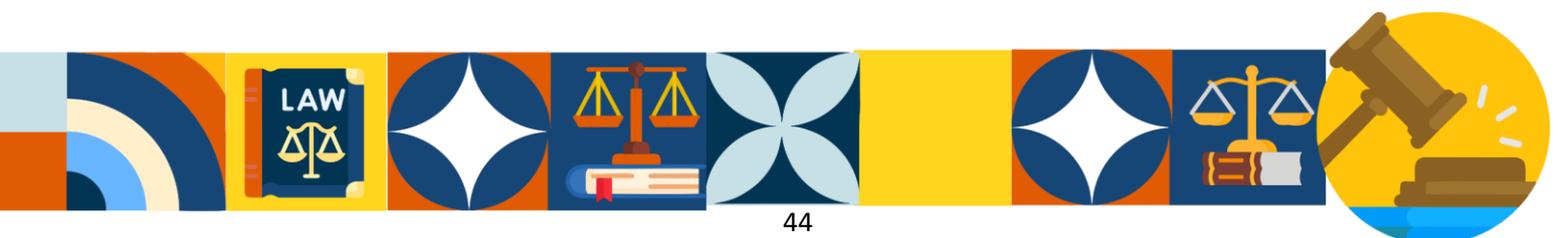
Hasil analisis penyebab tercapainya IKU Persentase Penyelesaian Program Penyusunan Peraturan Perundang-undangan Kementerian Kelautan dan Perikanan dikarenakan berbagai upaya yang dilakukan, yaitu:

1. melakukan program penyusunan produk hukum satu tahun sebelumnya;
2. meningkatkan koordinasi melalui rapat pembahasan program penyusunan produk hukum dan mengirimkan nota dinas/memorandum secara formal;
3. mengoptimalkan peran dan kapasitas pejabat fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan dan Analis Hukum di setiap unit kerja eselon I dengan melakukan analisis dan evaluasi kebijakan publik di bidang kelautan dan perikanan;





4. memastikan pembentukan mekanisme dan tata cara persetujuan izin prakarsa oleh Menteri;
5. mengadakan bimbingan teknis/pendalaman materi penyusunan produk hukum;
6. lebih banyak mengadakan rapat pembahasan dan fokus grup diskusi dengan unit kerja eselon I terkait;
7. melakukan reviu terhadap usulan program penyusunan produk hukum dari unit kerja eselon I di lingkungan KKP oleh Inspektorat Jenderal dan Biro Hukum;
8. mengirimkan notulensi hasil rapat kepada unit kerja eselon I terkait;
9. mencantumkan dalam undangan rapat apabila pejabat yang diundang berhalangan hadir maka dapat diwakilkan kepada pejabat yang ditunjuk dan pejabat tersebut diberi kewenangan untuk dapat mengambil keputusan dengan dilengkapi surat mandat yang dilampirkan dalam undangan;
10. mengembalikan rancangan produk hukum kepada unit kerja pemrakarsa untuk dibahas kembali di internal;
11. menyampaikan tanggapan tertulis kepada pimpinan unit kerja pemrakarsa terkait dengan materi muatan rancangan yang perlu mendapat klarifikasi;
12. melakukan rapat koordinasi dengan Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Sekretariat Negara, dan Sekretariat Kabinet, serta kementerian/lembaga terkait;
13. melakukan koordinasi dengan unit kerja eselon I terkait untuk penyempurnaan hasil harmonisasi;
14. kajian teknis/analisis terhadap rancangan peraturan perundang-undangan yang disusun dan disampaikan dalam rapat pimpinan atau secara tertulis kepada Menteri;
15. koordinasi secara langsung dengan unit kerja eselon I, baik dengan bagian persuratan atau pejabat terkait dalam rangka mengawal proses permohonan paraf dan penandatanganan;
16. melakukan koordinasi dengan Katimlak UKM;
17. mengusulkan rancangan produk hukum yang krusial dibahas dalam rapat pimpinan;





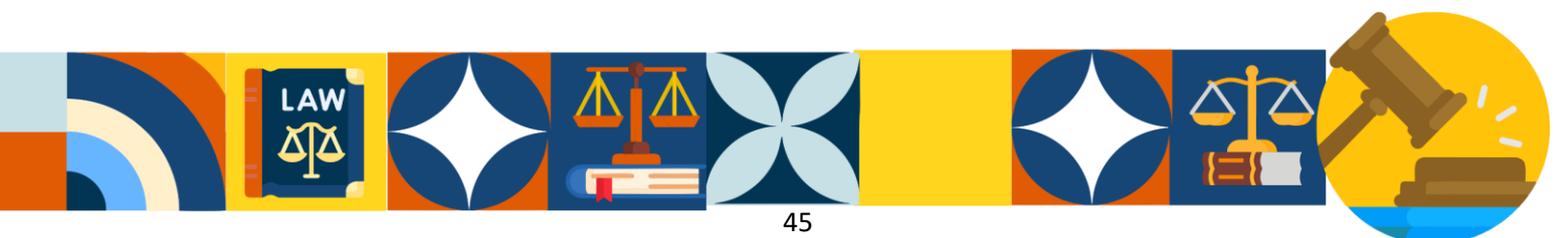
18. melibatkan staf khusus dan tenaga ahli menteri dalam rapat pembahasan produk hukum; dan
19. koordinasi secara intensif kepada Kementerian Hukum dan HAM.

B. Penggunaan Anggaran yang Mendukung Indikator Kinerja

Dalam menunjang penyelesaian program penyusunan peraturan perundang-undangan Kementerian Kelautan dan Perikanan, Biro Hukum dalam menyusun peraturan perundang-undangan melibatkan bagian Perundang-undangan I, bagian Perundang-undangan II, dan bagian Perundang-undangan III terdiri atas 17 (tujuh belas) dengan rincian 16 (enam belas) orang Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan 1 (satu) orang Pegawai Pemerintah Nonpegawai Negeri Sipil (PPNPN) dan diperlukan biaya untuk dapat melaksanakan kegiatan demi mencapai *output* sesuai dengan tugas dan fungsi dari Biro Hukum. Biaya-biaya tersebut dituangkan pada Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA K/L) yang disusun 1 (satu) tahun sebelum pelaksanaan kerja dan anggaran dilaksanakan. Untuk mendukung IKU penyelesaian program penyusunan peraturan perundang-undangan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Telah mencapai target yang ditentukan berdasarkan capaian kinerja dan realisasi anggaran penyusunan peraturan perundang-undangan Kementerian Kelautan dan Perikanan sebagai berikut:

1. Bagian Perundang-undangan I
 - a. target anggaran: Rp1.879.564.000,00
 - b. realisasi anggaran: Rp1.867.401.558,00
2. Bagian Perundang-undangan II
 - a. target anggaran: Rp1.672.993.000,00
 - b. realisasi anggaran: Rp1.669.028.547,00
3. Bagian Perundang-undangan III
 - a. target anggaran: Rp1.653.084.000,00
 - b. realisasi anggaran: Rp 1.649.285.601,00

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, dari ketiga bagian tersebut total target anggaran penyusunan peraturan perundang-undangan untuk 3 (tiga) bagian sebesar Rp5.205.641.000,00 (lima miliar dua ratus lima juta enam ratus empat puluh





satu ribu rupiah) dengan realisasi anggaran sebesar Rp5.185.715.700,00 (lima miliar seratus delapan puluh lima juta tujuh ratus lima belas ribu tujuh ratus rupiah), dengan persentase 99,62% (sembilan puluh sembilan koma enam dua persen) optimal.

C. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan Pencapaian Pernyataan Kinerja

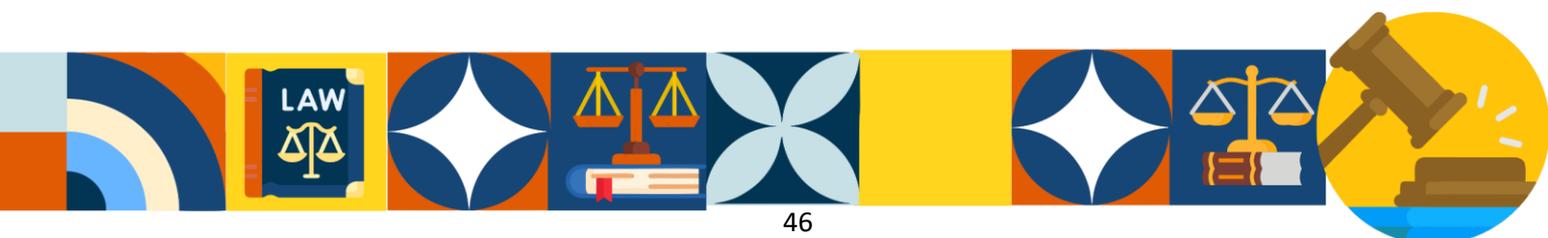
Terdapat kegiatan-kegiatan yang telah dilakukan oleh Biro Hukum dalam rangka tercapainya IKU Penyelesaian Penyusunan Peraturan Perundang-undangan di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan yang dapat dilihat pada lampiran.

IKU 5 Permasalahan Hukum melalui jalur pengadilan/litigasi di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan yang Ditangani

**Tabel 7
Indikator Kinerja Utama 5**

SK-1 Tata Kelola Pemerintahan yang Baik di Bidang Penyiapan Produk Hukum KKP													
IKU-5 Permasalahan Hukum melalui jalur pengadilan/litigasi di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan yang Ditangani													
Realisasi					Realisasi Tahun 2023				Renstra Setjen 2020-2024				
2018	2019	2020	2021	2022	Target	Realisasi	% Capaian	% kenaikan 2022-2023	Target 2023	% Capaian thd Target 2023	Target 2024	% Capaian thd Target 2024	
-	-	-	-	-	100	160	120	48,89	-	-	-	-	

Penyelenggaraan pemerintahan saat ini dihadapkan pada upaya mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, perlindungan dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, dan keadilan. Namun dalam pelaksanaan pemerintahan tersebut seringkali timbul perbedaan dan dissinkronisasi antara normatif dan kebijakan, bahkan berujung sampai dengan adanya gugatan di lembaga peradilan. Terhadap kondisi tersebut dan meningkatnya tugas dan fungsi Kementerian Kelautan dan Perikanan saat ini, faktanya berimplikasi langsung terhadap institusi Kementerian Kelautan dan Perikanan, yaitu semakin banyak dan beragamnya permasalahan hukum yang harus dihadapi, antara lain masalah hukum di bidang pertanahan, kepegawaian, pengadaan barang dan jasa,





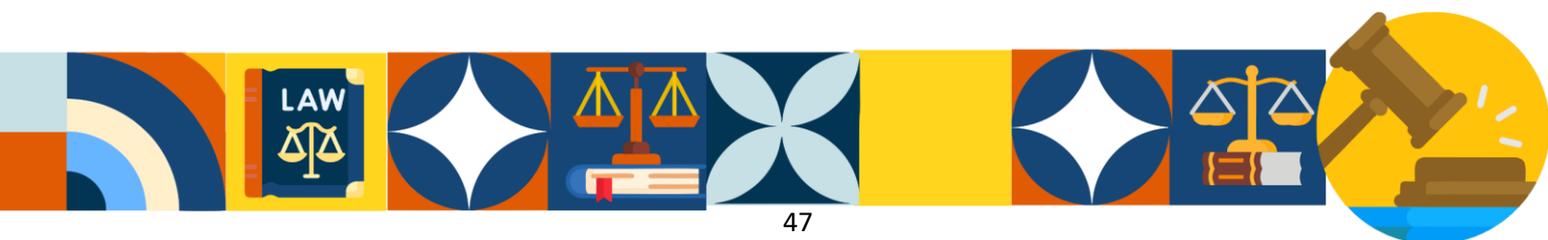
pengelolaan barang milik negara (aset), perizinan usaha perikanan, dan masalah penyelenggaraan pemerintahan lainnya.

Sebagai upaya dan perwujudan dalam menjawab tantangan dan permasalahan hukum yang semakin kompleks tersebut, perlu dilakukan langkah-langkah penyelesaian yang tepat dan efisien, antara lain dalam bentuk telaahan dan kajian dari berbagai aspek, baik dari segi teknis maupun hukum (*legal opinion*) atau bahkan harus dilakukan pembelaan atau advokasi dengan melibatkan unit/instansi terkait lainnya. Sejalan dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 15 Tahun 2022 tentang Advokasi Hukum di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, diamanatkan kepada Biro Hukum, Sekretariat Jenderal bersama Bagian Hukum pada Sekretariat Direktorat Jenderal/Sekretariat Inspektorat Jenderal/Sekretariat Badan, Kementerian Kelautan dan Perikanan sebagai pemberi advokasi hukum dan memberikan pelayanan advokasi hukum (pemberian bantuan hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan dan pemberian pembinaan hukum) kepada pimpinan dan pegawai di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan yang aktif maupun purna tugas.

Konsekuensi logis lahirnya Peraturan Menteri Nomor 15 Tahun 2022 tentang Advokasi Hukum di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, tidak semata-mata hanya fokus pada pemberian pelayanan pemberian bantuan hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan dan pemberian pembinaan hukum, namun ada pembagian peran “pemberi advokasi hukum” yang juga dinilai penting dan strategis, sehingga suatu keharusan bagi pemberi advokasi hukum di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan memiliki pengetahuan dan kompetensi yang menyeluruh terhadap advokasi hukum baik pada tataran teori maupun praktik.

Tabel inventarisasi Permasalahan Hukum melalui jalur pengadilan/litigasi di yang ditangani

BULAN	PERMASALAHAN HUKUM MELALUI JALUR PENGADILAN/LITIGASI	TOTAL
Januari	permasalahan hukum yang mengarah pada proses peradilan, dalam proses peradilan, dan setelah putusan pengadilan	2
Februari		2
Maret		-

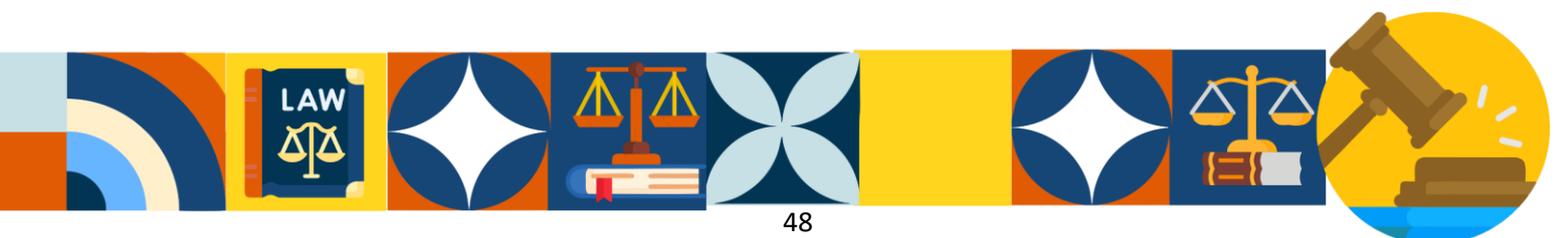




BULAN	PERMASALAHAN HUKUM MELALUI JALUR PENGADILAN/LITIGASI	TOTAL
April	permasalahan hukum yang mengarah pada proses peradilan, dalam proses peradilan, dan setelah putusan pengadilan	2
Mei		1
Juni		4
Juli	permasalahan hukum yang mengarah pada proses peradilan, dalam proses peradilan, dan setelah putusan pengadilan	-
Agustus		1
September		1
Oktober	permasalahan hukum yang mengarah pada proses peradilan, dalam proses peradilan, dan setelah putusan pengadilan	-
November		2
Desember		1

Rincian Permasalahan Hukum melalui jalur pengadilan/litigasi

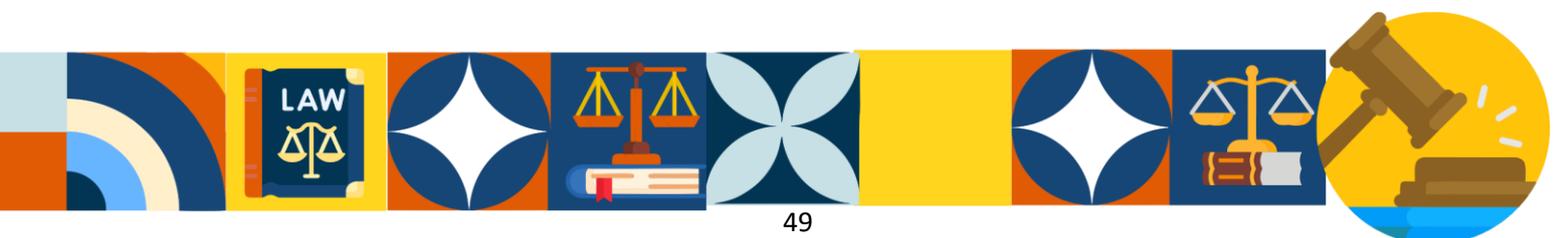
1. Penyelidikan dan Penyidikan Dugaan Tindak Pidana Korupsi Proyek PIAMARI dan MIAMARI;
2. Penyidikan dan Pendampingan pemberian keterangan Saksi dugaan tindak pidana korupsi terkait pemberian fasilitas impor garam industri;
3. Gugatan PTUN terkait PKKPR PT. Alam Panorama Pakuwon Register Perkara Nomor 297/G/TF/2022/PTUN.JKT, di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta;
4. Gugatan Perdata Register Nomor 03/Pdt.G/2022/PN.Bks, di Pengadilan Negeri Bekasi, yang diajukan oleh PT. Tambak Mas Makmur;
5. Gugatan TUN Carlos Lisbon Sirait, S.Pi terhadap Penjatuhan Hukumam Disiplin sebagaimana Register Perkara Nomor 55/G/2023/PTUN.JKT
6. Dugaan tindak pidana korupsi Pembangunan Politeknik KP Dumai pada Pusat Pendidikan KP, BRSDM Tahun Anggaran 2017;
7. penanganan perkara dugaan tindak pidana membuat surat palsu dan atau memalsu surat dan atau menempatkan keterangan palsu kedalam suatu akta otentik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 263 ayat (2) jo. Pasal 266 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang dilakukan Suyatno (Pegawai SKIPM Pontianak) di Badan Reserse Kriminal POLRI
8. Pendampingan dan pembinaan etika pegawai di Balai Besar Perikanan Budidaya Air Payau Jepara;





9. Pendampingan hukum dalam dugaan korupsi pengadaan makan Politeknik Kelautan dan Perikanan Sidoarjo T.A 2023
10. Perkara Nomor 48/Pdt.G.2023.PN.Trg di Pengadilan Negeri Tenggara Gugatan Class Action dari Muhammad Bari dkk melawan PT Bintang Kartika DKK
11. Gugatan Judicial Review di MK dengan Nomor perkara 35/PUU XXI/2023 Gugatan terhadap Undang Undang Nomor 27 tahun 2007;
12. Pendampingan Hukum terkait adanya Operasi Tangkap Tangan (OTT) terhadap Oknum Syahbandar di Pelabuhan Perikanan Samudera Bitung;
13. Pendampingan hukum Permintaan Interview terkait Hasil Evaluasi Pemanfaatan Bantuan Unit Produksi Pakan Ikan Mandiri di Kabupaten Oku Timur dan Kabupaten Pasaman yang menggunakan APBN Tahun 2022;
14. Gugatan Nomor 564/G/2023/PTUN.JKT, di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dari PT Batam Sentra Marina, terhadap PKKPR L a.n PT Dirgantara Inti Abadi;
15. Pendampingan terkait Laporan Pemalsuan Dokumen PKKPR L Koperasi Perkumpulan Rezeki Anak Melayu, di POLDA Kepulauan Riau, dengan Surat Tanda Penerimaan Laporan Nomor LP/B/98/XI/2023/SPKT/POLDA KEPULAUAN RIAU, tanggal 28 November 2023;
16. Gugatan Nomor 564/G/2023/PTUN.JKT, di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dari PT Barindo Prima Agung, terhadap Pemutusan Kontrak pada Paket Pekerjaan Pembangunan/Pengembangan/Rehabilitasi Fasilitas Pelabuhan Perikanan Lampulo Aceh;

Berdasarkan persentase permasalahan hukum di luar jalur pengadilan/litigasi yang tertangani, terdapat 16 (enam belas) permasalahan hukum dari target 10 (sepuluh) permasalahan hukum, sehingga capaian dan telah ditangani, sehingga realisasi Indikator Kinerja Permasalahan Hukum Melalui Jalur Pengadilan/Litigasi di





Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan yang Ditangani telah mencapai 160% dari target 100%.

IKU Permasalahan Hukum melalui jalur pengadilan/litigasi di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan yang Ditangani merupakan IKU Baru pada tahun 2023, berdasarkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 43 Tahun 2023 tentang Mekanisme Kerja untuk Penyederhanaan Birokrasi di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan Biro Hukum menjadi merubah tim kerja di Biro Hukum, sehingga IKU tersebut belum masuk pada Renstra 2020-2024 dan Renja 2023, namun telah diusulkan pada perubahan Restra 2024 dan Renja 2024.

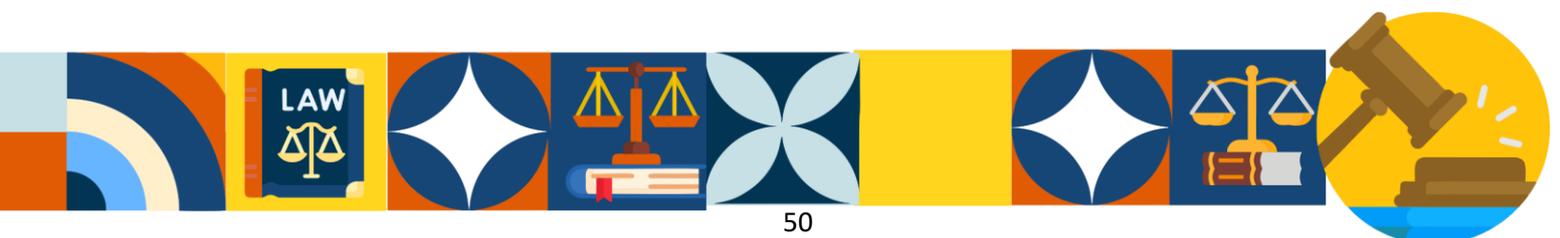
A. Analisis penyebab keberhasilan dalam rangka tercapainya IKU

Beberapa upaya telah dilakukan untuk mendukung keberhasilan tercapainya IKU permasalahan hukum melalui jalur pengadilan/litigasi yang tertangani adalah sebagai berikut

1. inventarisasi seluruh bukti-bukti terkait permasalahan hukum;
2. bedah kasus/gelar perkara dalam rangka tindak lanjut panggilan/pemeriksaan;
3. koordinasi dengan unit kerja terkait, pertemuan koordinasi, briefing calon saksi/tersangka yang akan diperiksa, dan simulasi tanya jawab perkara;
4. koordinasi dengan aparat penegak hukum guna melakukan penjadwalan yang bisa disepakati para pihak;
5. pendalaman materi baik tugas dan fungsi maupun kasus posisi permasalahan hukum.

B. Penggunaan Anggaran yang Mendukung Indikator Kinerja

Dalam menunjang pencapaian indikator permasalahan hukum melalui jalur pengadilan/litigasi yang tertangani dalam Kelompok Advokasi dan Bantuan Hukum didukung oleh 6 (enam) orang pegawai dan diperlukan biaya untuk dapat melaksanakan kegiatan demi mencapai *output* sesuai dengan tugas dan fungsi dari Biro Hukum. Biaya-biaya tersebut dituangkan pada Rencana Kerja dan Anggaran



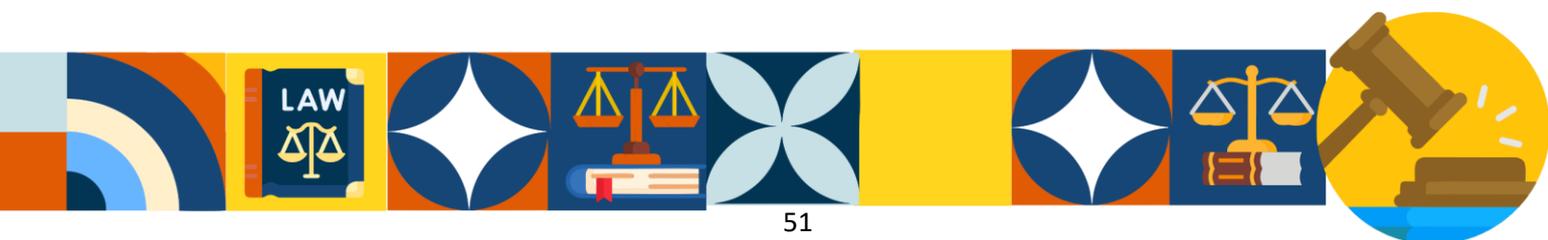


Kementerian/Lembaga (RKA K/L) yang disusun 1 (satu) tahun sebelum pelaksanaan kerja dan anggaran dilaksanakan telah mencapai target yang ditentukan berdasarkan capaian kinerja dan realisasi anggaran sebesar Rp959.935.680 dari pagu Rp969.632.000.

C. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan Pencapaian Pernyataan Kinerja

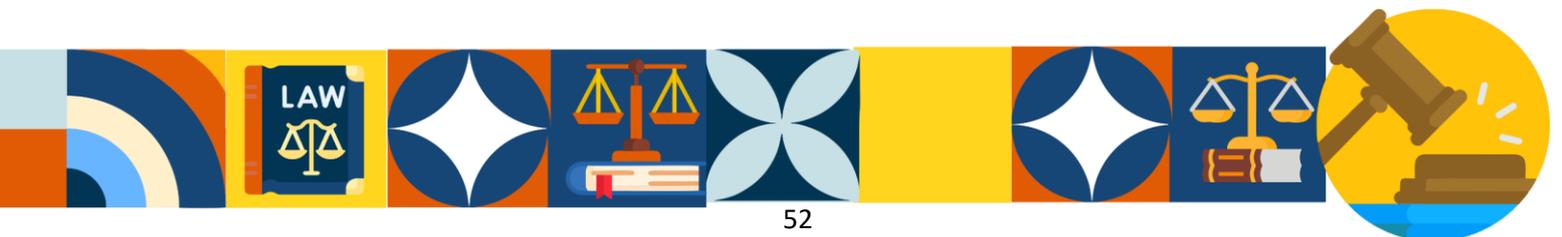
Berikut merupakan kegiatan yang telah dilakukan oleh Biro Hukum dalam rangka dalam ranga mencapai target permasalahan hukum melalui jalur pengadilan/litigasi yang tertangani, yaitu

NO	KEGIATAN	TINDAK LANJUT	FOTO
1	Dugaan Tindak Pidana Korupsi Proyek PIAMARI dan MIAMARI	Tanggal 3 Januari 2023 telah dilaksanakan rapat koordinasi dengan Tim Itjen KKP terkait temuan Kejaksaan Maluku Utara	
2	pemeriksaan dugaan tindak pidana korupsi terkait pemberian fasilitas impor garam industri	Tanggal 10 Januari 2023 telah dilakukan pendampingan dalam pemeriksaan saksi	
3	gugatan PTUN terkait PKKPRL PT. Alam Panorama Pakuwon Register Perkara Nomor 297/G/TF/2022/PTUN.J KT, di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta	Tanggal 28 Februari 2023 telah dilakukan rapat koordinasi dengan pihak PT Alam Pakuwon dan DJPRL dalam rangka persiapan banding;	





NO	KEGIATAN	TINDAK LANJUT	FOTO
4	Gugatan Perdata Register Nomor 03/Pdt.G/2022/PN.Bks, di Pengadilan Negeri Bekasi, yang diajukan oleh PT. Tambak Mas Makmur	Tanggal 24 Februari 2023 telah dilaksanakan sidang inzage	
5	Dugaan tindak pidana korupsi Pembangunan Politeknik KP Dumai pada Pusat Pendidikan KP, BRSDM Tahun Anggaran 2017	Tanggal 4 s.d. 6 April 2023, dilakukan pemeriksaan Tersangka dan Saksi (tambahan).	
6	penanganan perkara dugaan tindak pidana membuat surat palsu dan atau memalsu surat dan atau menempatkan keterangan palsu kedalam suatu akta otentik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 263 ayat (2) jo. Pasal 266 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang dilakukan Suyatno (Pegawai SKIPM Pontianak) di Badan Reserse Kriminal POLRI	Tanggal 17 April 2023 telah dilakukan pendampingan pemeriksaan saksi	
7	Pendampingan dan pembinaan etika pegawai di Balai Besar Perikanan Budidaya Air Payau Jepara Pegawai Balai Besar Perikanan Budidaya Air Payau Jepara yang bernama Meikananta Arliandi Wiguna telah melanggar kode etik dan disiplin PNS	Tanggal 31 Mei 2023 telah dilakukan pendampingan hukum Bersama Biro SDMAO	
8	Gugatan TUN Carlos Lisbon Sirait, S.Pi terhadap Penjatuhan Hukumam Disiplin sebagaimana Register	Tanggal 20 Juni 2023 telah dilaksanakan sidang dengan agenda penyerahan bukti surat tambahan dari pihak Penggugat	





NO	KEGIATAN	TINDAK LANJUT	FOTO
	Perkara Nomor 55/G/2023/PTUN.JKT		
9	Pendampingan hukum dalam dugaan korupsi pengadaan makan politeknik kelautan dan perikanan sidoarjo T.A 2023	Tanggal 22 Juni 2023 telah dilaksanakan pendampingan dalam rangka pemeriksaan di Ditreskrimsus Polda Jawa Timur	
10	Perkara Nomor 48/Pdt.G.2023.PN.Trgr di Pengadilan Negeri Tenggara Gugatan Class Action dari Muhammad Bari dkk melawan PT Bintang Kartika DKK	Tanggal 7 Juni 2023 dilakukan sidang perdana	
11	Gugatan Judicial Review di MK dengan Nomor perkara 35/PUU XXI/2023 Gugatan terhadap Undang Undang Nomor 27 tahun 2007	Tanggal 16 Juni 2023 telah dilaksanakan rapat koordinasi dalam rangka persiapan sidang	





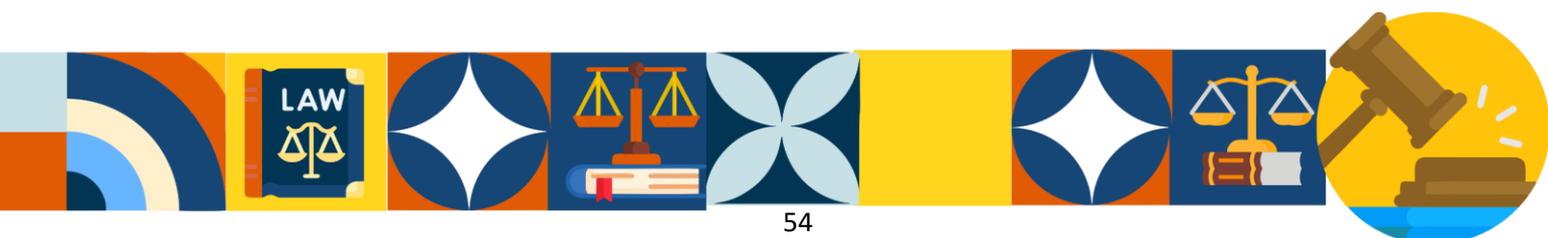
NO	KEGIATAN	TINDAK LANJUT	FOTO
12	Pertemuan koordinasi tindak lanjut terkait adanya OTT terhadap Oknum Syahbandar di Pelabuhan Perikanan Samudera Bitung	Tanggal 20 September 2022 telah dilaksanakan rapat koordinasi dalam rangka persiapan pemeriksaan saksi	
13	permintaan interview terkait hasil evaluasi pemanfaatan bantuan unit produksi pakan ikan (UPPI) Mandiri di Kabupaten Oku Timur dan Kabupaten Pasaman yang menggunakan APBN Tahun 2022	Pertemuan koordinasi permintaan interview terkait hasil evaluasi pemanfaatan bantuan unit produksi pakan ikan (UPPI) Mandiri di Kabupaten Oku Timur dan Kabupaten Pasaman yang menggunakan APBN Tahun 2022, berdasarkan Surat Ditreskrimsus Polda Metro Jaya, tanggal 30 Maret dan 29 September 2023	

IKU 6 Permasalahan Hukum di luar jalur pengadilan/nonlitigasi di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan yang Ditangani

**Tabel 8
Indikator Kinerja Utama 6**

SK-1 Tata Kelola Pemerintahan yang Baik di Bidang Penyiapan Produk Hukum KKP												
IKU-5 Permasalahan Hukum di luar jalur pengadilan/nonlitigasi di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan yang Ditangani												
Realisasi					Realisasi Tahun 2023				Renstra Setjen 2020-2024			
2018	2019	2020	2021	2022	Target	Realisasi	% Capaian	% kenaikan 2022-2023	Target 2023	% Capaian thd Target 2023	Target 2024	% Capaian thd Target 2024
-	-	-	-	-	100	100	100	-	-	-	-	-

Penyelenggaraan pemerintahan saat ini dihadapkan pada upaya mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, perlindungan dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, dan keadilan. Namun dalam pelaksanaan pemerintahan tersebut seringkali timbul perbedaan dan dissinkronisasi antara normatif dan kebijakan, bahkan berujung sampai dengan adanya gugatan di lembaga peradilan. Terhadap kondisi tersebut dan meningkatnya tugas dan fungsi Kementerian Kelautan dan Perikanan saat ini, faktanya berimplikasi





langsung terhadap institusi Kementerian Kelautan dan Perikanan, yaitu semakin banyak dan beragamnya permasalahan hukum yang harus dihadapi, antara lain masalah hukum di bidang pertanahan, kepegawaian, pengadaan barang dan jasa, pengelolaan barang milik negara (aset), perizinan usaha perikanan, dan masalah penyelenggaraan pemerintahan lainnya.

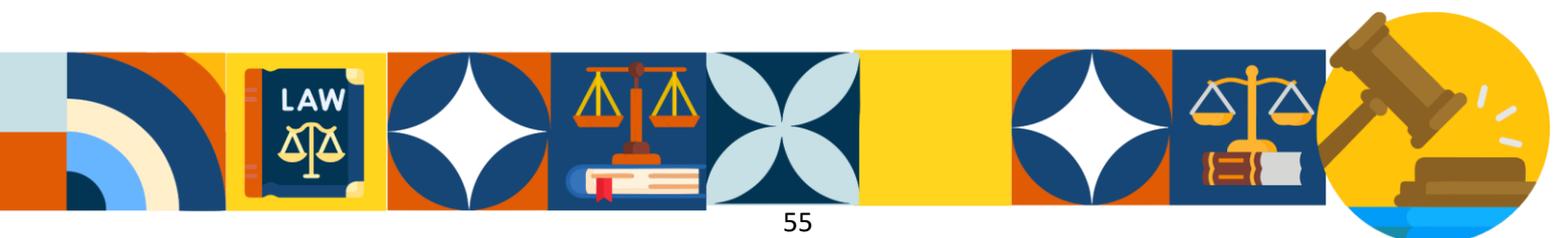
Sebagai upaya dan perwujudan dalam menjawab tantangan dan permasalahan hukum yang semakin kompleks tersebut, perlu dilakukan langkah-langkah penyelesaian yang tepat dan efisien, antara lain dalam bentuk telaahan dan kajian dari berbagai aspek, baik dari segi teknis maupun hukum (*legal opinion*) atau bahkan harus dilakukan pembelaan atau advokasi dengan melibatkan unit/instansi terkait lainnya. Sejalan dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 15 Tahun 2022 tentang Advokasi Hukum di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, diamanatkan kepada Biro Hukum, Sekretariat Jenderal bersama Bagian Hukum pada Sekretariat Direktorat Jenderal/Sekretariat Inspektorat Jenderal/Sekretariat Badan, Kementerian Kelautan dan Perikanan sebagai pemberi advokasi hukum dan memberikan pelayanan advokasi hukum (pemberian bantuan hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan) kepada pimpinan dan pegawai di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan yang aktif maupun purna tugas.

Permasalahan Hukum di luar jalur pengadilan/nonlitigasi terdiri dari

- a. melalui alternatif penyelesaian sengketa;
- b. melalui arbitrase;
- c. maladministrasi melalui Ombudsman Republik Indonesia;
- d. informasi publik melalui Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia; dan
- e. melalui lembaga nonyudisial lainnya.

Alternatif penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui

- a. konsultasi;
- b. negosiasi;
- c. mediasi;





- d. konsiliasi; atau
- e. penilaian ahli.

Pemberian Bantuan Hukum melalui arbitrase meliputi

- a. pembahasan sengketa;
- b. pembuatan dokumen legalitas dalam rangka pendampingan atau mewakili penerima Advokasi Hukum;
- c. pembuatan dokumen persidangan;
- d. penyiapan saksi dan/atau ahli; dan/atau
- e. pendampingan atau mewakili penerima Advokasi Hukum pada saat persidangan di lembaga arbitrase.

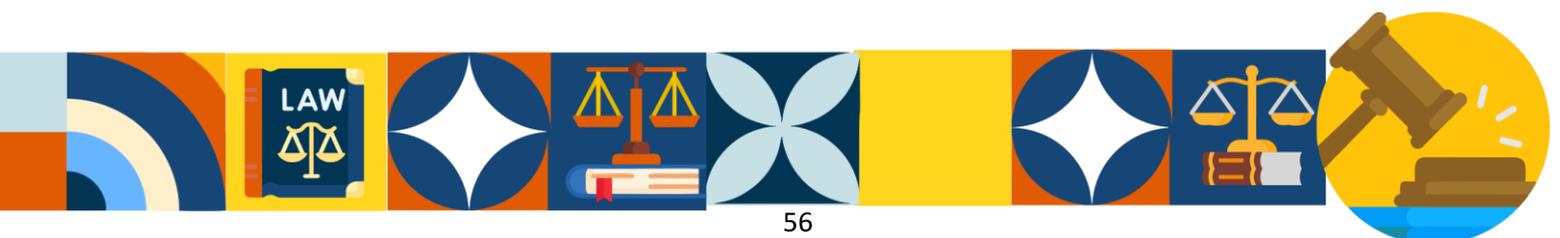
Pemberian Bantuan Hukum melalui Ombudsman meliputi:

- a. pembahasan laporan atas dugaan maladministrasi;
- b. pembuatan dokumen legalitas dalam rangka pendampingan atau mewakili penerima Advokasi Hukum;
- c. pembuatan dokumen pemeriksaan;
- d. penyiapan saksi dan/atau ahli; dan/atau
- e. pendampingan atau mewakili penerima Advokasi Hukum pada saat pemeriksaan di Ombudsman Republik Indonesia.

Pemberian Bantuan Hukum melalui Komisi Informasi Pusat meliputi:

- a. pendampingan dalam pemberian pelayanan informasi publik;
- b. pembahasan sengketa;
- c. pembuatan dokumen legalitas dalam rangka pendampingan atau mewakili penerima Advokasi Hukum;
- d. pembuatan dokumen persidangan;
- e. penyiapan saksi dan/atau ahli; dan/atau
- f. pendampingan atau mewakili penerima Advokasi Hukum pada saat persidangan di Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia.

Pemberian Bantuan melalui lembaga nonyudisial lainnya meliputi:





- a. pembahasan pengaduan atau laporan;
- b. pembuatan dokumen legalitas dalam rangka pendampingan atau mewakili penerima Advokasi Hukum;
- c. pembuatan dokumen pemeriksaan/persidangan;
- d. penyiapan saksi dan/atau ahli; dan/atau
- e. pendampingan atau mewakili penerima Advokasi Hukum pada saat pemeriksaan/persidangan di lembaga nonyudisial lainnya.

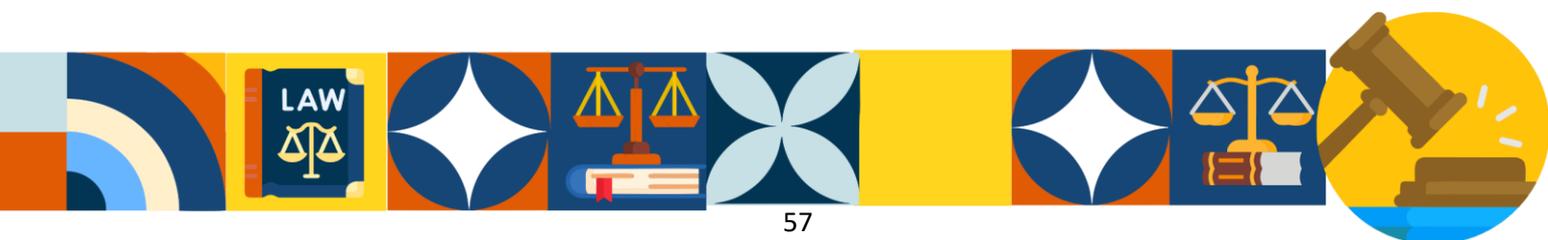
Perlu kami sampaikan bahwa berdasarkan praktek yang ada dari beberapa tahun sebelumnya jumlah permasalahan hukum di luar jalur pengadilan/nonlitigasi tidak sebanyak permasalahan hukum melalui jalur pengadilan/litigasi

Adapun tabel inventarisasi Permasalahan Hukum melalui jalur di luar pengadilan/nonlitigasi di yang ditangani

BULAN	PERMASALAHAN HUKUM MELALUI JALUR DILUAR PENGADILAN/NONLITIGASI	TOTAL
Januari	melalui alternatif penyelesaian sengketa;	1
Februari	melalui arbitrase;	-
Maret	maladministrasi melalui Ombudsman Republik Indonesia; informasi publik melalui Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia; dan melalui lembaga nonyudisial lainnya.	-
April	melalui alternatif penyelesaian sengketa;	1
Mei	melalui arbitrase;	1
Juni	maladministrasi melalui Ombudsman Republik Indonesia; informasi publik melalui Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia; dan melalui lembaga nonyudisial lainnya.	1
Juli	melalui alternatif penyelesaian sengketa;	-
Agustus	melalui arbitrase;	1
September	maladministrasi melalui Ombudsman Republik Indonesia; informasi publik melalui Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia; dan melalui lembaga nonyudisial lainnya.	-
Oktober	melalui alternatif penyelesaian sengketa;	-
November	melalui arbitrase;	-
Desember	maladministrasi melalui Ombudsman Republik Indonesia; informasi publik melalui Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia; dan melalui lembaga nonyudisial lainnya.	-

Rincian Permasalahan Hukum di luar jalur pengadilan/nonlitigasi

1. Permintaan Keterangan Komnas HAM dalam Pemberian Keterangan Aduan Reklamasi Pantai Minanga, Malalayang Satu, Manado oleh PT. TJ Silfanus;





2. Pembangunan Jalan/Turap Tanpa Izin oleh Pihak Lain di Lahan Tambak Kamal Muara Baru Jakarta;
3. Penyelesaian Ruislag Antara Kementerian Kelautan dan Perikanan Dengan PT. Semeru Cemerlang;
4. Pemutusan Kontrak dengan PT Barindo Prima Agung pada Paket Pekerjaan Jasa Pembangunan/Pengembangan/Rehabilitasi Di Pelabuhan Perikanan Lampulo, Provinsi Aceh TA 2023;
5. Penyampaian Laporan Evaluasi Kepatuhan Perjanjian PT. Hacienda Ocean Industries (PT.HOI) dalam pelaksanaan perpanjangan perjanjian penggunaan tanah nomor 1759/PPNK/PL.210/X/2019;

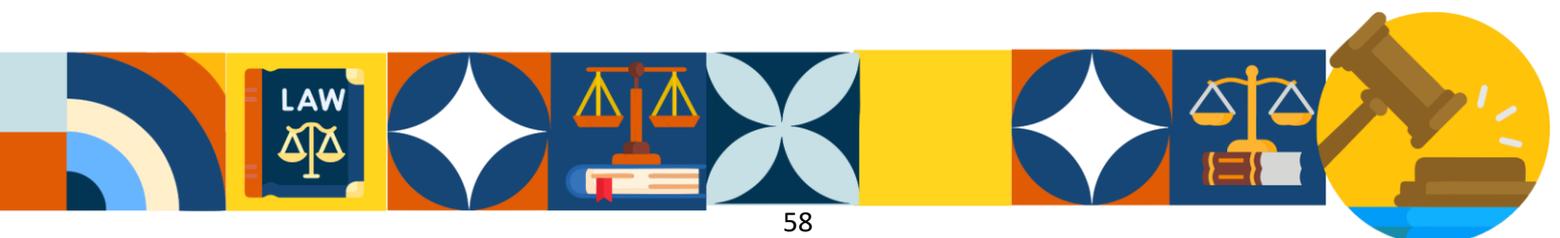
Berdasarkan persentase Permasalahan Hukum di luar jalur pengadilan/nonlitigasi di KKP, terdapat 5 (lima) permasalahan hukum dari target 5 (lima) permasalahan hukum, sehingga capaian dan telah ditangani, sehingga realisasi Indikator Kinerja Permasalahan Hukum Melalui di luar jalur pengadilan/nonlitigasi di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan yang Ditangani telah mencapai 100%.

IKU Permasalahan Hukum melalui Permasalahan Hukum di luar jalur pengadilan/nonlitigasi di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan yang Ditangani merupakan IKU Baru pada tahun 2023, berdasarkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 43 Tahun 2023 tentang Mekanisme Kerja untuk Penyederhanaan Birokrasi di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan Biro Hukum menjadi merubah tim kerja di Biro Hukum, sehingga IKU tersebut belum masuk pada Renstra 2020-2024 dan Renja 2023, namun telah diusulkan pada perubahan Restra 2024 dan Renja 2024.

A. Analisis penyebab keberhasilan dalam rangka tercapainya IKU

Beberapa upaya telah dilakukan untuk mendukung keberhasilan tercapainya IKU permasalahan hukum di luar jalur pengadilan/nonlitigasi yang tertangani adalah sebagai berikut

1. inventarisasi seluruh bukti-bukti terkait permasalahan hukum;





2. bedah kasus/gelar perkara dalam rangka tindak lanjut panggilan/pemeriksaan;
3. koordinasi dengan unit kerja terkait, pertemuan koordinasi, briefing calon saksi/tersangka yang akan diperiksa, dan simulasi tanya jawab perkara;
4. koordinasi dengan aparat penegak hukum guna melakukan penjadwalan yang bisa disepakati para pihak;
5. pendalaman materi baik tugas dan fungsi maupun kasus posisi permasalahan hukum.

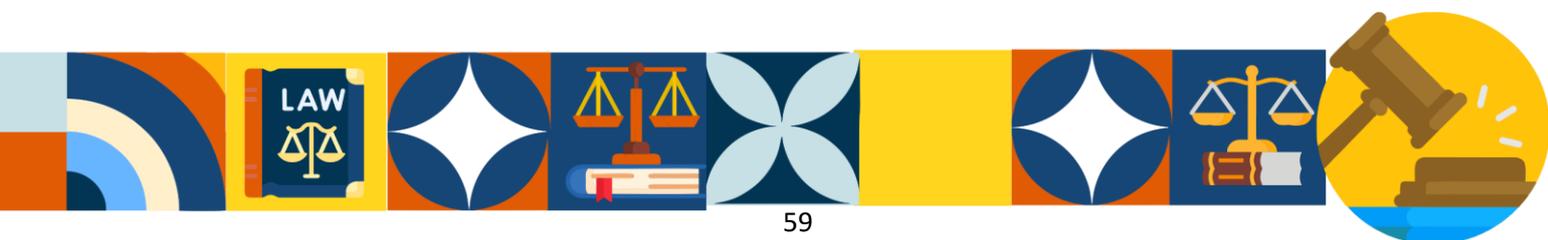
B. Penggunaan Anggaran yang Mendukung Indikator Kinerja

Dalam menunjang pencapaian indikator permasalahan hukum di luar jalur pengadilan/nonlitigasi yang tertangani dalam Kelompok Advokasi dan Bantuan Hukum didukung oleh 6 (enam) orang pegawai dan diperlukan biaya untuk dapat melaksanakan kegiatan demi mencapai *output* sesuai dengan tugas dan fungsi dari Biro Hukum. Biaya-biaya tersebut dituangkan pada Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA K/L) yang disusun 1 (satu) tahun sebelum pelaksanaan kerja dan anggaran dilaksanakan telah mencapai target yang ditentukan berdasarkan capaian kinerja dan realisasi anggaran sebesar Rp103.257.000 dari pagu Rp104.300.000.

C. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Berikut merupakan kegiatan yang telah dilakukan oleh Biro Hukum dalam rangka mencapai target permasalahan hukum di luar jalur pengadilan/nonlitigasi yang tertangani, yaitu

NO	KEGIATAN	TINDAK LANJUT	FOTO
1	Permintaan Keterangan oleh Komnas HAM terkait kepada Ditjen PRL dan Ditjen PSDKP terkait Aduan Reklamasi Pantai Minanga, Malalayang Satu, Manado oleh PT. TJ Silfanus	Pendampingan dalam Rangka Permintaan Keterangan Komnas HAM, tanggal 16 Januari 2023, di Kantor Komnas HAM	



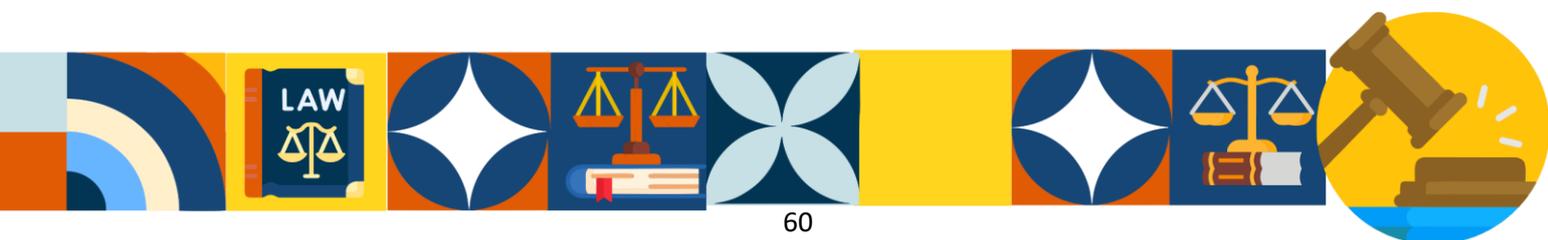


NO	KEGIATAN	TINDAK LANJUT	FOTO
2	Pembangunan Jalan Tanpa Izin oleh Pihak Lain di Lahan Tambak Kamal Muara Baru Jakarta.	Tanggal 24 Mei 2023 telah dilaksanakan finalisasi pemasangan patok pembatas secara permanen dengan melibatkan BPN Jakarta Utara dan satker terkait	
3	Penyampaian Laporan Evaluasi Kepatuhan Perjanjian PT. Hacienda Ocean Industries (PT.HOI) dalam pelaksanaan perpanjangan perjanjian penggunaan tanah nomor 1759/PPNK/PL.210/X/2019.	Tanggal 17 April 2023 telah dilakukan pendampingan hukum.	
4	Penyelesaian Ruislag Antara Kementerian Kelautan dan Perikanan Dengan PT. Semeru Cemerlang.	Tanggal 12 Agustus 2023 telah dilaksanakan Inventarisasi Asset Pengganti yang telah diterima Departemen Pertanian.	
5	Pemutusan Kontrak dengan PT Barindo Prima Agung pada Paket Pekerjaan Jasa Pembangunan/Pengembangan/Rehabilitasi di Pelabuhan Perikanan Lampulo, Provinsi Aceh TA 2023.	Pada tanggal 3 September 2023 telah dilaksanakan Pembahasan dan Penelaahan Rencana Pemutusan Kontrak dengan melibatkan Pokja Pengadaan dan pihak-pihak terkait.	

IKU 7 Perjanjian Nasional Bidang Kelautan dan Perikanan yang Siap untuk Ditandatangani

Tabel 9
Indikator Kinerja Utama 7

SK-1		Tata Kelola Pemerintahan yang Baik di Bidang Penyiapan Produk Hukum KKP											
IKU-5		Perjanjian Nasional Bidang Kelautan dan Perikanan yang Siap untuk Ditandatangani											
Realisasi					Realisasi Tahun 2023					Renstra Setjen 2020-2024			
2018	2019	2020	2021	2022	Target	Realisasi	% Capaian	% kenaikan 2022-2023	Target 2023	% Capaian thd Target 2023	Target 2024	% Capaian thd Target 2024	
-	-	-	-	-	100	109,09	109,09	-	-	-	-	-	

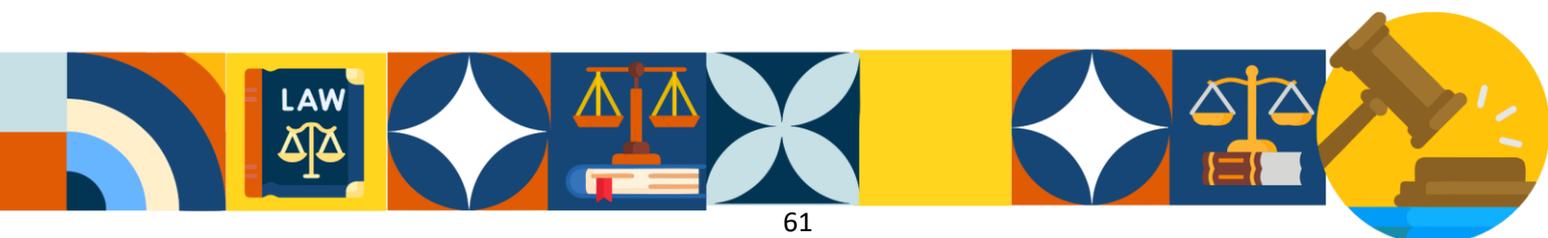




Perjanjian adalah kesepakatan atau pengikatan diri antara Kementerian Kelautan dan Perikanan dengan pihak lain untuk melakukan atau tidak melakukan suatu kegiatan tertentu di bidang kelautan dan perikanan, dengan bentuk dan nama tertentu, yang dituangkan secara tertulis serta menimbulkan hak dan kewajiban serta mengikat para pihak. Untuk meningkatkan tertib pelaksanaan kegiatan kerja sama dan penyusunan perjanjian, serta perubahan organisasi di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, penyusunan perjanjian di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan berpedoman ketentuan peraturan perundang-undangan, salah satunya Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 23 Tahun 2022 tentang Pedoman Kerja Sama dan Penyusunan Perjanjian di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Berdasarkan presentase perjanjian nasional yang siap untuk ditandatangani pada triwulan IV, terdapat 24 (dua puluh empat) dokumen *legal drafting* perjanjian dari target 22 (dua puluh dua) naskah perjanjian kerja sama yang telah ditindaklanjuti dan memperoleh masukan/tanggapan, sehingga capaian Indikator Kinerja Presentase Perjanjian Nasional yang Siap untuk Ditandatangani telah mencapai 109,09%.

1. Tabel Inventarisasi penyusunan konsep akhir naskah perjanjian nasional yang siap untuk ditandatangani

Bulan	Nota Kesepahaman/Nota Kesepakatan/Kesepakatan Bersama	Perjanjian Kerja Sama	Total
Januari	-	2	2
Februari	-	2	2
Maret	-	2	2
April	-	1	1
Mei	-	2	2
Juni	1	2	3
Juli	-	2	2
Agustus	1	1	2
September	1	1	2
Oktober	2	-	2
November	1	1	2
Desember	1	1	2

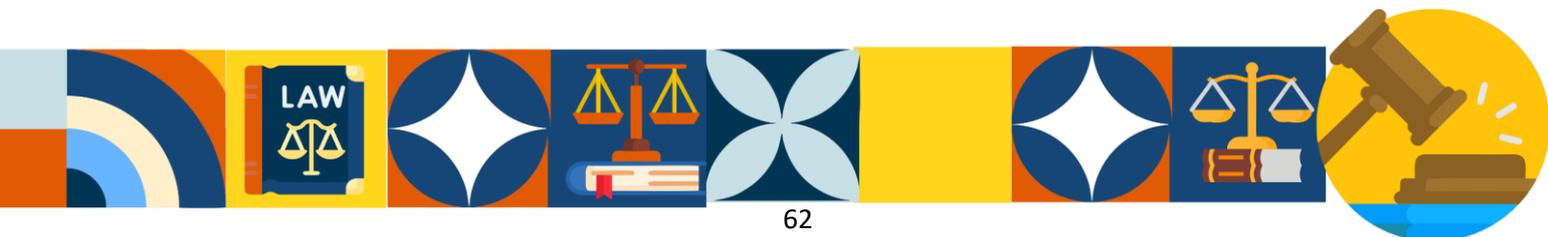




Bulan	Nota Kesepahaman/Nota Kesepakatan/Kesepakatan Bersama	Perjanjian Kerja Sama	Total
Total		24	

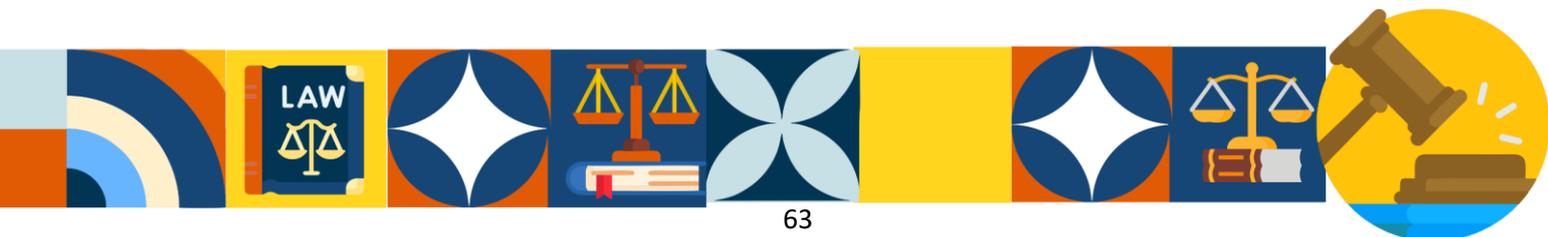
2. Rincian penyusunan konsep akhir naskah perjanjian nasional yang siap untuk ditandatangani

No	Jenis Kerja Sama	Para Pihak	Judul
1.	Perjanjian Kerja Sama	SKIPM Ternate dan FPIK Universitas Khairun Ternate	Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi di Bidang Penyakit Ikan, Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan
2.	Perjanjian Kerja Sama	KKP dan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan	Berbagi Pakai Data Dalam Rangka Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem di Sektor Kelautan dan Perikanan
3.	Perjanjian Kerja Sama	Biro Umum dan PBJ	Pemusnahan dokumen dalam rangka pengelolaan arsip di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan
4.	Kesepakatan Bersama	KKP dan Ikatan Alumni Universitas Diponegoro (IKA UNDIP)	Sinergitas Program Pembangunan Sektor Kelautan dan Perikanan
5.	Nota Kesepahaman	KKP dan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM)	Peningkatan Keamanan, Mutu, Manfaat, dan Daya Saing Obat dan Makanan Bersumber Dari Produk Kelautan dan Perikanan
6.	Kesepakatan Bersama	KKP dan PT BRI	Pemanfaatan Jasa dan Layanan Perbankan Dalam Peningkatan Ekonomi dan Sektor Kelautan dan Perikanan
7.	Perjanjian Kerja Sama	SKIPM Kendari dan Fakultas Pertanian, Perikanan, dan Peternakan Universitas Sembilanbelas November Kolaka	Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi di Bidang Penyakit Ikan, Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan
8.	Perjanjian Kerja Sama	SKIPM Kendari dan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas	Pengembangan Ilmu Pengetahuan di Bidang Penyakit Ikan, Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan





No	Jenis Kerja Sama	Para Pihak	Judul
		Muhamadiyah Kendari	
9.	Perjanjian Kerja Sama	SKIPM Palangka Raya dan Fakultas Pertanian Universitas Palangka Raya	Pengembangan Ilmu Pengetahuan di Bidang Penyakit Ikan, Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan
10.	Nota Kesepahaman	KKP dan Indonesia Ocean Justice Initiative	Pengembangan dan Pelaksanaan Kebijakan Pembangunan Ekonomi Kelautan yang Berkelanjutan dan Berkeadilan di Sektor Kelautan dan Perikanan
11.	Perjanjian Kerja Sama	Biro Humas dan Kerja Sama Luar Negeri (BHKLN) dan Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia (FIB UI)	Pengembangan Ilmu Pengetahuan di Bidang Kepustakawanan dan Literasi Dalam Rangka Mendukung Program Kelautan dan Perikanan
12.	Perjanjian Kerja Sama	Pusat Data, Statistik, dan Informasi (Pusdatin) dan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (BPJS Kesehatan)	Pengelolaan dan Integrasi Data Pelaku Usaha dan Pelaku Pendukung Sektor Kelautan dan Perikanan Dalam Rangka Mendukung Program Jaminan Kesehatan Nasional
13.	Perjanjian Kerja Sama	Biro Humas dan Kerja Sama Luar Negeri (BHKLN) dan PT Biznet Multimedia	Penyediaan dan Publikasi Konten Neptune TV pada Layanan Biznet
14.	Perjanjian Kerja Sama	Ditjen Perikanan Tangkap dan Fakultas Kelautan dan Perikanan Universitas Syiah Kuala	Dukungan Program Penangkapan Ikan Terukur dan Penataan Kampung Nelayan Maju Melalui Tri Dharma Perguruan Tinggi
15.	Kesepakatan Bersama	KKP dan Kementerian ATR/BPN	Sinergi Program Kelautan dan Perikanan dan Agraria/Pertanahan dan Tata Ruang
16.	Perjanjian Kerja Sama	Setjen KKP dan PT Pertamina Patra Niaga	Kolaborasi pemanfaatan data pelaku usaha sektor Kelautan dan perikanan dengan data program subsidi tepat Untuk mendukung pengendalian distribusi jenis bahan Bakar tertentu dan jenis bahan bakar khusus penugasan Untuk nelayan dan pembudi daya ikan
17.	Kesepakatan	KKP dan Universitas	Sinergi program kelautan dan perikanan



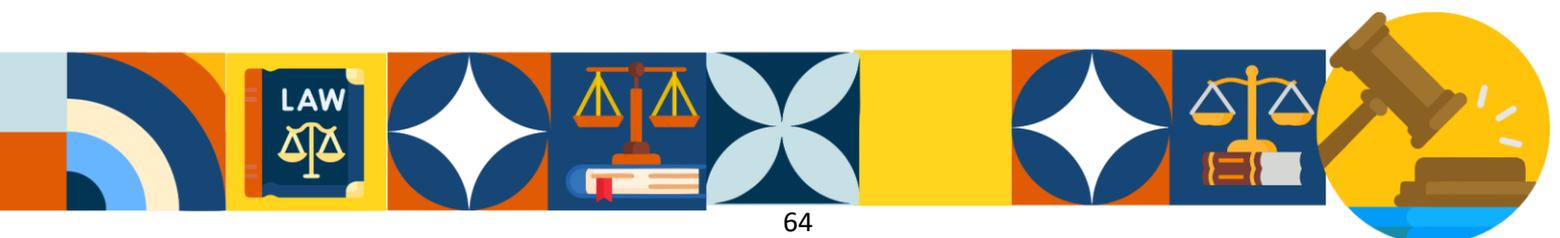


No	Jenis Kerja Sama	Para Pihak	Judul
	Bersama	Hasanudin	berbasis ekonomi Biru melalui tridarma perguruan tinggi
18.	Perjanjian Kerja Sama	Balai KIPM Surabaya II-FPIK Universitas Brawijaya	pengembangan dan penerapan ilmu pengetahuan di bidang pengendalian dan pengawasan mutu hasil kelautan dan perikanan
19.	Kesepakatan Bersama	KKP-BPKP	Penguatan tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan
20.	Kesepakatan Bersama	KKP-Kementerian Dalam Negeri	Sinergi pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang kelautan dan perikanan dan pemerintahan dalam negeri
21.	Kesepakatan Bersama	KKP-Kementan	Sinergi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Bidang Kelautan, Perikanan, dan Pertanian
22.	Kesepakatan Bersama	PDSPKP-PT Permodalan Nasional Madani	Sinergi Program Pemberdayaan Usaha Ultra Mikro Sektor Kelautan dan Perikanan
23.	Perjanjian Kerja Sama	PDSPKP-PT Persatuan Wanita Republik Indonesia	Optimalisasi pelaksanaan program gemarikan
24.	Kesepakatan Bersama	KKP-Universitas Syiah Kuala	Pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan yang berkelanjutan melalui penerapan tridarma perguruan tinggi

IKU Perjanjian Nasional Bidang Kelautan dan Perikanan yang Siap untuk Ditandatangani merupakan IKU Baru pada tahun 2023, berdasarkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 43 Tahun 2023 tentang Mekanisme Kerja untuk Penyederhanaan Birokrasi di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan Biro Hukum menjadi merubah tim kerja di Biro Hukum, sehingga IKU tersebut belum masuk pada Renstra 2020-2024 dan Renja 2023, namun telah diusulkan pada perubahan Restra 2024 dan Renja 2024.

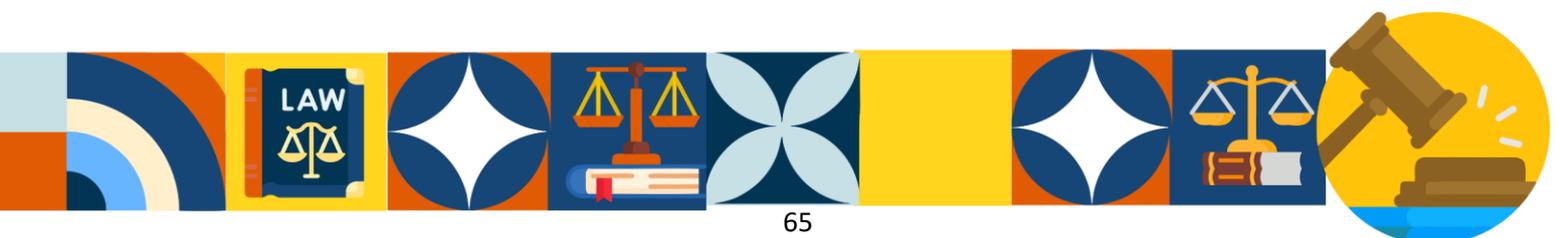
A. Analisis penyebab keberhasilan dalam rangka tercapainya IKU

beberapa upaya telah dilakukan untuk mendukung keberhasilan tercapainya IKU perjanjian nasional bidang kelautan dan perikanan yang siap untuk ditandatangani adalah sebagai berikut





- a) Mengikuti tahapan pelaksanaan dari pembuatan suatu naskah perjanjian nasional di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 23 Tahun 2022 tentang Pedoman Kerja Sama dan Penyusunan Perjanjian di Lingkungan KKP, sebagai berikut
 - 1) pelaksanaan inisiasi kerja sama antara pihak mitra dan pihak Kementerian Kelautan dan Perikanan (seluruh unit kerja eselon I di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, Biro Perencanaan, dan Biro Hukum);
 - 2) inisiasi kerja sama sebagaimana dimaksud pada huruf a disertai dengan pembahasan dengan memperhatikan kriteria calon mitra kerja sama antara lain
 - a) adanya kebutuhan yang sejalan dengan kepentingan nasional dan kebijakan strategis Kementerian;
 - b) memiliki kegiatan sejenis yang dapat dilakukan dengan unit kerja eselon I di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan;
 - c) dukungan sumber daya manusia yang memadai;
 - d) kepemilikan sarana dan prasarana; dan
 - e) teknologi.
 - b) apabila telah dilakukan inisiasi kerja sama dan pembahasan terkait rencana kerja sama yang dilakukan, Biro Perencanaan selaku unit kerja sama antarlembaga di lingkungan Sekretariat Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan mengirimkan memorandum kepada Biro Hukum dalam rangka permohonan untuk melakukan penyempurnaan dan finalisasi terhadap draf naskah perjanjian nasional;
 - c) dalam hal Kerja Sama ditindaklanjuti dalam bentuk pembuatan naskah perjanjian nasional, Biro Hukum melakukan telaah dan analisis terhadap draf





naskah perjanjian nasional dan melakukan penyiapan konsep akhir draf naskah perjanjian nasional; dan

- d) telaah yang dilakukan oleh Biro Hukum dilakukan dengan memperhatikan sistematika dan format naskah Perjanjian, serta kelaziman yang berlaku sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

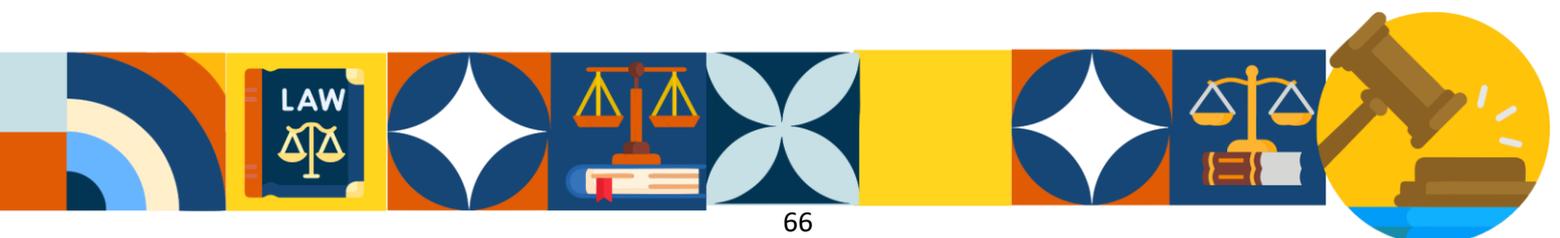
B. Penggunaan Anggaran yang Mendukung Indikator Kinerja

Dalam menunjang pencapaian indikator kinerja perjanjian nasional yang siap untuk ditandatangani dalam Kelompok Perjanjian dan Hukum Internasional didukung oleh 4 (empat) orang pegawai dan diperlukan biaya untuk dapat melaksanakan kegiatan demi mencapai *output* sesuai dengan tugas dan fungsi dari Biro Hukum. Biaya-biaya tersebut dituangkan pada Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA K/L) yang disusun 1 (satu) tahun sebelum pelaksanaan kerja dan anggaran dilaksanakan. telah mencapai target yang ditentukan berdasarkan capaian kinerja dan realisasi anggaran sebesar Rp.464.732.807,- dari target Rp.464.802.000,- (dihitung dari keseluruhan jumlah anggaran penyusunan perjanjian nasional di bidang kelautan dan perikanan Tahun 2023 dikurangi *automatic adjustment* penyusunan perjanjian nasional di bidang kelautan dan perikanan Tahun 2023). Terdapat selisih dari target sebesar Rp.69.193,- dikarenakan selisih perencanaan anggaran yang menggunakan PAGU dengan realisasi yang menyesuaikan dengan pengeluaran.

C. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Berikut merupakan kegiatan yang telah dilakukan oleh Biro Hukum dalam rangka tercapainya IKU perjanjian nasional yang siap untuk ditandatangani adalah sebagai berikut

- 1) pada tanggal 11 Januari 2023, telah diselenggarakan rapat pembahasan Adendum Perjanjian Kerja Sama antara Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan Ternate (SKIPM Ternate) dengan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Khairun Ternate (FPIK Universitas Khairun Ternate) yang diselenggarakan di Swiss-Belhotel, Bogor dan secara daring melalui aplikasi zoom cloud meeting. Rapat pembahasan





dipimpin oleh Koordinator Bidang Hukum Laut dan Perjanjian dan dihadiri oleh Koordinator Hukum, Kerja Sama, dan Humas Sekretariat (BKIPM), Kepala SKIPM Ternate, Dekan FPIK Universitas Khairun Ternate, serta perwakilan Biro Perencanaan dan Biro Hukum



- 2) rapat telah diselenggarakan pada hari Kamis, tanggal 12 Januari 2023, di Swiss-Belhotel, Bogor dan secara daring melalui aplikasi *zoom cloud meeting* yang dipimpin oleh Kepala Biro Hukum dan dihadiri oleh Kepala Biro Hukum, Persidangan, Organisasi dan Komunikasi, Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK), perwakilan dari Kemenko PMK, Sekretariat Ditjen. Perikanan Budidaya, Pusat Data, Statistik, dan Informasi (Pusdatin), Biro Perencanaan, dan Biro Hukum;



- 3) pada tanggal pada tanggal 9 Februari 2023, telah diselenggarakan rapat rancangan perpanjangan Nota Kesepahaman antara Kementerian Kelautan dan Perikanan dengan Kementerian Dalam Negeri yang dipimpin oleh Perancang Perundang-Undangan Ahli Madya selaku Koordinator Kelompok Hukum Laut Internasional dan Perjanjian pada Biro Hukum dan dihadiri oleh Perancang Perundang-Undangan Ahli Utama pada Biro Hukum, Sekretaris Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri, Kementerian Dalam Negeri, perwakilan Kementerian Dalam Negeri dan KKP (Ditjen PT, Ditjen PB, Ditjen PDSPKP, Ditjen PRL, Itjen, Biro Perencanaan, dan Biro Hukum);





- 4) pada tanggal 7 Juni 2023, telah diselenggarakan rapat di Savero Style Hotel Bogor yang dipimpin oleh Ketua Tim Pokja Perjanjian dan Hukum Laut Internasional bersama dengan Wakil Dekan I Bidang Akademik dan Kemahasiswaan (FIB UI), dan Perencana Muda di Biro Perencanaan, serta dihadiri oleh perwakilan dari FIB UI, BHKLN, Biro Perencanaan, dan Biro Hukum



- 5) pada tanggal 27 Juni 2023, telah diselenggarakan rapat pembahasan draf Perjanjian Kerja Sama antara BHKLN dan PT Biznet di Swiss-Belhotel, Bogor yang dipimpin oleh Ketua Tim Pokja Perjanjian dan Hukum Laut Internasional (Biro Hukum) dan dihadiri oleh perwakilan dari PT Biznet Multimedia, BHKLN, Biro Perencanaan, dan Biro Hukum





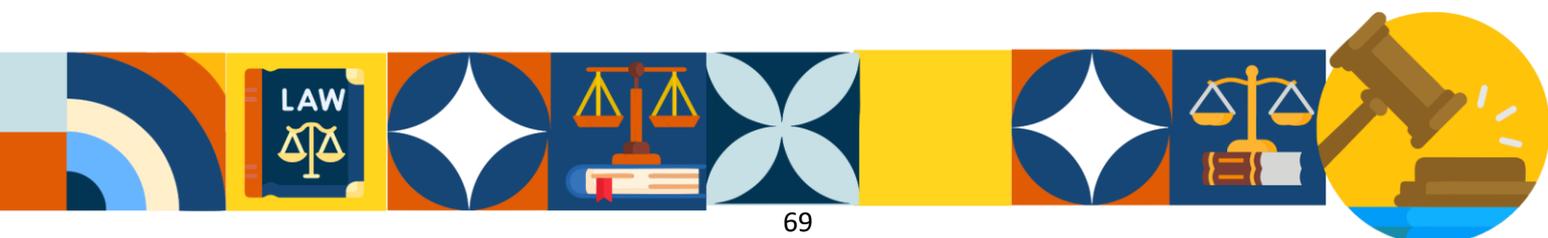
- 6) pada tanggal 12 Juli 2023, telah diselenggarakan rapat pembahasan draf Nota Kesepahaman antara Kementerian Kelautan dan Perikanan dengan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional di Hotel Oria, Jakarta, berdasarkan undangan Kepala Biro Hukum, Nomor B.416/SJ.4/TU.330/VII/2023, tanggal 8 Juli 2023, hal Undangan Rapat yang dihadiri oleh perwakilan dari Kementerian ATR/BPN dan KKP (Ditjen Perikanan Tangkap, Ditjen Perikanan Budidaya, Ditjen Pengelolaan Ruang Laut, Inspektorat Jenderal, Biro Perencanaan, dan Biro Hukum);



- 7) pada tanggal 25 Agustus 2023, telah diselenggarakan rapat pembahasan draf Perjanjian Kerja Sama antara Balai KIPM Surabaya II dan beberapa fakultas dari Universitas yang ada di Malang dan Surabaya di *the Shalimar Boutique Hotel* Malang yang dipimpin oleh Kepala Biro Hukum dan dihadiri oleh perwakilan dari Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan (FPIK) Universitas Brawijaya, Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan (FPIK) Universitas Airlangga, dan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (FMIPA) Universitas Negeri Surabaya, BKIPM (Sekretariat BKIPM dan Balai KIPM Surabaya II) Biro Perencanaan, dan Biro Hukum



- 8) pada tanggal 21 Agustus 2023, telah diselenggarakan rapat pembahasan draf Kesepakatan Bersama antara KKP dan BPKP di Hotel Oria Jakarta yang





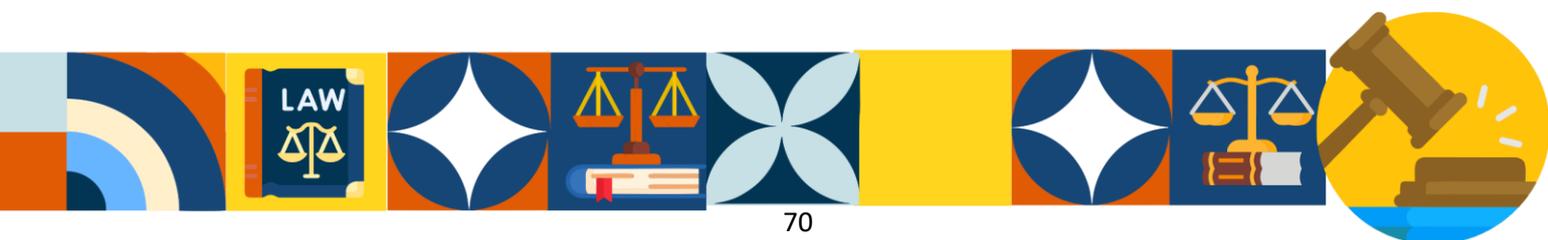
dipimpin oleh Ketua Tim Kerja Sama dan Antar Lembaga dihadiri oleh perwakilan dari BPKP dan KKP (Ditjen PT, Ditjen PB, Ditjen PRL, Ditjen PDSPKP, Itjen, BRSDMKP, BKIPM, Pusdatin, Biro Perencanaan, dan Biro Hukum);



- 9) pada tanggal 4 September 2023 telah diselenggarakan pembahasan draf adendum Kesepakatan Bersama antara KKP dan Kementan yang dipimpin oleh Ketua Tim Kerja Perjanjian dan Hukum Internasional dan dihadiri oleh perwakilan dari Kementan dan KKP (Ditjen PT, Ditjen PB, Ditjen PDSPKP, Ditjen PRL, Itjen, BKIPM, Biro Perencanaan, dan Biro Hukum);



- 10) pada tanggal 21 September 2023, telah diselenggarakan rapat penyusunan draf Nota Kesepahaman antara KKP dan Kementerian Dalam Negeri yang dipimpin oleh Analis Hukum di Lingkungan Biro Hukum bersama dengan Kepala Bidang Kerja Sama Dalam Negeri, Pusat Fasilitasi Kerja Sama (Kementerian Dalam Negeri) dan dihadiri oleh perwakilan dari Kementerian Dalam Negeri dan KKP (Ditjen PT, Ditjen PB, Ditjen PRL, Ditjen PDSPKP, Itjen, BRSDMKP, BKIPM, Pusdatin, Biro Perencanaan, dan Biro Hukum);



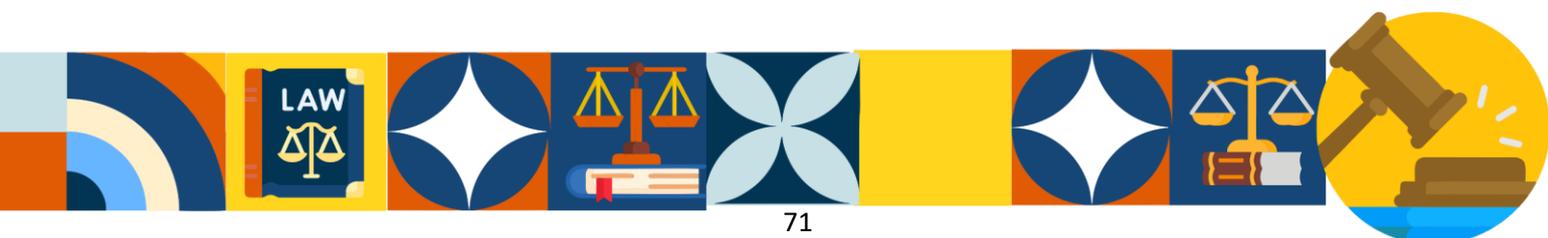


IKU 8 Instrumen Hukum Internasional Bidang Kelautan dan Perikanan yang Diberikan Pertimbangan Hukum

**Tabel 10
Indikator Kinerja Utama 8**

SK-1 Tata Kelola Pemerintahan yang Baik di Bidang Penyiapan Produk Hukum KKP													
IKU-5 Instrumen Hukum Internasional Bidang Kelautan dan Perikanan yang Diberikan Pertimbangan Hukum													
Realisasi					Realisasi Tahun 2023				Renstra Setjen 2020-2024				
2018	2019	2020	2021	2022	Target	Realisasi	% Capaian	% kenaikan 2022-2023	Target 2023	% Capaian thd Target 2023	Target 2024	% Capaian thd Target 2024	
-	-	-	-	-	100	120	120	-	-	-	-	-	

Dalam penyelenggaraan pemerintahan untuk melaksanakan tugas dan fungsi, Kementerian Kelautan dan Perikanan perlu melakukan kerja sama dan apabila diperlukan membuat perjanjian internasional dalam rangka mendukung program prioritas yang ditetapkan. Pelaksanaan kegiatan kerja sama dan pembuatan perjanjian tersebut dapat dilakukan dengan membuat perjanjian dengan pihak lain yang bersifat publik dengan negara lain maupun organisasi internasional. Perjanjian Internasional adalah perjanjian, dalam bentuk dan nama tertentu, yang diatur dalam hukum internasional yang dibuat secara tertulis serta menimbulkan hak dan kewajiban di bidang hukum publik. Untuk meningkatkan tertib pelaksanaan kegiatan kerja sama dan penyusunan perjanjian, serta perubahan organisasi di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, penyusunan perjanjian di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan berpedoman ketentuan peraturan perundang-undangan, salah satunya Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 23 Tahun 2022 tentang Pedoman Kerja Sama dan Penyusunan Perjanjian di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Berdasarkan presentase perjanjian internasional dan instrumen hukum internasional bidang kelautan dan perikanan yang diberikan pertimbangan hukum hingga triwulan IV, terdapat 12 (dua belas) konsep naskah perjanjian internasional dari target 10 (sepuluh) konsep naskah perjanjian internasional bidang kelautan dan perikanan pada triwulan IV

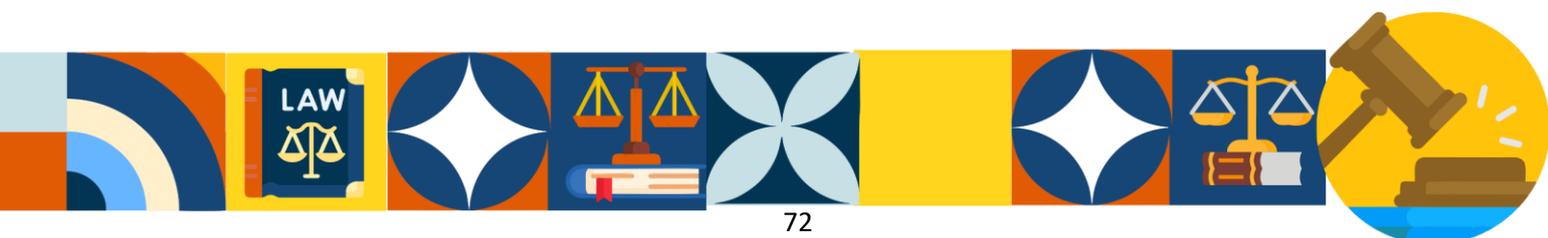




yang telah diberikan pertimbangan hukum, sehingga capaian Indikator Kinerja Pesentase Perjanjian Internasional dan Instrumen Hukum Internasional Bidang Kelautan dan Perikanan yang Diberikan Pertimbangan Hukum telah mencapai 120%.

Rincian penyusunan konsep naskah perjanjian internasional bidang kelautan dan perikanan yang telah diberikan pertimbangan hukum, dalam hal ini antara Kementerian Kelautan dan Perikanan sebagai perwakilan Pemerintah Indonesia dengan pemerintah negara lain atau organisasi internasional, sebagai berikut

No	Konsep naskah perjanjian	Para Pihak	Keterangan	Bulan
1.	<i>Implementing Arrangement</i>	KKP dan <i>The Food and Agriculture Organization of the United Nations</i>	<i>Sustainable Management of the Bay Bengal Large Marine Ecosystem Phase II</i>	Januari 2023
2.	<i>Technical Cooperation Agreement</i>	Ditjen Perikanan Tangkap dan <i>The Agence Française de Développement</i>	<i>Technical Assistance on Gender Related Issues, Design and Support on the Implementation of Gender Action Plan at Eco Fishing Ports Locations</i>	Februari 2023
3.	<i>Grant Implementation Agreement</i>	Kementerian Kelautan dan Perikanan dan USAID	<i>Marine and Fisheries Portfolio</i>	April 2023
4.	<i>Counterdraft Confidentiality Commitment</i>	Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan dengan <i>the United States Food and Drugs Administration</i>	<i>Commitment Not To Publicly Disclose Non-Public Information</i>	April 2023
5.	<i>Second Addendum to Implementing Arrangement</i>	Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan dan <i>Korea Maritime and Ocean University</i>	<i>the Establishment of Marine and Fisheries Scientific and Technical Cooperation</i>	Mei 2023
6.	<i>Amendment Implementing Arrangement</i>	Kementerian Kelautan dan Perikanan dan <i>The Food and Agriculture Organization</i>	<i>Project on "Mainstreaming Biodiversity Conservation and Sustainable Use into Inland Fisheries Practices in Freshwater Ecosystems of High Conservation Value"</i>	Agustus 2023
7.	<i>Memorandum of Understanding</i>	Pemerintah Indonesia dengan Afrika Selatan	<i>Fisheries Cooperation</i>	Agustus 2023
8.	<i>Implementing Arrangement</i>	Kementerian Kelautan dan Perikanan Indonesia dengan Kementerian Sumber Daya Alam, Tiongkok	<i>Fisheries Cooperation</i>	September 2023
9.	<i>Memorandum of Understanding</i>	Menteri Pertanian Pembangunan Pedesaan Viet Nam dan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia	<i>Fisheries Cooperation</i>	September 2023
10.	<i>Technical Arrangement</i>	Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut dan <i>University of Flinders Australia</i>	Pencatatan dan Kajian Sejarah Warisan Budaya Bawah Air Indonesia	Oktober 2023
11.	<i>Plan of Action</i>	KKP dan <i>the Ministry of Climate Change and Environment of the United Arab Emirates</i>	<i>Marine and Fisheries Cooperation</i>	November 2023





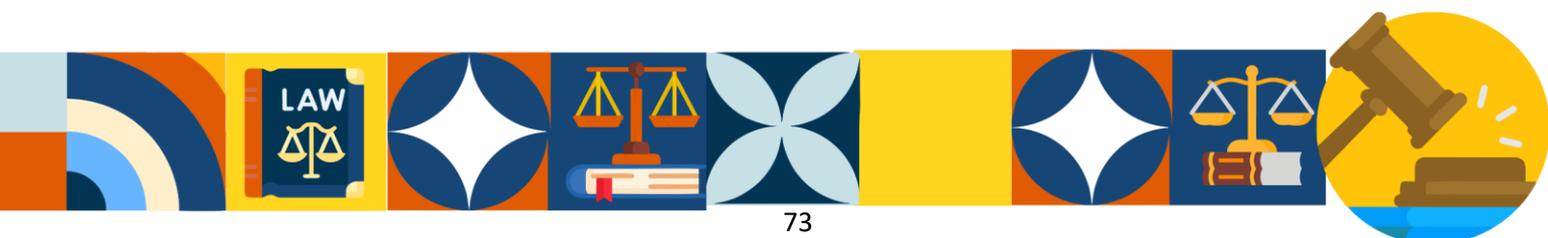
No	Konsep naskah perjanjian	Para Pihak	Keterangan	Bulan
12.	<i>Implementing Arrangement</i>	KKP dan <i>The Food and Agriculture Organization of the United Nations</i>	<i>Sustainable Management of the Bay Bengal Large Marine Ecosystem Phase II</i>	Desember 2023

IKU Instrumen Hukum Internasional Bidang Kelautan dan Perikanan yang Diberikan Pertimbangan Hukum merupakan IKU Baru pada tahun 2023, berdasarkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 43 Tahun 2023 tentang Mekanisme Kerja untuk Penyederhanaan Birokrasi di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan Biro Hukum menjadi merubah tim kerja di Biro Hukum, sehingga IKU tersebut belum masuk pada Renstra 2020-2024 dan Renja 2023, namun telah diusulkan pada perubahan Restra 2024 dan Renja 2024.

A. Analisis penyebab keberhasilan dalam rangka tercapainya IKU

Beberapa upaya telah dilakukan untuk mendukung keberhasilan tercapainya IKU perjanjian internasional dan instrumen hukum internasional bidang kelautan dan perikanan yang diberikan pertimbangan hukum adalah sebagai berikut

1. melakukan rapat pembahasan dengan Biro Perencanaan dan/atau Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Luar Negeri dimana pada rapat pembahasan tersebut juga mengundang unit kerja eselon I di KKP atau kementerian/lembaga lain untuk mengakomodasi masukan terkait permohonan audiensi kerja sama yang berasal dari pihak mitra;
2. melakukan rapat pembahasan dengan Biro Perencanaan, Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Luar Negeri, dan/atau unit kerja eselon I untuk menindaklanjuti pembahasan awal yang telah dilakukan dengan mengundang pihak mitra pengusul kerja sama tersebut. Pada rapat tersebut dilakukan penyamaan persepsi antara pihak mitra dengan KKP terkait tujuan kerja sama, tanggung jawab masing-masing pihak, dan ketentuan lain yang perlu diatur sesuai dengan kesepakatan para pihak dan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
3. melakukan pembahasan dengan kementerian atau lembaga terkait diantaranya adalah Kementerian Perdagangan, Kementerian Luar Negeri,





atau Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi terkait dengan posisi Indonesia dalam perundingan atau perjanjian internasional yang sedang dalam tahapan negosiasi.

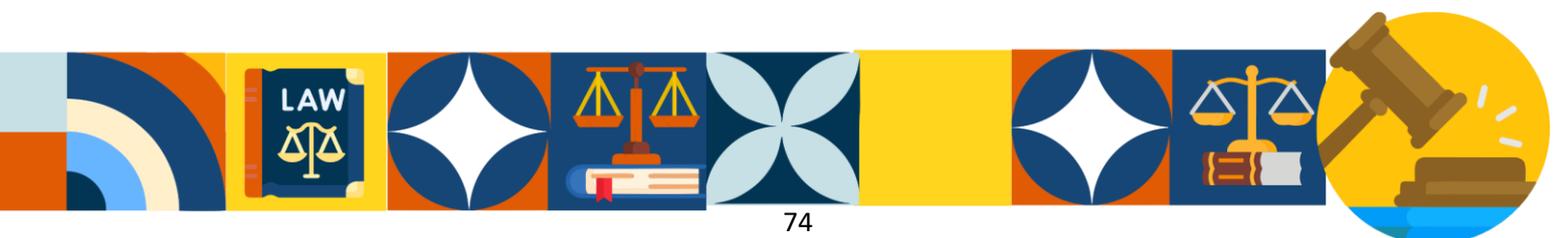
B. Penggunaan Anggaran yang Mendukung Indikator Kinerja

Dalam menunjang pencapaian indikator kinerja perjanjian internasional dan instrumen hukum internasional bidang kelautan dan perikanan yang telah diberikan pertimbangan hukum, dalam Tim Kerja Perjanjian dan Hukum Internasional didukung oleh 4 (empat) orang pegawai dan diperlukan biaya untuk dapat melaksanakan kegiatan demi mencapai *output* sesuai dengan tugas dan fungsi dari Biro Hukum. Biaya-biaya tersebut dituangkan pada Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA K/L) yang disusun 1 (satu) tahun sebelum pelaksanaan kerja dan anggaran dilaksanakan. telah mencapai target yang ditentukan berdasarkan capaian kinerja dan realisasi anggaran perjanjian internasional dan hukum internasional di bidang kelautan dan perikanan Rp.1.025.010.311,- dari target Rp.1.027.393.000,- (dihitung dari keseluruhan jumlah anggaran penyusunan perjanjian dan pelaksanaan hukum laut internasional di bidang kelautan dan perikanan Tahun 2023 dikurangi *automatic adjustment* penyusunan perjanjian dan pelaksanaan hukum internasional di bidang kelautan dan perikanan Tahun 2023). Terdapat selisih dari target sebesar Rp.2.382.689,- dikarenakan selisih perencanaan anggaran yang menggunakan PAGU dengan realisasi yang menyesuaikan dengan pengeluaran.

C. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Berikut merupakan kegiatan yang telah dilakukan oleh Biro Hukum dalam rangka tercapainya IKU perjanjian internasional bidang kelautan dan perikanan yang telah diberikan pertimbangan hukum

- 1) pertemuan *World Trade Organization-Fish Week Kluster keempat*, 10-14 Juli 2023, di Jenewa Swiss, yang dihadiri oleh perwakilan negara anggota WTO, dengan Indonesia dihadiri oleh perwakilan PTRI Jenewa dan KKP (Dit.





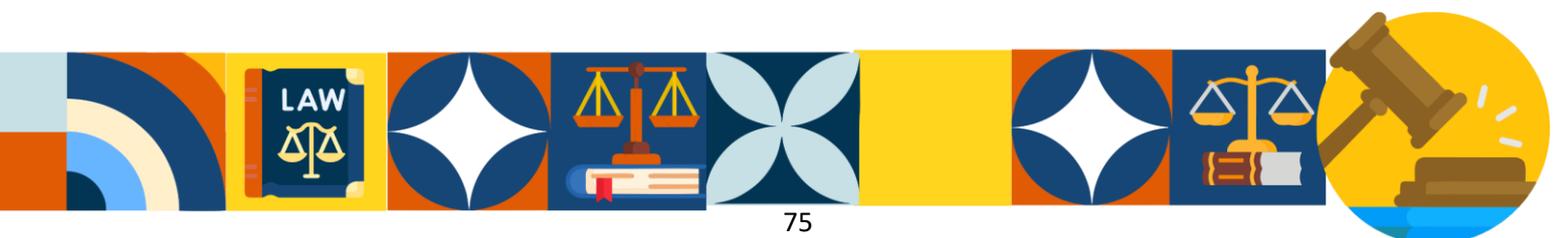
Pengelolaan Sumber Daya Ikan, Biro Perencanaan, Biro Humas dan Kerja Sama Luar Negeri, dan Biro Hukum)



- 2) rapat pembahasan rencana pengesahan terhadap *Cape Town Agreement* 2012 (CTA 2012), tanggal 18 Juli 2023, di Ruang Rapat Biro Hukum, dipimpin oleh Ketua Tim Kerja Perjanjian dan Hukum Internasional dan dihadiri oleh perwakilan dari Setditjen Perikanan Tangkap, Dit. Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan, Dit. Kepelabuhanan Perikanan, Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Luar Negeri, dan Biro Hukum



- 3) rapat pembahasan rencana pengesahan terhadap *Cape Town Agreement* 2012 (CTA 2012), tanggal 27-28 Juli 2023, di The Swiss-Belhotel Bogor, dipimpin oleh Ketua Tim Kerja Perjanjian dan Hukum Internasional dan dihadiri oleh perwakilan dari Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Kementerian Sekretariat Negara, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Perhubungan, dan KKP (Dit.





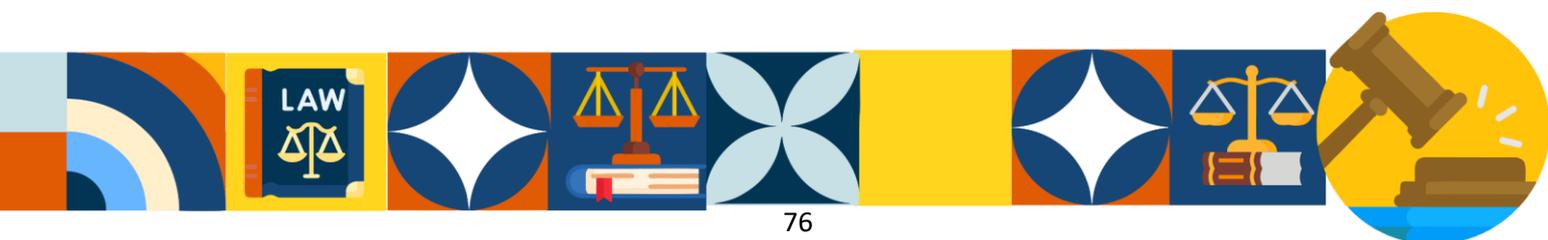
Pengelolaan Sumber Daya Ikan, Dit. Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan, Dit. Kepelabuhanan Perikanan, Dit Perizinan dan Kenelayan, Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Luar Negeri, dan Biro Hukum)



- 4) rapat tindak lanjut pembahasan Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Perairan Pedalaman, tanggal 14-16 Agustus 2023, di The Manohara Hotel Yogyakarta, yang dibuka dan dipimpin oleh Kepala Biro Hukum, dan dihadiri oleh Plt. Direktur Perencanaan Ruang Laut, Asisten Menteri Bidang Planologi Pengelolaan Ruang Laut, perwakilan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Perhubungan, Badan Informasi Geospasial, Pusat Hidrografi dan Oseanografi TNI Angkatan Laut, Universitas Indonesia, Universitas Gadjah Mada, dan KKP (Setditjen Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut, Setditjen Perikanan Tangkap, Setditjen Perikanan Budidaya, Dit. Kepelabuhanan Perikanan, Dit. Pengelolaan Sumber Daya Ikan, Dit. Kawasan dan Kesehatan Ikan, dan Biro Hukum)



- 5) rapat pembahasan tindak lanjut Peraturan Perundang-undangan tentang Perairan Pedalaman, tanggal 31 Agustus 2023, di Ruang Rapat Biro Hukum, yang dibuka dan dipimpin oleh Kepala Biro Hukum, dan dihadiri oleh Setditjen Pengelolaan Ruang Laut, Dit. Perencanaan Ruang Laut, Setditjen Perikanan Tangkap, Dit. Kepelabuhanan Perikanan, Dit. Pengelolaan Sumber Daya





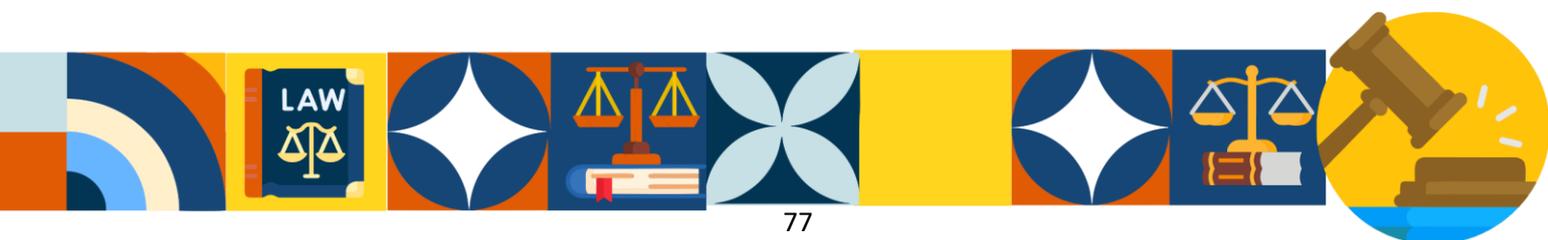
Ikan, Setditjen Perikanan Budidaya, Dit. Kawasan dan Kesehatan Ikan, dan Biro Hukum



- 6) rapat pembahasan rencana penandatanganan Perjanjian *Biodiversity Beyond National Jurisdiction*, tanggal 1 September 2023, di Ruang Rapat Biro Hukum, yang dipimpin oleh Ketua Tim Kerja Perjanjian dan Hukum Internasional, dan dihadiri oleh Setditjen Pengelolaan Ruang Laut, Dit. Perencanaan Ruang Laut, Dit. Konservasi dan Keanekaragaman Hayati Laut, Setditjen Perikanan Tangkap, Biro Humas dan Kerja Sama Luar Negeri, dan Biro Hukum



- 7) *Focus Group Discussion* Hasil Perundingan Delimitasi Batas Maritim dan Peta Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia, tanggal 15 September 2023, di Hotel Aryaduta, diawali dengan laporan kegiatan oleh Kepala Biro Hukum, dibuka oleh Staf Khusus Menteri Kelautan dan Perikanan Bidang Hubungan Luar Negeri, dan dihadiri oleh perwakilan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Badan Informasi Geospasial, Pushidrosal, dan KKP (Setditjen Pengelolaan Ruang Laut, Dit. Perencanaan Ruang Laut, Setditjen Perikanan Tangkap, Dit. Pengelolaan Sumber Daya Ikan, Setditjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, Dit.





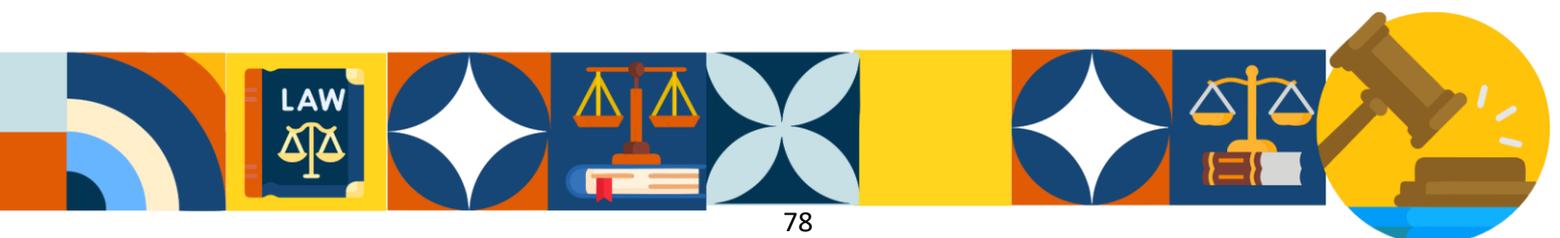
Penanganan Pelanggaran, Dit. Pemantauan dan Operasi Armada, Setitjen, Biro Humas dan Kerja Sama Luar Negeri, dan Biro Hukum)



- 8) rapat pembahasan *Fisheries Subsidies Agreement (FSA)*, tanggal 19-20 September 2023, di Grand Savero Hotel Bogor yang dipimpin oleh Ketua Tim Kerja Perjanjian dan Hukum Internasional, dan dihadiri oleh perwakilan Kementerian Luar Negeri, Kementerian Perdagangan, dan KKP (Setditjen Perikanan Tangkap, Dit. Pengawasan Sumber Daya Perikanan, Biro Humas dan Kerja Sama Luar Negeri, dan Biro Hukum)



- 9) rapat pembahasan Konsep Naskah *Arrangement concerning Cooperation on Lobster Aquaculture Development*, pada tanggal 3 Oktober 2023, di Ruang Rapat Biro Hukum, yang dipimpin oleh Ketua Tim Kerja Perjanjian dan Hukum Internasional, dan dihadiri oleh perwakilan Setditjen Pengelolaan Ruang Laut, Setditjen Perikanan Budidaya, Dit. Pengelolaan Sumber Daya Ikan, Dit. Perbenihan, Dit. Pakan dan Obat Ikan, Set. Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan, Pusat Karantina Ikan, BBAP Situbonodo, BBPBAP Jepara, BLUPPB Karawang, Biro Keuangan, BHKLN, dan Biro Hukum

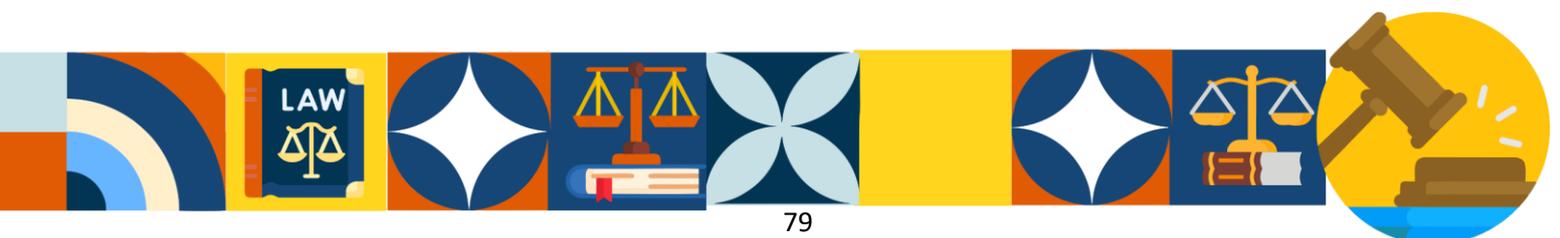




- 10) rapat Pembahasan Konsep Naskah Amendemen *Grant Agreement* GEF 6 Indonesia, pada tanggal 27 Oktober 2023, di Ruang Rapat Baronang, yang dipimpin oleh Ketua Tim Kerja Perjanjian dan Hukum Internasional, dan dihadiri oleh perwakilan Setditjen Perikanan Tangkap, Dit. Pengelolaan Sumber Daya Ikan, Setitjen, Inspektorat II, Biro Perencanaan, BHKLN, dan Biro Hukum



- 11) rapat Pembahasan Kertas Posisi dalam Negosiasi Fisheries Subsidies Agreement, pada tanggal 30 Oktober 2023, di Ruang Rapat BHKLN, yang dipimpin oleh Ketua Tim Kerja Perjanjian dan Hukum Internasional, dan dihadiri oleh perwakilan Setditjen Perikanan Tangkap, Dit. Pengelolaan Sumber Daya Ikan, Dit. Pemasaran, BHKLN, dan Biro Hukum





12) pertemuan *World Trade Organization-Fish Week Kluster ketujuh*, 6-10 November 2023, di Jenewa Swiss, yang dihadiri oleh perwakilan negara anggota WTO, dengan Indonesia dihadiri oleh perwakilan PTRI Jenewa dan KKP (Dit. Pengelolaan Sumber Daya Ikan, Biro Perencanaan, Biro Humas dan Kerja Sama Luar Negeri, dan Biro Hukum)

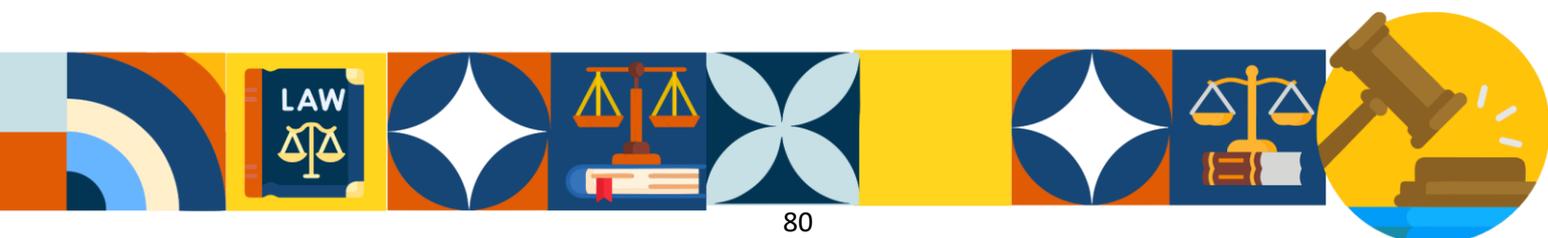


IKU 8 Nilai Kinerja Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Kementerian Kelautan dan Perikanan

**Tabel 11
Indikator Kinerja Utama 8**

SK-1		Tata Kelola Pemerintahan yang Baik di Bidang Penyiapan Produk Hukum KKP											
IKU-5		Instrumen Hukum Internasional Bidang Kelautan dan Perikanan yang Diberikan Pertimbangan Hukum											
Realisasi					Realisasi Tahun 2023				Renstra Setjen 2020-2024				
2018	2019	2020	2021	2022	Target	Realisasi	% Capaian	% kenaikan 2022-2023	Target 2023	% Capaian thd Target 2023	Target 2024	% Capaian thd Target 2024	
-	-	-	80	89	91	98	107,69	18,69	-	-	-	-	

Penyediaan informasi publik secara akurat, benar, lengkap, dan tidak menyesatkan merupakan salah satu tugas badan pemerintahan sebagai instansi pelayanan masyarakat. JDIH KKP senantiasa berkomitmen untuk meningkatkan

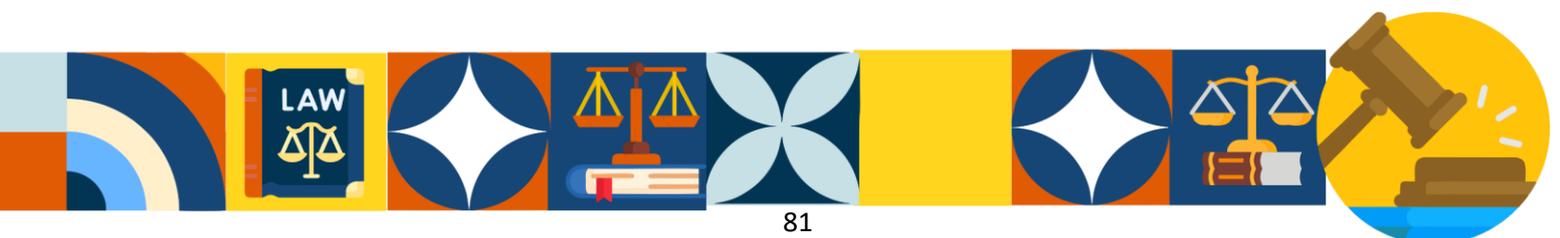




penyebarluasan dan pemahaman pengetahuan hukum, memudahkan pencarian dan penelusuran peraturan perundang-undangan dan bahan dokumentasi hukum lainnya, serta meningkatkan pemberian pelayanan dokumentasi dan informasi hukum di bidang kelautan dan perikanan.

Guna penyediaan layanan informasi dan dokumentasi hukum bidang kelautan dan perikanan yang lengkap, akurat, mudah, dan dapat diakses setiap waktu, Biro Hukum telah mengembangkan sistem informasi yang mana dapat diakses secara umum melalui *website* JDIH KKP dengan domain <https://jdih.kkp.go.id/> dan selalu diperbaharui secara berkala. *Website* JDIH KKP telah **terintegrasi dengan portal <https://jdihn.go.id/> sejak 31 Juli 2017**. Selain itu, segala bentuk dokumen dan informasi tersebut juga dapat dilihat secara non-elektronik melalui buku Himpunan Peraturan Perundang-undangan Bidang Kelautan dan Perikanan.

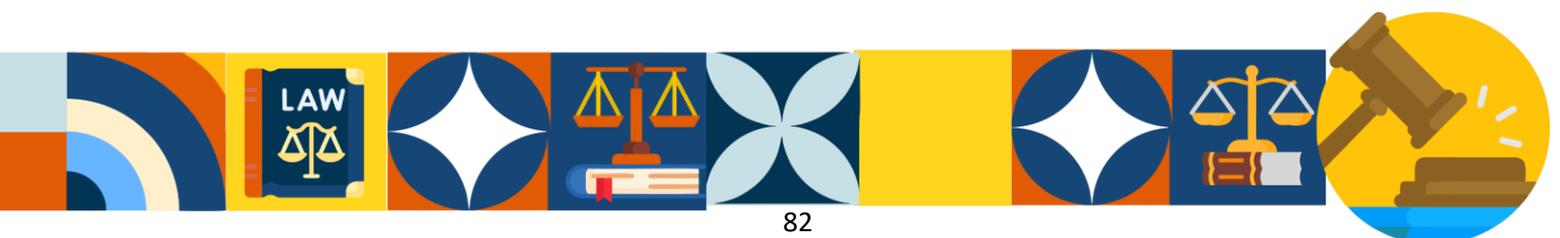
IKU Kinerja Pengelolaan JDIH mendapat nilai 98 (sembilan puluh delapan) dengan kategori Eka Acalapati dan berada pada peringkat ke-5 (delapan) dari 32 (tiga puluh dua) kementerian berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.HH-01.HN.03.05 Tahun 2023 tentang Penetapan Hasil Penilaian Kinerja Pengelolaan JDIH Tahun 2022. Atas raihan nilai kinerja tersebut JDIH KKP berhak mendapat penghargaan sebagai JDIH Terbaik V Kelompok JDIH Kementerian.





No.	Nama Instansi	Nilai
Kategori EKA ACALAPATI (Nilai 76 s.d. 100)		
1.	Kementerian Komunikasi dan Informatika	100
2.	Kementerian Keuangan	99
3.	Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi	98
4.	Kementerian Sosial	98
5.	Kementerian Kelautan dan Perikanan	98
6.	Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	96
7.	Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional	96
8.	Kementerian Ketenagakerjaan	96
9.	Kementerian Perhubungan	94
10.	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	94
11.	Kementerian Badan Usaha Milik Negara	94
12.	Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah	93
13.	Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	93
14.	Kementerian Investasi/Badan Koordinator Penanaman Modal	92
15.	Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi	92
16.	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	91
17.	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	90
18.	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	87
19.	Kementerian Pertanian	80
20.	Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan	76
21.	Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi	76

IKU Nilai Kinerja Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Kementerian Kelautan dan Perikanan merupakan IKU Baru pada tahun 2023, berdasarkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 43 Tahun 2023 tentang Mekanisme Kerja untuk Penyederhanaan Birokrasi di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan Biro Hukum menjadi merubah tim kerja di Biro Hukum, sehingga IKU tersebut belum masuk pada Renstra 2020-2024 dan Renja 2023, namun telah diusulkan pada perubahan Restra 2024 dan Renja 2024.

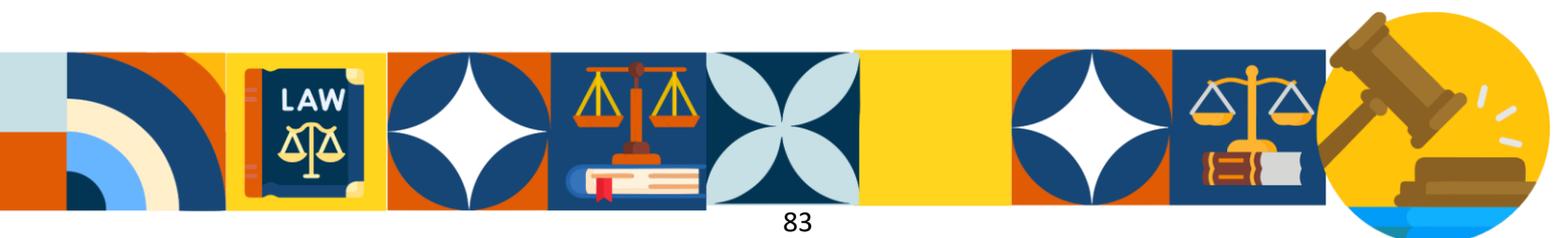




A. Analisis Penyebab Keberhasilan dalam Rangka Peningkatan

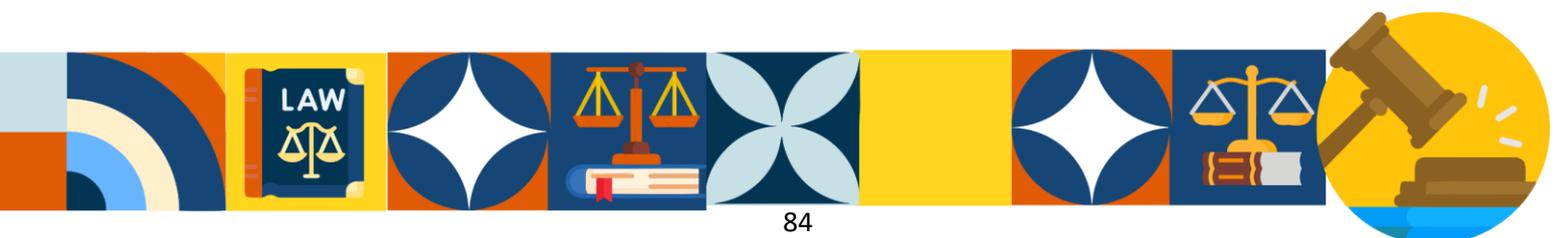
Beberapa upaya telah dilakukan untuk mendukung keberhasilan tercapainya IKU Kinerja Pengelolaan JDIH KKP, antara lain

1. Untuk sosialisasi dan publikasi JDIH KKP telah selesai dibuat video profil JDIH KKP bekerja sama dengan Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Luar Negeri dalam syuting dan produksi video tersebut;
2. Menghadiri rapat koordinasi JDIH lingkup Kementerian dibawah koordinasi Kemenkomarves, yang diselenggarakan oleh Kemenkomarves di The Margo Hotel, Kota Depok pada tanggal 26 Januari 2023;
3. Telah dilaksanakan koordinasi JDIH ke Perpunas pada tanggal 10 Februari 2023;
4. Telah dilaksanakan rapat koordinasi tim teknis pengelola JDIH KKP pada tanggal 29-30 Maret 2023;
5. Telah dilaksanakan asistensi penyusunan abstrak Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan bidang kesekretariatan pada tanggal 19 Mei 2023;
6. Menghadiri kegiatan sosialisasi Legal Development Content Creator (LDCC) yang diselenggarakan oleh Pusat JDIH Nasional, Kementerian Hukum dan HAM pada tanggal 13 Juli 2023;
7. Telah dilaksanakan rapat koordinasi JDIH KKP pada tanggal 21 Juli 2023;
8. Telah dilaksanakan sosialisasi JDIH bersama Pusat JDIH Nasional, Kementerian Hukum dan HAM pada tanggal 3 Agustus 2023;
9. Telah dilaksanakan rapat update data website JDIH KKP pada tanggal 29 Agustus 2023;
10. Telah dilaksanakan rapat update data peraturan perundang-undangan bidang KIPM pada website JDIH KKP pada tanggal 6 Oktober 2023;
11. Menghadiri Pertemuan Nasional Anggota JDIH dan Legal Development Content Creator (LDCC) Awards Tahun 2023 pada tanggal 12 Oktober 2023;
12. Telah dilaksanakan rapat evaluasi JDIH KKP pada tanggal 23 Oktober 2023;
13. Menghadiri Webinar Penguatan JDIH pada tanggal 20 November 2023;





14. Telah dilaksanakan rapat evaluasi JDIH Kemenkomarves dan 7 Kementerian di Bawah Koordinasi Kemenkomarves pada tanggal 21 November 2023;
15. Menghadiri Bimbingan Teknis Abstrak dan Metadata Lingkup Kemenkomarves dan 7 Kementerian di Bawah Koordinasi Kemenkomarves pada tanggal 7 Desember 2023;
16. Menghadiri Bimbingan Teknis Penyusunan E-report Lingkup Kemenkomarves dan 7 Kementerian di Bawah Koordinasi Kemenkomarves pada tanggal 8 Desember 2023;
17. Telah dilaksanakan Asistensi Penyusunan E-report pada tanggal 13 Desember 2023;
18. Telah dilaksanakan Rapat Sistem Informasi Batas Maritim Internasional Berbasis Geospasial untuk Tujuan Edukasi Publik pada tanggal 19 Desember 2023;
19. Telah dilaksanakan studi banding JDIH ke
 - a. JDIH Provinsi Jawa Barat pada tanggal 2 Februari 2023;
 - b. JDIH Kota Bogor pada tanggal 20 Februari 2023;
 - c. JDIH Kementerian Komunikasi dan Infomatika pada tanggal 23 Februari 2023;
 - d. JDIH DPRD Kota Bandung pada tanggal 2 November 2023;
 - e. JDIH Provinsi Jawa Timur pada tanggal 10 November 2023;
 - f. JDIH Kota Denpasar pada tanggal 8 Desember 2023;
20. Menerima kunjungan dari
 - a. JDIH Kota Metro dan JDIH Kabupaten Lampung Tengah pada tanggal 8 Agustus 2023; dan





b. JDIH Provinsi Jawa Barat pada tanggal 14 Desember 2023.





B. Penggunaan Anggaran yang Mendukung Indikator Kinerja

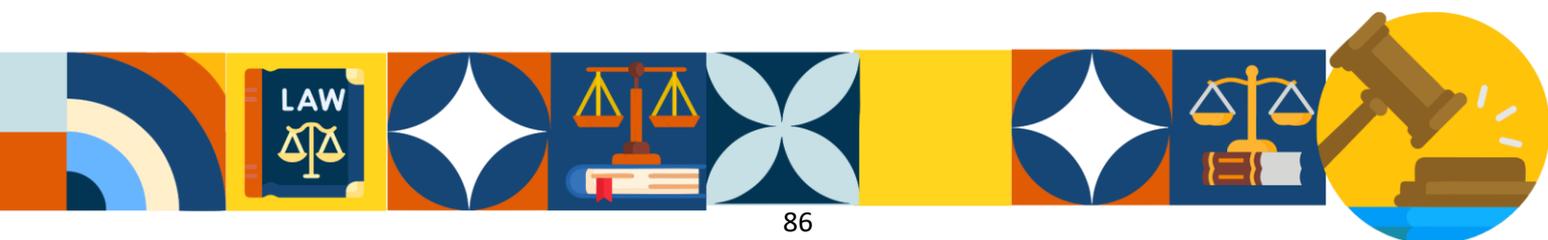
Menyoroti penerapan penganggaran berbasis kinerja dikaitkan dengan isu yang berkembang saat ini dimana fokus Pemerintah adalah melakukan penghematan dan efisiensi anggaran. Dimana hal tersebut sejalan dengan tujuan reformasi dibidang penganggaran yakni meningkatkan efisiensi dalam penganggaran dari tujuan penerapan PBK. Berdasarkan hal tersebut, Biro Hukum telah merealisasi anggaran kegiatan Dokumentasi dan Informasi Hukum Rp648.489.725 dengan pagu anggaran Rp648.678.000.

C. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Pada acara Pertemuan Nasional Anggota JDIHN dan Legal Development Content Creator (LDCC) Awards Tahun 2023 pada hari Kamis, 12 Oktober 2023, di Aston Kartika Grogol Hotel Conference Center Jakarta, JDIH KKP mendapat penghargaan JDIH Awards sebagai JDIH Terbaik V Kelompok Kementerian dan Kementerian Hukum dan HAM.



Kemudian pada acara Rapat Koordinasi Hukum Antar Kementerian/Lembaga Lingkup Kemenko Kemaritiman dan Investasi Tahun 2023 pada hari Senin-Selasa, 13-14 Desember 2023, di Eastparc Hotel Yogyakarta, JDIH KKP mendapat penghargaan Juristica Awards 2023 sebagai JDIH dengan Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi Terbaik di lingkup kementerian/lembaga dibawah koordinasi Kemenko Kemaritiman dan Investasi.





IKU 10 Nilai Penilaian Mandiri SAKIP Biro Hukum

**Tabel 12
Indikator Kinerja Utama 10**

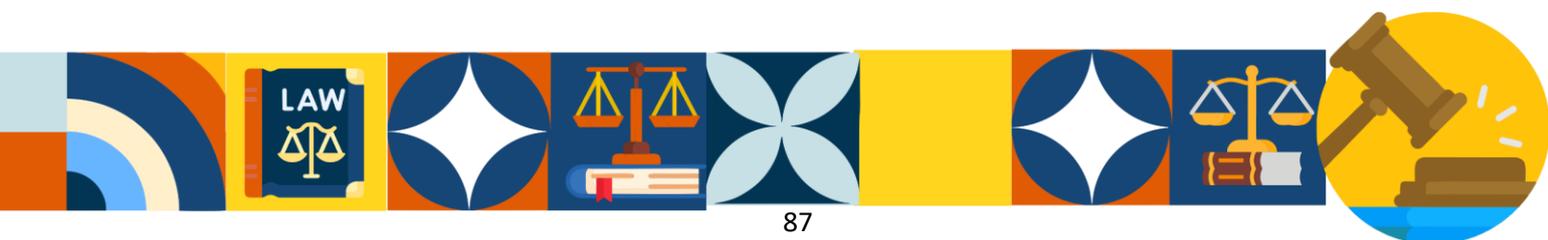
SK-2		Terwujudnya Layanan Dukungan Manajemen yang Baik Lingkup Biro Hukum											
IKU-10		Nilai Penilaian Mandiri SAKIP Biro Hukum											
Realisasi					Realisasi Tahun 2023				Renstra Setjen 2020-2024				
2018	2019	2020	2021	2022	Target	Realisasi	% Capaian	% kenaikan 2022-2023	Target 2023	% Capaian thd Target 2023	Target 2024	% Capaian thd Target 2024	
-	-	-	-	-	80,5	87,6	108,82	-	-	-	-	-	

Nilai PM SAKIP Biro Hukum merupakan IKU yang menggantikan IKU Nilai Rekoneiliasi Kinerja. Adapun IKU ini dihitung berdasarkan Permen PAN dan RB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Terdapat 4 aspek penilaian di dalam evaluasi atas implementasi SAKIP, yakni

- perencanaan kinerja (30%),
- pengukuran kinerja (30%),
- pelaporan kinerja (15%),
- evaluasi kinerja (25%).

Nilai PM SAKIP Setjen adalah nilai yang dikeluarkan dari hasil penilaian mandiri Inspektorat Jenderal atas implementasi SAKIP di Biro Hukum dengan kategori penilaian sebagai berikut:

Kategori	Nilai	Predikat
AA	>90 – 100	Sangat Memuaskan
A	>80 – 90	Memuaskan
BB	>70 – 80	Sangat Baik
B	>60 – 70	Baik





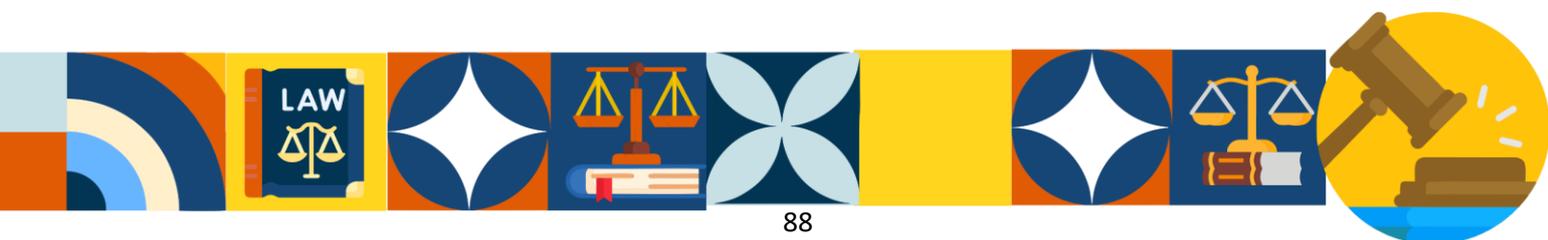
Kategori	Nilai	Predikat
CC	>50-60	Cukup
C	>30 – 50	Kurang
D	0 – 30	Sangat Kurang

Berdasarkan penilaian di tahun 2023, Nilai PM SAKIP Biro Hukum mencapai 87.60 dengan kategori A predikat memuaskan. Nilai ini diperoleh berdasarkan Memorandum Biro Pencanaan Nomor. 1097/SJ.1/HP.440/XII/2023 tentang Hasil Penilaian Mandiri SAKIP Level II Lingkup Sekretariat Jenderal Tahun 2023 pada tanggal 14 Desember 2023. Adapun rincian penilaian pada setiap biro adalah sebagai berikut

No	Unit Kerja	Nilai Akuntabilitas					Predikat
		Perencanaan Kinerja	Pengukuran Kinerja	Pelaporan Kinerja	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	Nilai Akuntabilitas	
1	Biro Perencanaan	27,60	24,00	13,80	20,00	85,40	A
2	Biro SDMAO	25,80	24,60	13,80	20,50	84,70	A
3	Biro Hukum	27,00	24,60	13,50	22,50	87,60	A
4	Biro Humas dan Kerja Sama Luar Negeri	25,20	24,00	11,10	23,00	83,30	A
5	Biro Keuangan	27,00	24,00	12,00	22,50	85,50	A
6	Biro Umum dan Pengadaan Barang/Jasa	24,60	23,70	12,75	19,25	80,30	A
7	Pusat Data, Statistik, dan Informasi	27,90	24,00	12,75	22,50	87,15	A
8	Balai Pengelolaan Informasi Sumber Daya KP	25,20	24,00	12,60	22,50	84,30	A
9	Lembaga Pengelola Modal Usaha KP	22,20	22,80	11,10	18,50	74,60	BB

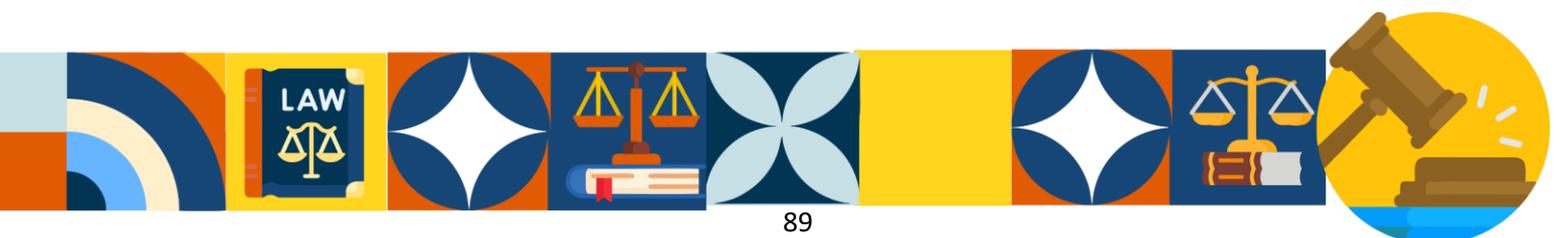
Capaian Biro Hukum merupakan capaian peringkat ke-1 di lingkup Sekretariat Jenderal. Adapun capaian ini diperoleh dengan adanya:

1. Perumusan kinerja individu setiap pegawai terkait dengan kinerja organisasi dengan menyusun matrik pembagian peran hasil dan memastikan hasil matriks tersebut dituangkan dalam SKP (Sasaran Kinerja Pegawai) sehingga dapat dipastikan kinerja individu menunjang kinerja organisasi
2. Mendorong pemanfaatan hasil pengukuran kinerja sebagai dasar perbaikan program/kegiatan untuk perencanaan kedepan sehingga dapat mengoptimalkan peningkatan pencapaian kinerja yang ditetapkan.





3. Mendorong komitmen pimpinan untuk memanfaatkan aplikasi pengukuran dan pengumpulan data kinerja sebagai sarana monitoring dan evaluasi secara efektif dengan memberikan feedback perbaikan sebagai bentuk controlling pimpinan unit kerja terhadap pencapaian kinerja yang dimiliki.
4. Meningkatkan kualitas laporan kinerja, dengan menyajikan informasi detail pencapaian kinerja terkait analisa upaya-upaya perbaikan kinerja kedepan sehingga laporan kinerja dapat dimanfaatkan sebagai dasar pertimbangan perencanaan kinerja kedepan.
5. Mendorong pemanfaatan data kinerja pada laporan kinerja untuk perbaikan penetapan target kinerja tahun berikutnya sehingga perencanaan kinerja kedepan dapat menggambarkan adanya perbaikan/peningkatan kinerja.
6. Mendorong hasil evaluasi akuntabilitas kinerja dapat memberikan gambaran langkah-langkah perbaikan/peningkatan kinerja.
7. Mendorong hasil evaluasi akuntabilitas perbaikan nyata untuk meningkatkan pencapaian seluruh target kinerja.
8. Melakukan Sharing Knowledge dalam rangka melaksanakan kinerja Biro Hukum, Sekretariat Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta





Dalam menunjang capaian Nilai Penilaian Mandiri SAKIP Biro Hukum didukung oleh seluruh perwakilan dari tim kerja. Untuk dapat melaksanakan kegiatan demi mencapai *output* sesuai dengan tugas dan fungsi dari Biro Hukum. Biaya-biaya tersebut dituangkan pada Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA K/L) yang disusun 1 (satu) tahun sebelum pelaksanaan kerja dan anggaran dilaksanakan. Sehubungan dengan hal tersebut pada tahun 2023, target anggaran sebesar Rp25.050.000 dan telah terealisasi sebesar Rp24.705.000.

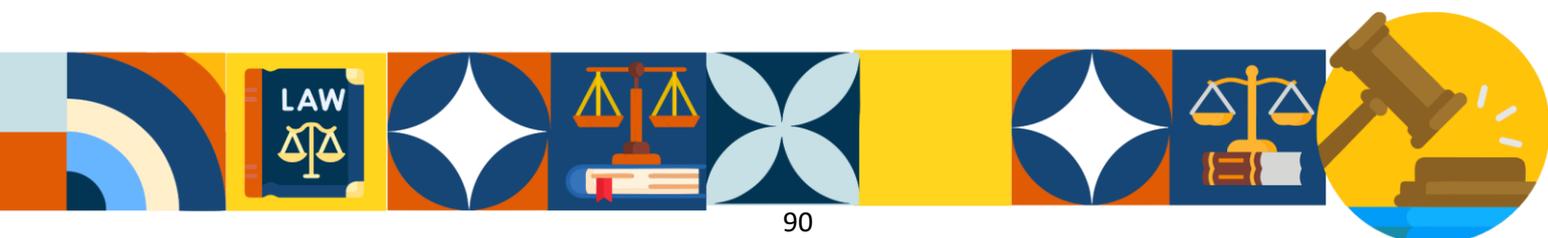
IKU 11 Indeks Profesionalitas ASN Biro Hukum

**Tabel 13
Indikator Kinerja Utama 11**

SK-2		Terwujudnya Layanan Dukungan Manajemen yang Baik Lingkup Biro Hukum															
IKU-11		Indeks Profesionalitas ASN Biro Hukum															
		Realisasi							Realisasi Tahun 2023					Renstra Setjen 2020-2024			
2018	2019	2020	2021	2022	Target	Realisasi	% Capaian	% kenaikan 2022-2023	Target 2023	% Capaian thd Target 2023	Target 2024	% Capaian thd Target 2024					
80,95	63,72	72,56	82,03	84,03	79	89,64	113,47	5,61	74	121,13	76	117,94					

Profesionalitas adalah kualitas para anggota profesi terhadap profesinya serta derajat pengetahuan dan keahlian yang mereka miliki untuk melakukan tugas-tugasnya. Indeks Profesionalitas ASN adalah ukuran statistik yang menggambarkan kualitas ASN berdasarkan kesesuaian kualifikasi, kompetensi, kinerja, dan kedisiplinan pegawai ASN dalam melaksanakan tugas jabatan (Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 38 Tahun 2018). Nilai Indeks Profesionalitas ASN Biro Hukum merupakan gambaran kualitas profesionalitas ASN Biro Hukum yang diukur setiap tahun oleh Biro SDMAO, Sekretariat Jenderal dengan mengacu pada Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 38 Tahun 2018 tentang Peraturan Indeks Profesionalitas Aparatir Sipil Negara.

Berdasarkan memorandum Kepala Biro SDM Aparatur dan Organisasi, Nomor 85/SJ.3/KP.720/I/2024, tanggal 11 Januari 2024, hal Capaian Indikator Kinerja Utama IP ASN Triwulan IV Semester II Tahun 2023 dan Target IP ASN lingkup Sekretariat Jenderal Tahun 2024, berdasarkan hasil pengukuran Kualifikasi, Kompetensi, Kinerja dan Disiplin pada *Dashboard* IP ASN KKP yang berbasis data





Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian KKP yaitu 84,75 (kategori Tinggi) terdiri dari Kualifikasi 21,71, Kompetensi 38,50, Kinerja 24,43, dan Disiplin 5.

Tabel 14
Hasil Penilaian IP ASN Tahun 2023
per Unit Kerja Eselon II Lingkup Sekretariat Jenderal

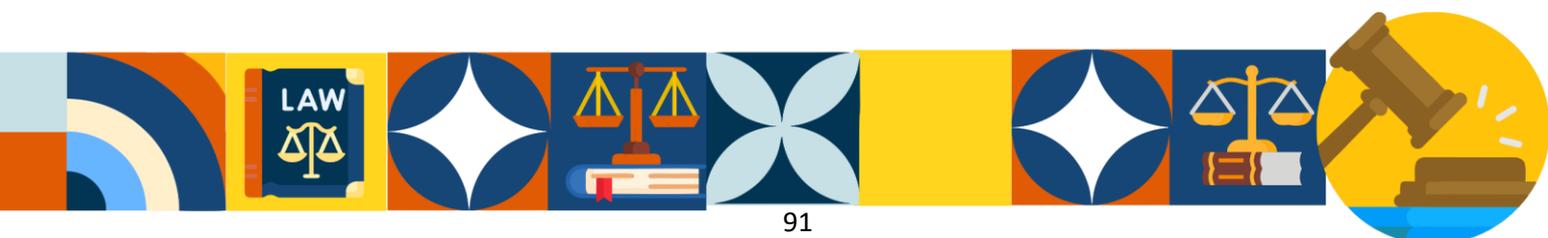
No	Unit Kerja	Komponen IP ASN				Total
		Kualifikasi	Kompetensi	Kinerja	Disiplin	
1	Staf Ahli Menteri	22.50	12.50	25.00	5	65.00
2	Biro Perencanaan	21.43	35.00	25.75	5	87.19
3	Biro SDM Aparatur dan Organisasi	20.90	32.33	25.08	5	83.31
4	Biro Hukum	21.71	38.50	24.43	5	89.64
5	Biro HKLN	21.36	33.09	25.00	5	84.45
6	Biro Keuangan	21.10	38.39	25.00	5	89.49
7	Biro Umum dan PBJ	20.97	36.08	24.82	5	86.87
8	Pusdatin	21.09	39.34	25.07	5	90.50
9	BPISKP	22.38	35.47	23.44	5	86.28
	Total	21.49	33.41	24.84	5	84.75

Dalam menunjang capaian Hasil Penilaian IP ASN Tahun 2023 per Unit Kerja Eselon II Lingkup Sekretariat Jenderal didukung oleh seluruh pegawai Biro Hukum. Untuk dapat melaksanakan kegiatan demi mencapai *output* sesuai dengan tugas dan fungsi dari Biro Hukum. Biaya-biaya tersebut dituangkan pada Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA K/L) yang disusun 1 (satu) tahun sebelum pelaksanaan kerja dan anggaran dilaksanakan. Sehubungan dengan hal tersebut pada tahun 2023, target anggaran sebesar Rp23.490.000 dan telah terealisasi sebesar Rp23.289.894.

IKU 12 Persentase Penyelesaian Temuan BPK di Lingkup Biro Hukum

Tabel 15
Indikator Kinerja Utama 12

SK-2 Terwujudnya Layanan Dukungan Manajemen yang Baik Lingkup Biro Hukum												
IKU-12 Nilai Penilaian Mandiri SAKIP Biro Hukum												
Realisasi					Realisasi Tahun 2023				Renstra Setjen 2020-2024			
2018	2019	2020	2021	2022	Target	Realisasi	% Capaian	% kenaikan 2022-2023	Target 2023	% Capaian thd Target 2023	Target 2024	% Capaian thd Target 2024
100	-	-	100	100	100	100	100	-	100	100	100	100



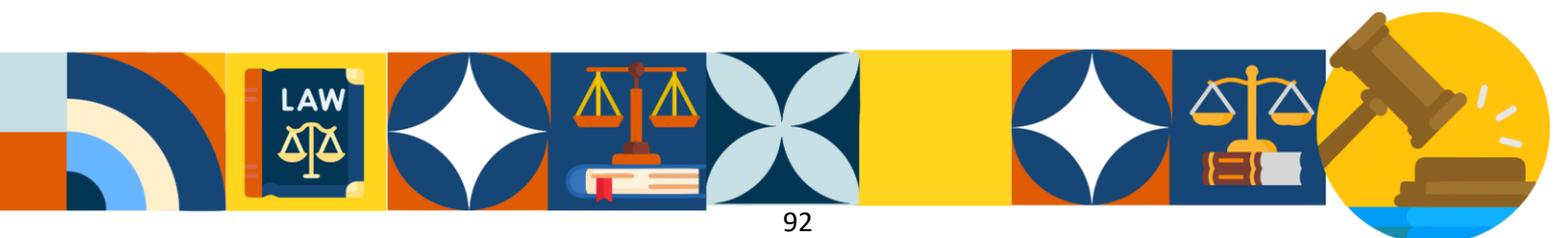


Nilai temuan atas laporan keuangan yang ditampilkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK atas LK Biro Hukum merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada empat kriteria yakni kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, kecukupan pengungkapan (*adequate disclosures*), kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan efektivitas sistem pengendalian intern. Melalui memorandum Kepala Biro Keuangan, Nomor 1717/SJ.2/RC.610/X/2023, tanggal 12 Oktober 2023, hal Capaian IKU “Batas Tertinggi Persentase Nilai Temuan Laporan Hasil Pengawasan BPK Atas Laporan Keuangan Sekretariat Jenderal dibandingkan Realisasi Anggaran Sekretariat Jenderal TA. 2022”, Biro Hukum mendapatkan nilai 100%, dapat diartikan **bahwa tidak ada temuan BPK** di Biro Hukum

Tabel 16

**Rincian Realisasi IKU
“Batas Tertinggi Persentase Nilai Temuan Laporan Hasil Pengawasan BPK Atas Laporan Keuangan Sekretariat Jenderal dibandingkan Realisasi Anggaran Sekretariat Jenderal TA 2023”**

No.	Unit Kerja	Realisasi Anggaran (Rp)	Nilai Temuan BPK (Rp)	Target (%)	Realisasi (%)	% Capaian
1.	Biro Umum dan PBJ	475.510.832.637	68.482.499,00	≤1	0,01	100,99
	Biro Umum dan PBJ	-	38.200.599,00	≤1	0,01	100,99
	Biro Perencanaan	-	-	≤1	0,00	0
	Biro Keuangan	-	30.281.900,00	≤1	0,01	100,99
	Biro Hukum	-	-	≤1	0,00	0
	Biro SDMAO	-	-	≤1	0,00	0
	Biro Humas dan KLN	-	-	≤1	0,00	0
	Pusdatin	-	-	≤1	0,00	0
2.	LPMUKP	41.467.114.758	-	≤1	0,00	101,00
3.	DEKONSENTRASI	5.873.164.774	-	≤1	0,00	101,00
	TOTAL	522.851.112.169,00	68.482.499,00	≤1	0,01	100,99





Untuk memitigasi adanya temuan, Biro Hukum memiliki metode penyelenggaraan SPIP melalui portal informasi SPIP dengan alamat tautan lynk.id/spiprokum. Dengan adanya sistem satu pintu tersebut, proses penyelenggaraan SPIP dapat terintegrasi melalui satu pintu. Hal tersebut meningkatkan koordinasi dan transparansi dalam pengendalian risiko yang terjadi di setiap triwulannya. Dengan adanya sistem pengendalian internal yang terkontrol dengan baik, hal ini dapat menjadi evaluasi tersendiri bagi Biro Hukum agar senantiasa terus meningkatkan kinerja dalam pencapaian target atas proses bisnis yang dijalani.

Dalam menunjang capaian Persentase Penyelesaian Temuan BPK di Lingkup Biro Hukum oleh seluruh pegawai Biro Hukum. Untuk dapat melaksanakan kegiatan demi mencapai *output* sesuai dengan tugas dan fungsi dari Biro Hukum. Biaya-biaya tersebut dituangkan pada Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA K/L) yang disusun 1 (satu) tahun sebelum pelaksanaan kerja dan anggaran dilaksanakan. Sehubungan dengan hal tersebut pada tahun 2023, target anggaran sebesar Rp26.170.000 dan telah terealisasi sebesar Rp25.871.257.

IKU 13 Persentase Unit Kerja yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan yang Terstandar di Lingkungan Biro Hukum

**Tabel 17
Indikator Kinerja Utama 13**

SK-2		Terwujudnya Layanan Dukungan Manajemen yang Baik Lingkup Biro Hukum												
IKU-13		Persentase Unit Kerja yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan yang Terstandar di Lingkungan Biro Hukum												
		Realisasi					Realisasi Tahun 2023				Renstra Setjen 2020-2024			
2018	2019	2020	2021	2022	Target	Realisasi	% Capaian	% kenaikan 2022-2023	Target 2023	% Capaian thd Target 2023	Target 2024	% Capaian thd Target 2024		
89,17	83,33	94,64	94,64	100	92	133,33	120	33,33	86	155,03	90	148,14		

Sistem Manajemen Pengetahuan adalah suatu rangkaian yang memanfaatkan teknologi informasi yang digunakan oleh instansi pemerintah ataupun swasta untuk mengidentifikasi, menciptakan, menjelaskan, dan mendistribusikan pengetahuan untuk digunakan kembali, diketahui dan dipelajari.





Perhitungan indikator ini berasal dari penilaian Komponen Keaktifan, dalam sistem informasi manajemen pengetahuan melalui aplikasi *Collaboration Office*. Penghitungan Keaktifan dilakukan setiap triwulan dengan komposisi minimal mendapatkan 3 poin upload keaktifan dan maksimal 4 poin upload keaktifan sesuai dengan bobot poin yang telah ditentukan. Pembobotan yang dimaksud antara lain

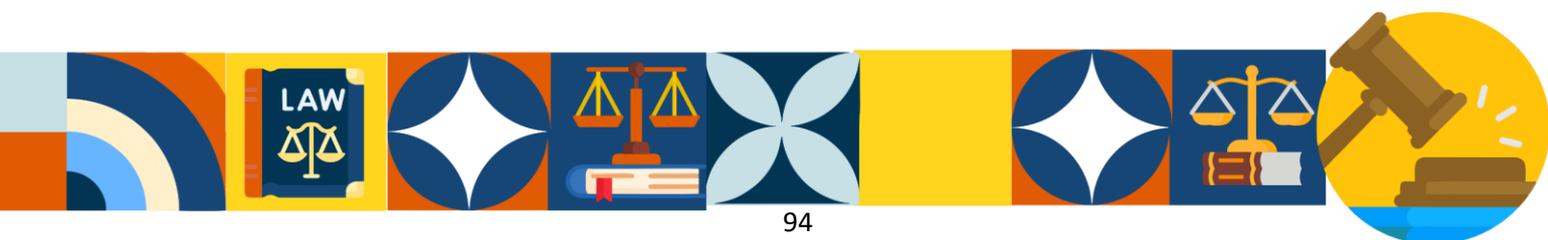
1. Berbagi pengetahuan yang berasal dari kegiatan dengan memenuhi unsur 5W1H dengan sumber pengetahuan jelas akan mendapatkan poin 0,5.
2. Berbagi pengetahuan yang dituangkan dalam bentuk infografis dengan sumber pengetahuan yang jelas akan mendapatkan poin 1.
3. Berbagi pengetahuan yang dituangkan dalam bentuk konten video/jurnal akan mendapatkan poin 3.

Berdasarkan memorandum Kepala Pusat, Data, Statistik dan Informasi Nomor 20/SJ.7/TU.210/I/2024, tanggal 3 Januari 2024, Hal Capaian IKU Manajemen Pengetahuan Terstandar Lingkup Sekretariat Jenderal KKP Tahun 2023, Biro Hukum mendapatkan **nilai capaian 133,33**.

Tabel 18
Grafik Target dan Realisasi IKU
Unit Kerja Setjen yang Menerapkan Manajemen Pengetahuan yang Terstandar
Per Eselon II Tahun 2023

No	Satuan Kerja	Triwulan				Capaian	Target	% Capaian
		I	II	III	IV			
1	Biro Perencanaan	100,00	100,00	116,67	133,33	112,50	92,00	122,28
2	BHKLN	100,00	100,00	133,33	133,33	116,67	92,00	126,81
3	Biro Keuangan	100,00	100,00	133,33	133,33	116,67	92,00	126,81
4	BSDMAO	100,00	99,68	100,00	133,33	108,25	92,00	117,67
5	Biro Hukum	100,00	100,00	133,33	133,33	116,67	92,00	126,81
6	Biro Umum dan PBJ	92,59	98,25	100,00	133,33	106,04	92,00	115,26
7	Pusdatin	100,00	100,00	133,33	133,33	116,67	92,00	126,81
8	LPMUKP	100,00	100,00	100,00	133,33	108,33	92,00	117,75

Upaya telah dilakukan oleh Biro Hukum untuk meningkatkan capaian indikator kinerja Presentase Unit Kerja yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan yang Terstandar Lingkup Biro Hukum yaitu mengingatkan kepada seluruh pegawai Biro Hukum melalui briefing pagi atau *whatsapp group* untuk selalu menginput





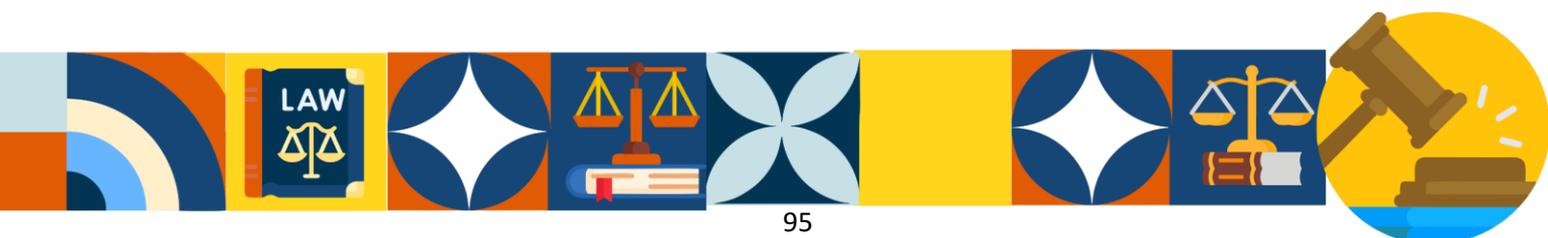
seluruh aktivitas keseharian pegawai pada laman <https://portal.kkp.go.id/> agar Biro Hukum dapat menjadi *center of excellent* yang terefleksikan dalam penilaian-penilaian yang selama ini dilakukan di Kementerian Kelautan dan Perikanan ataupun instansi lain.

IKU 14 Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Biro Hukum

**Tabel 19
Indikator Kinerja Utama 14**

SK-2		Terwujudnya Layanan Dukungan Manajemen yang Baik Lingkup Biro Hukum											
IKU-10		Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Biro Hukum											
Realisasi					Realisasi Tahun 2023				Renstra Setjen 2020-2024				
2018	2019	2020	2021	2022	Target	Realisasi	% Capaian	% kenaikan 2022-2023	Target 2023	% Capaian thd Target 2023	Target 2024	% Capaian thd Target 2024	
100	100	45	100	100	75	100	120	-	92	108,69	94	106,38	

Jumlah rekomendasi hasil pengawasan Inspektorat Jenderal kepada Sekretariat Jenderal berdasarkan LHP (terbatas pada LHP Audit, reuiu, dan evaluasi baik bentuk surat maupun bab) yang diperoleh dari jumlah rekomendasi hasil pengawasan Inspektorat Jenderal. Berdasarkan hasil pengukuran kinerja, persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan yang telah ditindaklanjuti (status tindak lanjut adalah TUNTAS) oleh seluruh mitra kerja yang menjadi objek pengawasan. Melalui memorandum Kepala Biro Keuangan Nomor, 86/SJ.2/TU.210/I/2024, tanggal 10 Januari 2024, tentang Capaian IKU “Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan Untuk Perbaikan Kinerja Lingkup Sekretariat Jenderal” Tahun 2023, Jumlah Rekomendasi Biro Hukum sebanyak 16 rekomendasi dan telah ditindaklanjuti (tuntas), sehingga capaian Biro Hukum sebesar 100%.





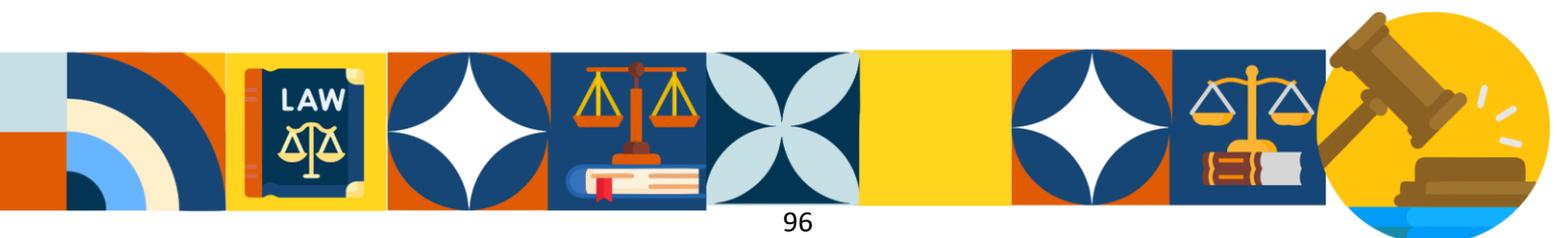
Tabel 20
Capaian Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan Untuk Perbaikan Kinerja Lingkup Sekretariat Jenderal” Triwulan IV Tahun 2023

No.	Unit Kerja	Jumlah Rekomendasi	Tindak Lanjut (Tuntas)	Tuntas (%)	Sisa Rekomendasi	Sisa Rekomendasi (%)
1.	Biro Perencanaan	10	10	100,00	0	00,00
2.	Biro Keuangan	12	12	100,00	0	00,00
3.	Biro Umum dan PBJ	18	18	100,00	0	00,00
4.	Biro Hukum	16	16	100,00	0	00,00
5.	Biro SDMAO	24	24	100,00	0	00,00
6.	Biro Humas dan KLN	1	1	100,00	0	00,00
7.	PUSDATIN	7	7	100,00	0	00,00
8.	LPMUKP	25	24	96,00	1	04,00
9.	BPISDKP	0	0	100,00	0	00,00
TOTAL		113	112	99,12	1	00,88

Upaya yang dilakukan untuk tercapainya Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Biro Hukum adalah

- a. Segera menindaklanjuti hasil pengawasan oleh Inspektorat Jenderal;
- b. Berdiskusi Bersama Tim SPIP untuk penjaminan Kualitas atas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintahan; dan
- c. Monitoring dan evaluasi kegiatan Biro Hukum dan anggaran secara berkala.

Dalam menunjang capaian Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Biro Hukum oleh perwakilan Tim Kerja SPIP dan seluruh pegawai Biro Hukum. Untuk dapat melaksanakan kegiatan demi mencapai *output* sesuai dengan tugas dan fungsi dari Biro Hukum. Biaya-biaya tersebut dituangkan pada Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA K/L) yang disusun 1 (satu) tahun sebelum pelaksanaan kerja dan anggaran dilaksanakan. Sehubungan dengan hal tersebut pada tahun





2023, target anggaran sebesar Rp23.600.000 dan telah terealisasi sebesar Rp19.514.140.

IKU 15 Persentase Penyerapan Anggaran Biro Hukum

**Tabel 21
Indikator Kinerja Utama 15**

SK-2		Terwujudnya Layanan Dukungan Manajemen yang Baik Lingkup Biro Hukum											
IKU-15		Persentase Penyerapan Anggaran Biro Hukum											
Realisasi Tahun					Realisasi Tahun 2023				Renstra Setjen 2020-2024				
2018	2019	2020	2021	2022	Target	Realisasi	% Capaian	% kenaikan 2022-2023	Target 2023	% Capaian thd Target 2023	Target 2024	% Capaian thd Target 2024	
95,33	95,44	97,28	99,43	98,82	95	99,31	104,54	0,49	-	-	-	-	

Biro Hukum merupakan salah satu unit kerja eselon II di lingkungan Sekretariat Jenderal yang mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan, rancangan perjanjian, hukum internasional bidang kelautan dan perikanan, advokasi, dokumentasi, dan informasi hukum. Dalam menunjang tugas tersebut, diperlukan biaya untuk dapat melaksanakan kegiatan demi mencapai output sesuai dengan tugas dan fungsi dari Biro Hukum. Biaya-biaya tersebut dituangkan pada Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA K/L) yang disusun satu tahun sebelum pelaksanaan kerja dan anggaran dilaksanakan. Pagu beserta realisasi anggaran Biro Hukum pada tahun 2023 sebagaimana tabel berikut

**Tabel 22
Pagu beserta realisasi anggaran Biro Hukum**

Layanan	Pagu	Target Realisasi	%	Realisasi	%	Sisa
Layanan Hukum	6.090.564.000	6.070.564.000	99,67	6.075.912.664	99,76	14.651.336
Layanan Bantuan Hukum	1.511.982.000	1.508.625.309	99,78	1.510.256.309	99,89	1.725.691
Layanan Umum	3.336.576.000	3.300.000.000	98,90	3.303.292.989	99,00	33.283.011
Layanan Perkantoran	2.062.542.000	2.010.000.000	97,45	2.022.995.596	98,08	39.546.404





Layanan	Pagu	Target Realisasi	%	Realisasi	%	Sisa
JUMLAH	13.001.664.000	12.889.189.309	99,13	12.912.457.558	99,31	89.206.442

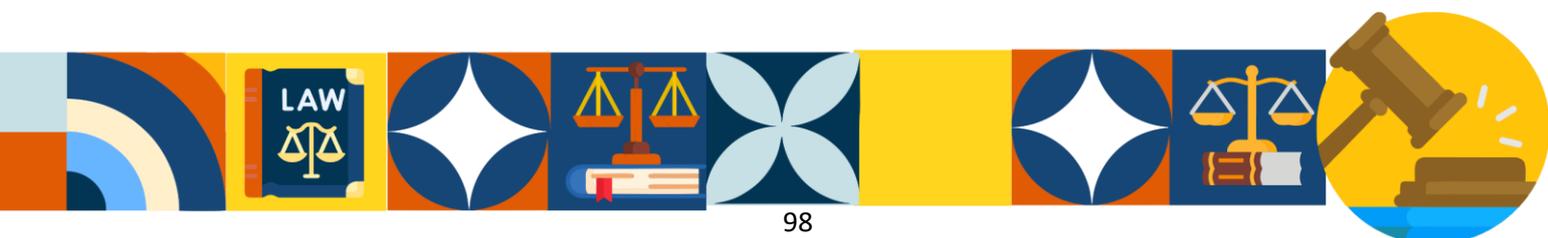
Presentasi realisasi anggaran Biro Hukum pada aplikasi SAKTI Tahun Anggaran 2023 sebesar 99,31%. Hal ini menunjukkan bentuk komitmen Biro Hukum dalam melaksanakan anggaran secara efektif dan efisien demi tercapainya *output* yang direncanakan pada saat penganggaran. Selain itu, atas tercapainya presentasi realisasi anggaran tersebut, menandakan Biro Hukum telah berhasil mencapai target atas Indikator Kinerja Utama tentang Penyerapan Anggaran di Lingkungan Biro Hukum yaitu sebesar 95%. Pada tahun 2023, pagu anggaran Biro Hukum sebesar Rp16.858.046.000, namun mendapat blokir 2 kali Automatic Adjustment (AA) dan pengurangan pagu untuk diserahkan ke Biro Umum dan PBJ yaitu Rp3.856.382.000. Sehingga pagu akhir Biro Hukum sebesar Rp13.001.664.000

Tabel 21
Capaian Jumlah Realisasi Anggaran
Lingkup Sekretariat Jenderal Tahun 2023 berdasarkan memorandum Kepala Biro Umum dan PBJ, Nomor 161/SJ.6/RC/510/I/2024, Tanggal 15 Januari 2024, hal Capaian Indikator Kinerja Penyerapan Anggaran TA 2023

UNIT ESELON II	PAGU	BERDASARKAN APLIKASI SAKTI		
		REALISASI	SISA DANA	%
Biro Perencanaan	108,496,211,000	108,158,685,936	337,525,064	99.69
Biro Hukum	13,001,664,000	12,912,457,558	89,206,442	99.31
BHKLN	24,281,262,000	24,125,714,981	155,547,019	99.36
Biro Keuangan	12,737,230,000	12,655,154,252	82,075,748	99.36
Biro SDMAO	14,609,428,000	14,388,513,128	220,914,872	98.49
Biro Umum dan PBJ	280,497,365,000	278,288,469,415	2,208,895,585	99.21
Pusdatin	115,753,575,000	114,753,744,705	999,830,295	99.14
TOTAL	569,376,735,000	565,282,739,975	4,093,995,025	99.28

Upaya yang dilakukan untuk tercapainya Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Biro Hukum adalah

- a. Menampilkan target dan realisasi anggaran tahun 2023 pada saat Apel Pagi dan Doa Pagi yang dilaksanakan pada hari Senin dan Rabu agar seluruh tim





kerja di lingkungan Biro Hukum dalam melaksanakan kegiatan sesuai target yang sudah ditentukan;

- b. Rekonsiliasi keuangan dilaksanakan setiap awal bulan antara Bendahara Pengeluaran Pembantu dengan Pemegang Uang Muka Kerja, bertujuan untuk memastikan seluruh transaksi keuangan telah berjalan baik; dan
- c. Dillaksanakan kas opname pada Bendahara Pengeluaran Pembantu yang dilaksanakan oleh Pejabat Pembuat Komitmen untuk memastikan saldo buku kas umum dan fisik sudah sesuai dan dituangkan dalam berita acara pemeriksaan kas.

Monitoring dan evaluasi kegiatan Biro Hukum dan anggaran secara berkala. Dalam menunjang capaian Persentase Penyerapan Anggaran Biro Hukum oleh Bendahara Pengeluaran Pembantu dengan Pemegang Uang Muka Kerja. Untuk dapat melaksanakan kegiatan demi mencapai *output* sesuai dengan tugas dan fungsi dari Biro Hukum. Biaya-biaya tersebut dituangkan pada Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA K/L) yang disusun 1 (satu) tahun sebelum pelaksanaan kerja dan anggaran dilaksanakan. Sehubungan dengan hal tersebut pada tahun 2023, target anggaran sebesar Rp18.600.000 dan telah terealisasi sebesar Rp18.560.223.

IKU 16 Persentase Penyelesaian Program Penyusunan Peraturan Perundang-undangan Bidang Pengelolaan Regulasi dan Advokasi

**Tabel 22
Indikator Kinerja Utama 12**

SK-2 Terwujudnya Layanan Dukungan Manajemen yang Baik Lingkup Biro Hukum												
IKU-16 Persentase Penyelesaian Program Penyusunan Peraturan Perundang-undangan Bidang Pengelolaan Regulasi dan Advokasi												
Realisasi					Realisasi Tahun 2023				Renstra Setjen 2020-2024			
2018	2019	2020	2021	2022	Target	Realisasi	% Capaian	% kenaikan 2022-2023	Target 2023	% Capaian thd Target 2023	Target 2024	% Capaian thd Target 2024
-	-	-	-	100	100	100	100	-	-	-	-	-

Sebagai wujud penyelenggaraan pemerintahan yang baik, Kementerian Kelautan dan Perikanan telah menyiapkan dokumen perencanaan, termasuk untuk Rancangan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Program



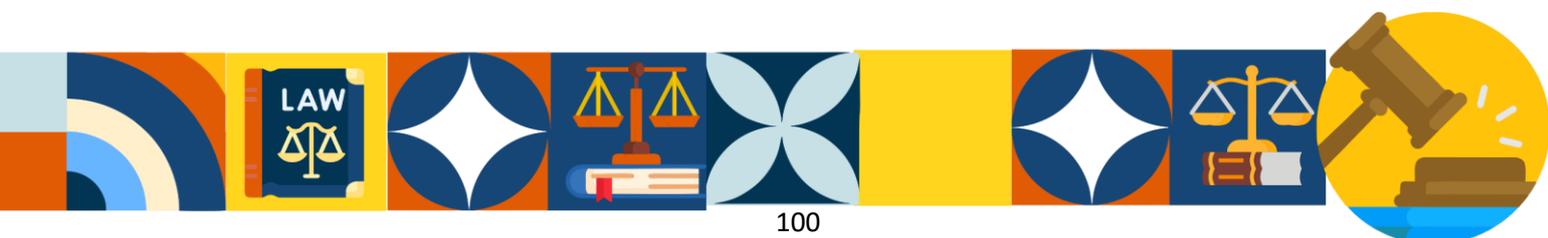


Penyusunan Peraturan Menteri dan Keputusan Menteri di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2023. Penyusunan Keputusan Menteri dimaksud merupakan rutinitas tahunan dan sebagai tindak lanjut dari Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 62/PERMEN-KP/2020 tentang Pembentukan Produk Hukum di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Dalam rangka penyusunan Rancangan Keputusan Menteri dimaksud tersebut, Biro Hukum telah menyelenggarakan rapat pembahasan sebanyak satu kali yaitu pada tanggal 28 November 2023, di Ruang Rapat Biro Hukum, Gedung Mina Bahari IV, Lantai 3B, berdasarkan undangan Kepala Biro Hukum atas nama Sekretaris Jenderal, Nomor B.782/SJ.4/TU.330/XI/2023, tanggal 24 November 2023.

Program Penyusunan Peraturan Menteri dan Keputusan Menteri di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2024 telah ditetapkan dengan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 204 Tahun 2023 tentang Program Penyusunan Peraturan Menteri dan Keputusan Menteri di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2024, yang ditetapkan tanggal 27 Desember 2023.

BULAN	RANCANGAN PERATURAN PERUNDANG UNDANGAN DI BIDANG REGULASI	TOTAL
Oktober	1	1
Telah disampaikan nota dinas Sekretaris Jenderal kepada para pimpinan unit kerja eselon I, Nomor 1235/SJ/HK.160/2023, tanggal 3 Oktober 2023, hal Program Penyusunan Peraturan Menteri dan Keputusan Menteri di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2024, yang pada intinya menyampaikan agar penyampaian usulan Rancangan Peraturan Menteri dan Rancangan Keputusan Menteri harus disertai dengan kajian tertulis, dengan catatan untuk rancangan yang memiliki dampak luas terhadap masyarakat, penyusunannya menggunakan metode <i>regulatory impact analysis</i> sebagaimana telah ditetapkan dalam Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 96/KEPMEN-KP/2020 tentang Implementasi Penyusunan Kajian Teknis dengan Metode <i>Regulatory Impact Analysis</i> (RIA). Adapun batas waktu penyampaian daftar Rancangan Peraturan Menteri dan Rancangan Keputusan Menteri yang akan diusulkan dalam Program Penyusunan Peraturan Menteri dan Keputusan Menteri di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2024 yaitu sampai dengan tanggal 23 Oktober 2023.		
November– Desember	1	1
Keterangan		





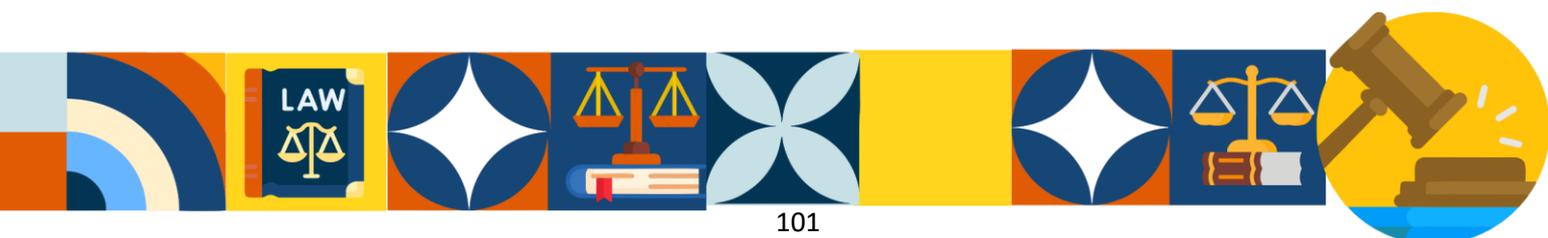
BULAN	RANCANGAN PERATURAN PERUNDANG UNDANGAN DI BIDANG REGULASI	TOTAL
1.	telah diselenggarakan rapat pembahasan sebanyak satu kali yaitu pada tanggal 28 November 2023, di Ruang Rapat Biro Hukum, Gedung Mina Bahari IV, Lantai 3B, berdasarkan undangan Kepala Biro Hukum atas nama Sekretaris Jenderal, Nomor B.782/SJ.4/TU.330/XI/2023, tanggal 24 November 2023; dan	
2.	telah ditetapkan dengan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 204 Tahun 2023 tentang Program Penyusunan Peraturan Menteri dan Keputusan Menteri di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2024, yang ditetapkan tanggal 27 Desember 2023.	
3.	telah disampaikan nota dinas Kepala Biro Hukum kepada para pimpinan unit kerja eselon II terkait, Nomor 32/SJ.4/HK.160/I/2024, tanggal 2 Januari 2024, hal Penyampaian Salinan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 204 Tahun 2023 tentang Program Penyusunan Peraturan Menteri dan Keputusan Menteri di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2024.	

Berdasarkan nota dinas Kepala Biro Hukum, Nomor 29/SJ.4/TU.210/I/2024, tanggal 2 Januari 2023, hal Capaian IKU Persentase Penyelesaian Program Penyusunan Peraturan Perundang-undangan Bidang Kelautan dan Perikanan Semester II, yang pada intinya menyatakan bahwa tanggung jawab Biro Hukum dalam penyusunan 1 (satu) Rancangan Peraturan Menteri dan 1 (satu) Rancangan Keputusan Menteri telah tercapai 100%.

Dalam menunjang capaian Nilai Penilaian Mandiri SAKIP Biro Hukum didukung oleh seluruh perwakilan dari tim kerja. Untuk dapat melaksanakan kegiatan demi mencapai *output* sesuai dengan tugas dan fungsi dari Biro Hukum. Biaya-biaya tersebut dituangkan pada Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA K/L) yang disusun 1 (satu) tahun sebelum pelaksanaan kerja dan anggaran dilaksanakan. Sehubungan dengan hal tersebut pada tahun 2023, target anggaran sebesar Rp14.450.000 dan telah terealisasi sebesar Rp17.340.000. realisasi melebihi pagu dikarenakan terdapat peserta rapat yang didampingi oleh pendamping.

3.3. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Menyoroti penerapanan penganggaran berbasis kinerja dikaitkan dengan isu yang berkembang saat ini dimana fokus Pemerintah adalah melakukan penghematan dan





efisiensi anggaran. Dimana hal tersebut sejalan dengan tujuan reformasi dibidang penganggaran yakni meningkatkan efisiensi dalam penganggaran dari tujuan penerapan penganggaran berbasis kinerja (PBK). PBK adalah sistem penganggaran yang mengkaitkan antara pengalokasian dana dengan kinerja yang diharapkan. Kinerja adalah keluaran atau *output* dari suatu kegiatan baik berupa barang atau jasa yang dapat diukur kuantitas maupun kualitasnya. Kinerja juga diartikan sebagai sejauhmana “manfaat/hasil (*outcome*)” dari barang atau jasa tersebut bagi pengguna layanan Hukum. Pengukuran efisiensi penggunaan sumber daya dilakukan untuk mengetahui seberapa besar tingkat efisiensi dalam mencapai target yang telah ditetapkan dengan memanfaatkan alokasi anggaran yang digunakan untuk mencapai target dengan data yg digunakan meliputi

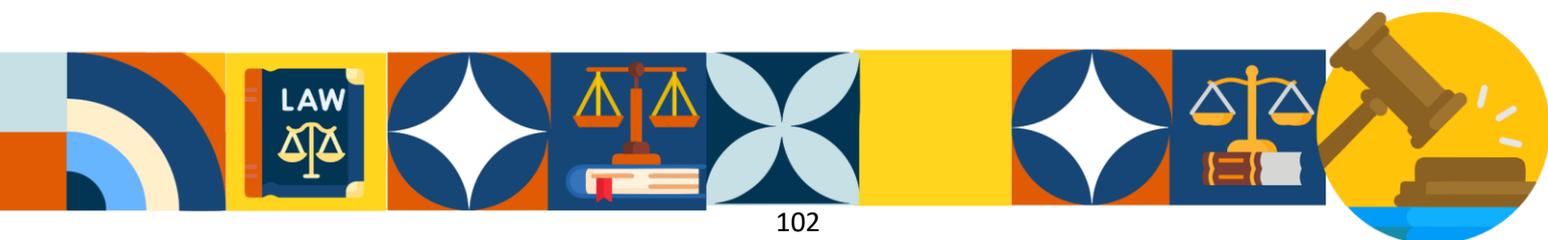
- Data capaian Nilai Kinerja Organisasi Biro Hukum pada aplikasi kinerjaku.kkp.go.id;
- Data alokasi anggaran dan realisasi anggaran Biro Hukum

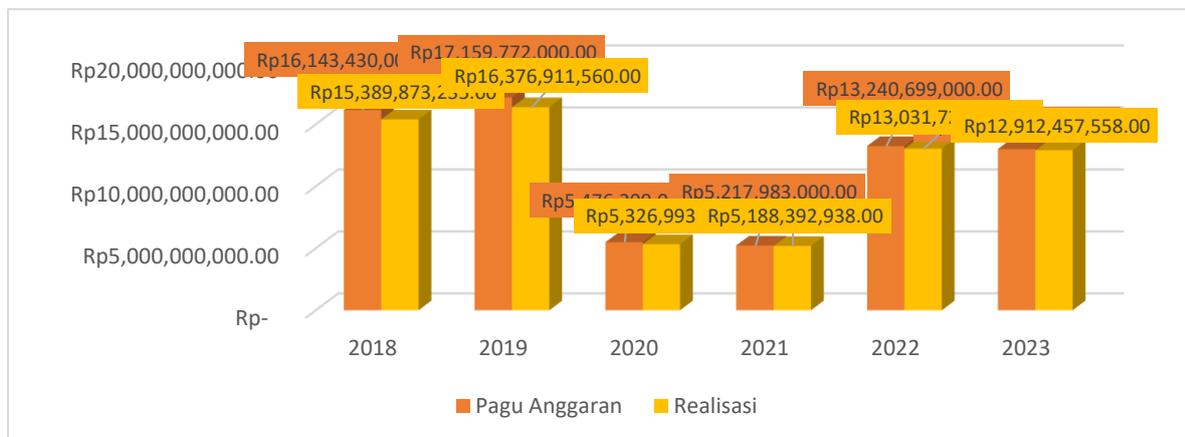
Berdasarkan perhitungan nilai efisiensi penggunaan sumber daya di Lingkungan Biro Hukum sebesar 109,91% dengan rincian sebagai berikut

Tabel 23
Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

NKO	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	%	%NSPSX Anggaran	Efisiensi Anggaran	%
1	2	3	4	5=1x2	6=5-3	7=(6/2)x100
110.9	Rp 13,001,664,000.00	Rp 12,912,457,558.00	99.31	Rp 1,441,884,537,600.00	Rp 1,428,972,080,042.00	109.91

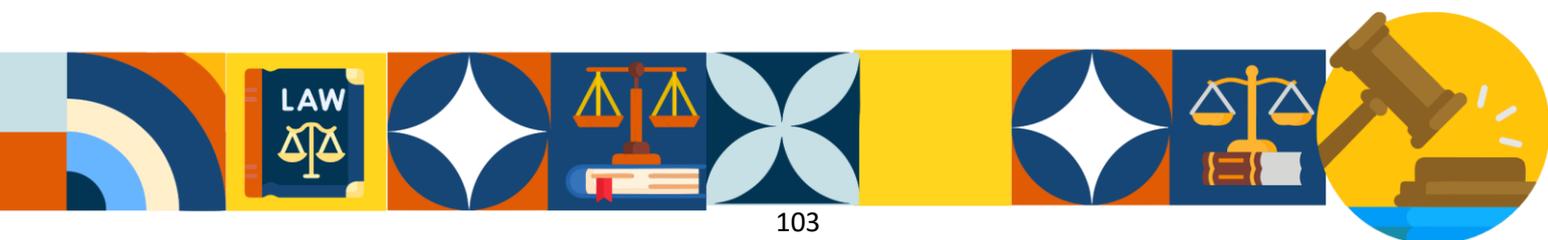
Biro Hukum merupakan salah satu unit kerja eselon II di lingkungan Sekretariat Jenderal yang mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan, rancangan perjanjian, hukum internasional bidang kelautan dan perikanan, advokasi, dokumentasi, dan informasi hukum. Dalam menunjang tugas tersebut, Biro Hukum didukung oleh 48 pegawai dan diperlukan biaya untuk dapat melaksanakan kegiatan demi mencapai output sesuai dengan tugas dan fungsi dari Biro Hukum. Biaya-biaya tersebut dituangkan pada Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA K/L) yang disusun 1 (satu) tahun sebelum pelaksanaan kerja dan anggaran dilaksanakan. Pagu beserta realisasi anggaran Biro Hukum pada tahun 2018 sampai 2023 sebagaimana tabel berikut





Biro Hukum memaksimalkan penyerapan anggaran agar dapat mengakomodir kegiatan-kegiatan yang sudah dijadwalkan sebelum pemotongan anggaran. Rendahnya capaian realisasi anggaran Tahun 2023 dikarenakan terdapat optimalisasi pelaksanaan anggaran untuk mencapai target program dan kegiatan di lingkungan Biro Hukum, yang terdiri dari

1. mengumpulkan data atau bahan usulan melalui grup whatsapp, kemudian setelah terkumpul baru akan diadakan pembahasan, *offline*, dengan itu bisa memangkas pertemuan yang menggunakan anggaran.





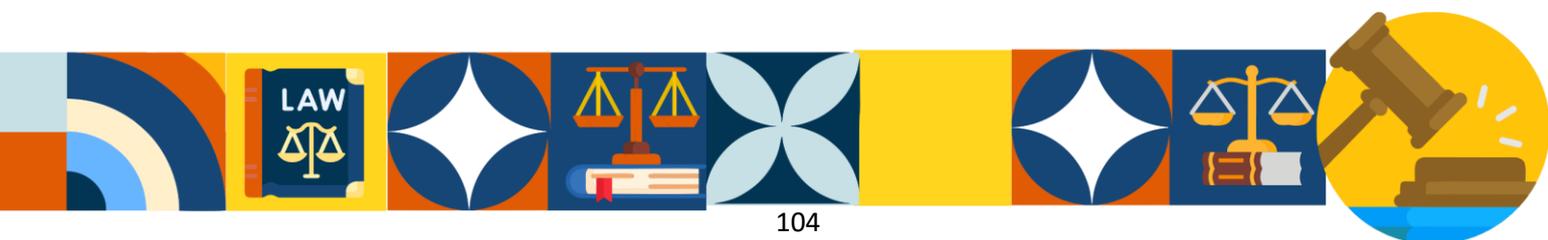
2. pemanfaatan teknologi dan informasi yaitu rapat koordinasi yang dilaksanakan secara *zoom meeting*;
3. penandatanganan Autentifikasi PUU telah dilaksanakan secara elektronik melalui elayar;
4. wadah untuk menghimpun semua data yang diperlukan terkait tugas dan fungsi di Biro Hukum telah dilaksanakan secara *paperless* melalui *google drive* dan *drop box*;
5. optimalisasi sharing informasi melalui *group whatsapp*; dan
6. monitoring dan evaluasi secara berkala pengendalian resiko yang sudah ditindaklanjuti melalui tautan lynk.id/spiprokum sebagai portal informasi SPIP Terintegrasi Biro Hukum;

3.4. Penghargaan yang Diraih

Sepanjang tahun 2023, Biro Hukum meraih beberapa penghargaan dari pihak eksternal KKP. Hal ini menjadi suatu pembuktian atas kinerja Biro Hukum dan pemacu untuk berkinerja dengan lebih baik.



Kamis, 12 Oktober 2023, berlokasi di Aston Kertika Grogol Hotel & Conference Center Jakarta, Kementerian Kelautan dan Perikanan berhasil meraih penghargaan





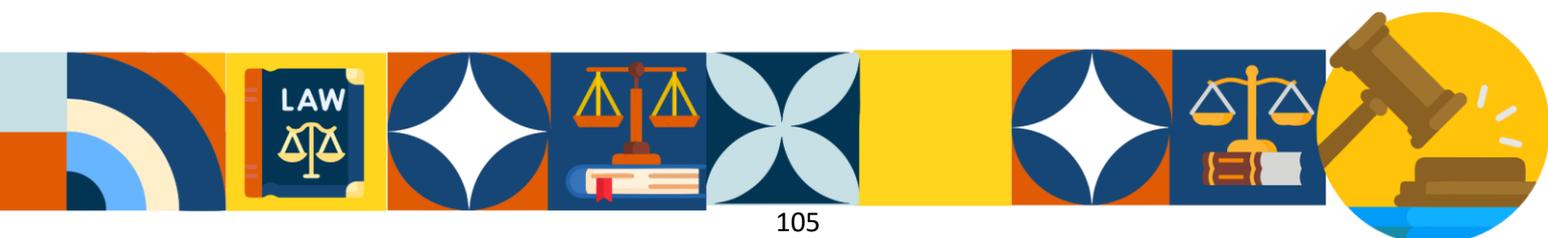
sebagai Anggota JDIH Nasional Terbaik V Tingkat Kementerian pada JDIH Award Tahun 2023.

Penghargaan tersebut diumumkan secara langsung oleh Kementerian Hukum dan HAM dalam acara Pertemuan Nasional Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (JDIHN) dan Legal Development Content Creator (LDCC) Awards Tahun 2023.

Berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.HH-01.HN.03.05 Tahun 2023 tentang Penetapan Hasil Penilaian Kinerja Pengelolaan JDIH Tahun 2022, JDIH KKP memperoleh nilai 98 dengan kategori Eka Acalapati sehingga menjadi Terbaik V tingkat kementerian dari 32 kementerian dan mendapat penghargaan dan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.



Senin, 13 November 2023, berlokasi di Eastparc Hotel Yogyakarta, Kementerian Kelautan dan Perikanan meraih penghargaan Juristica Awards 2023 dengan kategori JDIH dengan Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi Terbaik. Penghargaan tersebut diserahkan oleh Kepala Biro Hukum Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi kepada Kepala Biro Hukum Kementerian Kelautan dan Perikanan pada acara Rapat Koordinasi Hukum Tahun 2023 yang diselenggarakan oleh Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi.

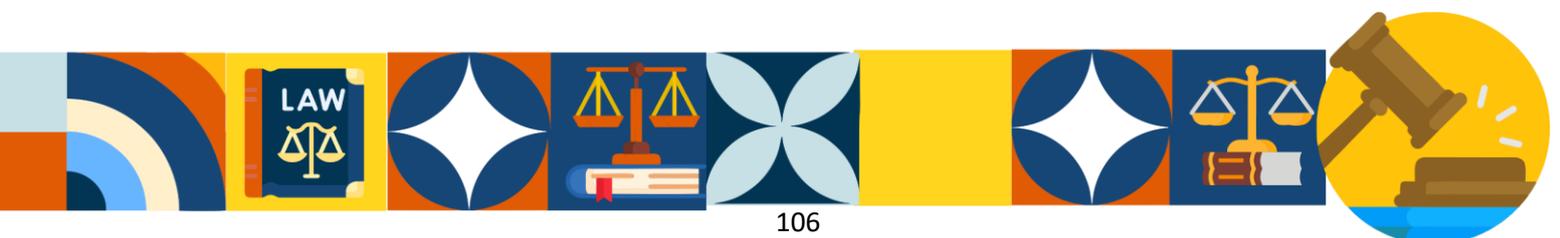




Selain mendapatkan penghargaan dari penghargaan dari pihak eksternal, KKP telah memenangkan 7 kasus inkracht, yang terdiri dari

- a. Perbuatan melawan hukum Perkara 90/Pdt.G/2019/PN. Sorong (MA) terkait materiil tanah dan rumah dinas SUPM Sorong dengan gugatan materiil Rp150 Juta;
- b. Gugatan Register Nomor 446/Pdt.G/2022/PN.Jkt.Sel, terkait Politeknik KP AUP Jakarta (PN), materiil tanah 4,5 hektar senilai 45.000 x 15 juta= Rp675 M dan immaterial Rp2 Triliun;
- c. Gugatan Perdata Register Perkara 712/PDT.G/2019/PN.JKT.PST, terkait pemutusan kontrak Penggugat: PT Kwarsa Hexagon Tergugat: Ditjen Perikanan Budidaya (MA) materiil Rp1.2 M immaterial Rp180 M;
- d. Gugatan PTUN Perkara 307/G/TF/2022/PTUN.JKT, Penggugat Didit Alnur Pramudita.Dkk;
- e. Gugatan PTUN Perkara 564/G/2023/PTUN.JKT, terkait penerbitan PKKPRL PT. Batam Sentra Marina;
- f. Gugatan Warga Negara (Citizen Lawsuit), Perkara 99/Pdt.G/2019/PN.Bpp terkait tumpahan minyak di Balikpapan (MA); dan
- g. Gugatan class action ship to ship transfer kapal Perkara 48/Pdt.G.2023.PN.Trg di Pengadilan Negeri Tenggara (PN) materiil Rp536 M dan immaterial Rp1 Triliun;

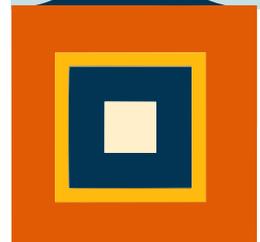
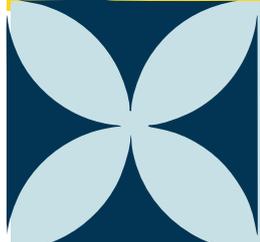
Biro Hukum telah menyelamatkan potensi pengeluaran negara sebesar Rp4,3 Triliun.





BAB 4

KESIMPULAN



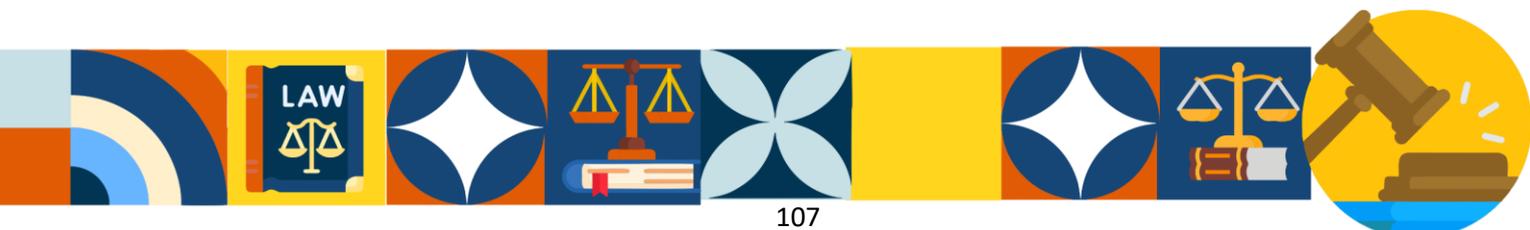


BAB IV SIMPULAN

4.1 Hasil

Berdasarkan hasil analisis terhadap Capaian kinerja Biro Hukum Tahun 2023 sebesar 110,9%, bila dibandingkan dengan capaian kinerja Biro Hukum Tahun 2022, terdapat kenaikan nilai poin sebesar 0.9%. Terdapat beberapa hal yang dapat disimpulkan antara lain realisasi beberapa kegiatan yang telah dicapai, yaitu

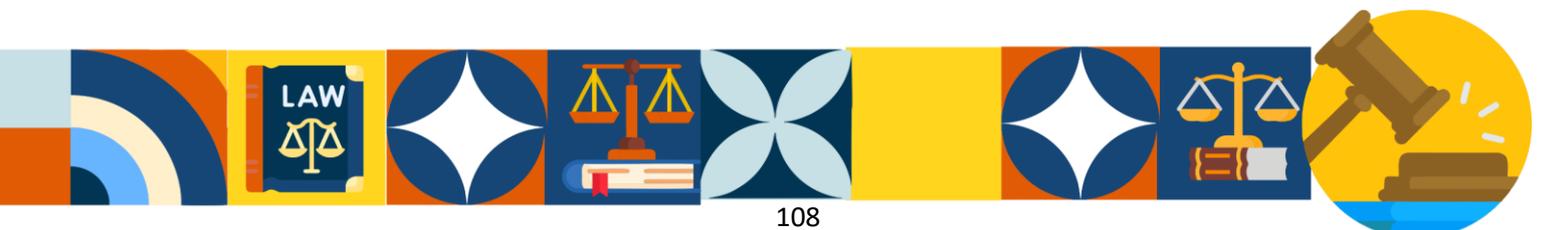
1. Berdasarkan memorandum Kepala Biro SDM Aparatur dan Organisasi, Nomor 1778/SJ.3/OT.710/X/2023, tanggal 31 Oktober 2023, hal Penyampaian Capaian Nilai Komponen RB KKP Capaian Triwulan IV Lingkup Sekretariat Jenderal, hasil evaluasi yang telah dilaksanakan, nilai hasil evaluasi dengan indeks reformasi birokrasi Kementerian Kelautan dan Perikanan tahun 2022 adalah 78,43 dengan kategori "BB". Adapun capaian hasil evaluasi reformasi birokrasi tahun 2023 Biro Hukum yaitu 4.58.
2. Berdasarkan surat dinas a.n Menteri Hukum dan HAM, Kepala Badan Strategi Kebijakan Hukum dan HAM, Nomor PPH-LT.01.02-43, tanggal 27 November 2023, hal Hasil Penilaian atas IRH Tahun 2023, Kementerian Kelautan dan Perikanan berhasil mencapai nilai indeks reformasi hukum sebesar 96,44 dengan kategori AA (Istimewa). Capaian nilai tersebut diatas target yang telah ditetapkan yaitu nilai 79 dengan kategori baik.
3. Berdasarkan informasi pada portal Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi pada laman portalrb.menpan.go.id, Kementerian Kelautan dan Perikanan berhasil mencapai nilai indeks kualitas kebijakan sebesar 83,34 dengan kategori sangat baik.
4. terdapat total 243 (dua ratus empat puluh tiga) rancangan peraturan perundang-undangan sebagai usulan kinerja peraturan perundang-undangan yang terdiri atas 63 (enam puluh tiga) rancangan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan dan 180 (seratus delapan puluh) rancangan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan. Hingga triwulan IV (sampai dengan 31 Desember 2023) terdapat 243 (dua ratus empat puluh tiga) rancangan peraturan perundang-undangan yang





telah selesai, terdiri atas 63 (enam puluh tiga) Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan dan 180 (seratus delapan puluh) Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan, sehingga capaiannya 100% (seratus persen) untuk peraturan perundang-undangan yang masuk dalam program penyusunan Peraturan Menteri dan Keputusan Menteri di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan tahun 2023 dan 100% (seratus persen) untuk yang nonprogram penyusunan Peraturan Menteri dan Keputusan Menteri di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan tahun 2023. Sehingga capaian IKU Persentase Penyelesaian Penyusunan Peraturan Perundang-undangan di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan mencapai 100%.

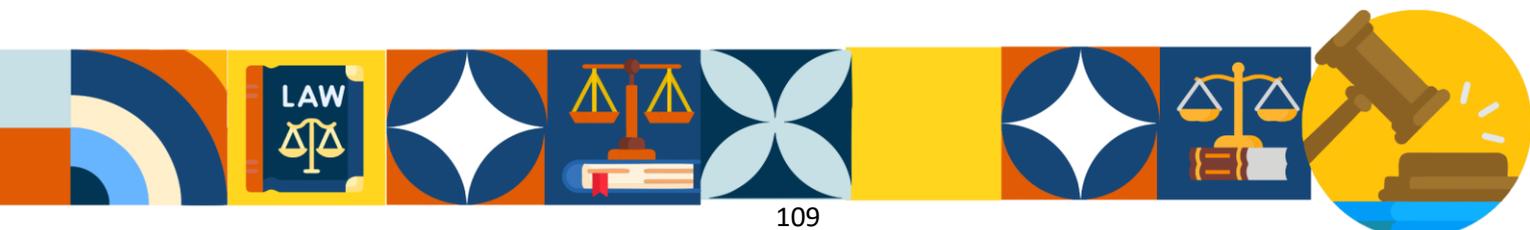
5. Berdasarkan persentase permasalahan hukum di luar jalur pengadilan/litigasi yang tertangani, terdapat 16 (enam belas) permasalahan hukum dari target 10 (sepuluh) permasalahan hukum, sehingga capaian dan telah ditangani, sehingga realisasi Indikator Kinerja Permasalahan Hukum Melalui Jalur Pengadilan/Litigasi di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan yang Ditangani telah mencapai 160%.
6. Berdasarkan persentase Permasalahan Hukum di luar jalur pengadilan/nonlitigasi di KKP, terdapat 5 (lima) permasalahan hukum dari target 5 (lima) permasalahan hukum, sehingga capaian dan telah ditangani, sehingga realisasi Indikator Kinerja Permasalahan Hukum Melalui di luar jalur pengadilan/nonlitigasi di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan yang Ditangani telah mencapai 100%.
7. Berdasarkan presentase perjanjian nasional yang siap untuk ditandatangani pada triwulan IV, terdapat 24 (dua puluh empat) dokumen *legal drafting* perjanjian dari target 22 (dua puluh dua) naskah perjanjian kerja sama yang telah ditindaklanjuti dan memperoleh masukan/tanggapan, sehingga capaian Indikator Kinerja Presentase Perjanjian Nasional yang Siap untuk Ditandatangani telah mencapai 109,09%.
8. Berdasarkan presentase perjanjian internasional dan instrumen hukum internasional bidang kelautan dan perikanan yang diberikan pertimbangan hukum hingga triwulan IV, terdapat 12 (dua belas) konsep naskah perjanjian internasional





dari target 10 (sepuluh) konsep naskah perjanjian internasional bidang kelautan dan perikanan pada triwulan IV yang telah diberikan pertimbangan hukum, sehingga capaian Indikator Kinerja Pesentase Perjanjian Internasional dan Instrumen Hukum Internasional Bidang Kelautan dan Perikanan yang Diberikan Pertimbangan Hukum telah mencapai 120%.

9. Pada Tahun 2023, Pengelolaan JDIH mendapat nilai 98 (sembilan puluh delapan), berdasarkan Kepmenkumham Nomor M.HH-01.HN.03.05 tahun 2023 tentang Penetapan Hasil Penilaian Kinerja Pengelolaan JDIHN Tahun 2022.
10. Berdasarkan penilaian di tahun 2023, Nilai PM SAKIP Biro Keuangan mencapai 85.50 dengan kategori A predikat memuaskan. Nilai ini diperoleh berdasarkan Memorandum Biro Pencanaan Nomor. 1097/SJ.1/HP.440/XII/2023 tentang Hasil Penilaian Mandiri SAKIP Level II Lingkup Sekretariat Jenderal Tahun 2023 pada tanggal 14 Desember 2023.
11. Berdasarkan memorandum Kepala Biro SDM Aparatur dan Organisasi, Nomor 85/SJ.3/KP.720/I/2024, tanggal 11 Januari 2024, hal Capaian Indikator Kinerja Utama IP ASN Triwulan IV Semester II Tahun 2023 dan Target IP ASN lingkup Sekretariat Jenderal Tahun 2024, berdasarkan hasil pengukuran Kualifikasi, Kompetensi, Kinerja dan Disiplin pada *Dashboard* IP ASN KKP yang berbasis data Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian KKP yaitu 84,75 (kategori Tinggi) terdiri dari Kualifikasi 21,71, Kompetensi 38,50, Kinerja 24,43, dan Disiplin 5.
12. Melalui memorandum Kepala Biro Keuangan, Nomor 1717/SJ.2/RC.610/X/2023, tanggal 12 Oktober 2023, hal Capaian IKU “Batas Tertinggi Persentase Nilai Temuan Laporan Hasil Pengawasan BPK Atas Laporan Keuangan Sekretariat Jenderal dibandingkan Realisasi Anggaran Sekretariat Jenderal TA. 2023”, Biro Hukum mendapatkan nilai 100%, dapat diartikan bahwa tidak ada temuan BPK di Biro Hukum.
13. Berdasarkan memorandum Kepala Pusat, Data, Statistik dan Informasi Nomor 20/SJ.7/TU.210/I/2024, tanggal 3 Januari 2024, Hal Capaian IKU Manajemen Pengetahuan Terstandar Lingkup Sekretariat Jenderal KKP Tahun 2023, Biro Hukum mendapatkan nilai capaian 133,33.



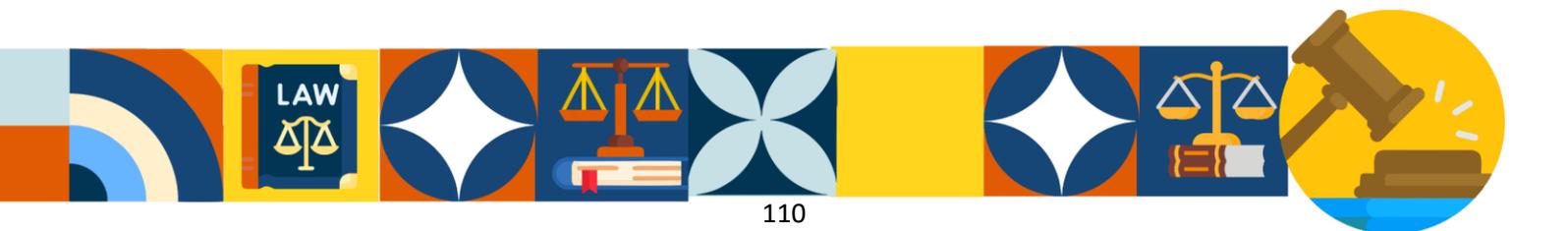


14. Berdasarkan memorandum Kepala Biro Keuangan Nomor, 86/SJ.2/TU.210/I/2024, tanggal 10 Januari 2024, tentang Capaian IKU “Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan Untuk Perbaikan Kinerja Lingkup Sekretariat Jenderal” Tahun 2023, Jumlah Rekomendasi Biro Hukum sebanyak 16 rekomendasi dan telah ditindaklanjuti (tuntas), sehingga capaian Biro Hukum sebesar 100%.
15. Presentasi realisasi anggaran Biro Hukum pada aplikasi SAKTI Tahun Anggaran 2023 sebesar 99,31%. Hal ini menunjukkan bentuk komitmen Biro Hukum dalam melaksanakan anggaran secara efektif dan efisien demi tercapainya *output* yang direncanakan pada saat penganggaran.
16. Berdasarkan nota dinas Kepala Biro Hukum, Nomor 29/SJ.4/TU.210/I/2024, tanggal 2 Januari 2023, hal Capaian IKU Persentase Penyelesaian Program Penyusunan Peraturan Perundang-undangan Bidang Kelautan dan Perikanan Semester II, yang pada intinya menyatakan bahwa tanggung jawab Biro Hukum dalam penyusunan 1 (satu) Rancangan Peraturan Menteri dan 1 (satu) Rancangan Keputusan Menteri telah tercapai 100%.

4.2 Tindak Lanjut Mencapai Target Kinerja

Pada tahun 2024, berdasarkan hasil Dialog Kinerja Organisasi Biro Hukum Tahun 2024, pada hari Rabu, 17 Januari 2024 bertempat di Ruang Rapat Biro Hukum, Gedung Mina Bahari IV lantai 3B, telah dilaksanakan Dialog Organisasi Organisasi (DKO) antara Kepala Biro dengan Para Ketua Tim dan Seluruh Pegawai dimana telah disepakati terkait Sasaran Kegiatan, Indikator Kinerja Kegiatan, Target Kinerja Tahun 2024 sebagaimana terlampir

Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahun 2024
Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik di Bidang Penyusunan Hukum KKP	1 Indeks Reformasi Hukum KKP	Indeks	80
	2 Indeks Kualitas Kebijakan KKP	Indeks	65
	3 Persentase Penyelesaian Program Penyusunan Peraturan Menteri dan Keputusan Menteri di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan	%	100
	4 Permasalahan Hukum melalui jalur pengadilan/litigasi di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan yang Ditangani	%	100

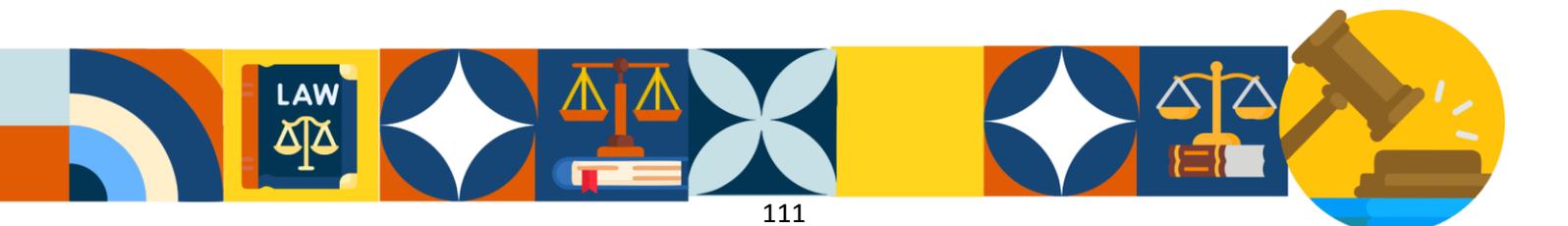




Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahun 2024
	5 Permasalahan Hukum di luar jalur pengadilan/nonlitigasi di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan yang Ditangani	%	100
	6 Perjanjian Nasional Bidang Kelautan dan Perikanan yang Siap untuk Ditandatangani	%	100
	7 Instrumen Hukum Internasional Bidang Kelautan dan Perikanan yang Diberikan Pertimbangan Hukum	%	100
	8 Nilai Kinerja Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Kementerian Kelautan dan Perikanan	Nilai	92
Terwujudnya Layanan Dukungan Manajemen yang Baik Lingkup Biro Hukum	9 Nilai Penilaian Mandiri SAKIP Biro Hukum	Nilai	84
	10 Indeks Profesionalitas ASN Biro Hukum	Indeks	85
	11 Persentase Penyelesaian Temuan BPK Lingkup Biro Hukum	%	100
	12 Persentase Unit Kerja yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan yang Terstandar Lingkup Biro Hukum	%	94
	13 Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Biro Hukum	%	95
	14 Persentase Penyerapan Anggaran Biro Hukum	%	95
	15 Persentase Penyelesaian Program Penyusunan Peraturan Perundang-undangan Bidang Penyiapan Produk Hukum KKP	%	100
	16 Nilai Minimal yang Diperyaratkan untuk Nilai pembangunan Unit Kerja Berpredikat Menuju Wilayah Bebas Korupsi	Nilai	75

untuk mencapai target kinerja Biro Hukum pada Tahun 2024 direncanakan akan dilakukan beberapa kegiatan, di antaranya

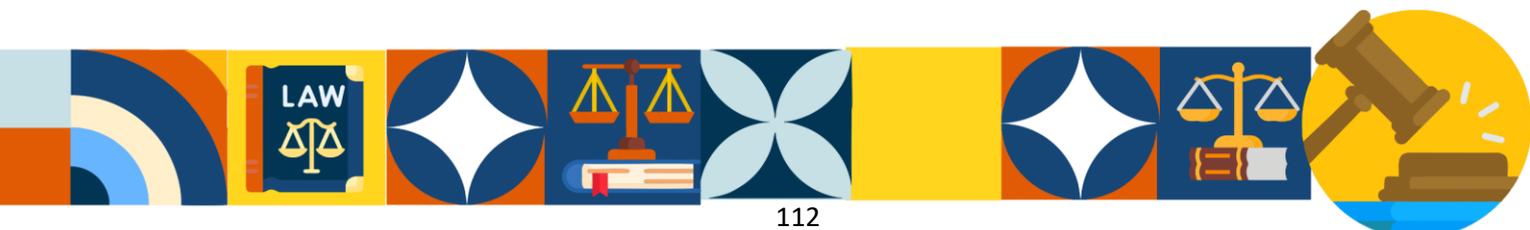
- a. Menambahkan Indikator Kinerja Utama terkait Nilai Minimal yang Diperyaratkan untuk pembangunan Unit Kerja Berpredikat Menuju Wilayah Bebas Korupsi.
- b. melakukan perbaikan internal dalam tim penilaian mandiri Indeks Reformasi Hukum KKP Tahun 2023 terutama terkait dengan data dukung pada variabel I dimana terdapat beberapa data dukung yang tidak bisa dibuka sehingga penilai tidak dapat memeriksa kebenaran dan data dukung, pada variabel III disarankan untuk melampirkan SK yang pelaksanaannya sejak awal 2022, KKP harus melampirkan matrik laporan analisis dan evaluasi bukan daftar jumlah peraturan perundang-undangan tahun 2022, dan KKP harus menyertakan dokumen kebijakan yang berisi tindak lanjut hasil analisis dan





evaluasi (tindak lanjut nonregulasi) dan atau syarat berbentuk surat undangan rapat/notulensi rapat. Akan memasukkan saran dari hasil penilaian tim penilai Kementerian Hukum dan HAM terkait IRH KKP tahun 2023 dalam rencana aksi penilaian mandiri IRH KKP Tahun 2024.

- c. melengkapi data dukung dalam aspek implementasi kebijakan dan evaluasi kebijakan.
- d. Memperkuat koordinasi dengan eselon I yang merupakan pemrakarsa kebijakan.
- e. melakukan koordinasi yang intens dengan Lembaga Administrasi Negara terkait kesesuaian data dukung yang telah dikumpulkan.
- f. Dilakukan kaji lapang untuk mengevaluasi kemanfaatan pemberlakuan 7 (tujuh) Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan yang menjadi sampel dalam penilalaian Indeks kualitas kebijakan Tahun 2023 tersebut.
- g. Melakukan pengecekan kembali dan perbaikan terhadap data dukung yang tidak sesuai dengan pertanyaan dalam penilaian indeks kualitas kebijakan.
- h. Melakukan pemrosesan lebih lanjut terhadap peraturan perundang-undangan yang masuk dalam program penyusunan Peraturan/Keputusan Menteri di lingkungan KKP tahun 2023 sehingga capaiannya menjadi 100% dengan pendetailan.
 - 1) Penyampaian harmonisasi ke Kementerian Hukum dan HAM untuk capaian Peraturan Menteri;
 - 2) Penetapan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan untuk capaian Keputusan Menteri.
- i. Pendalaman materi Advokasi Hukum tahun 2024 dengan melibatkan seluruh Eselon 1.
- j. melakukan inventarisasi permasalahan hukum di lingkungan KKP serta pembaruan/update permasalahan hukum yang dihadapi.
- k. meningkatkan koordinasi dengan unit kerja eselon I dan eselon II di lingkungan KKP serta kementerian/lembaga terkait mengenai penyusunan konsep naskah perjanjian dan instrumen hukum internasional.



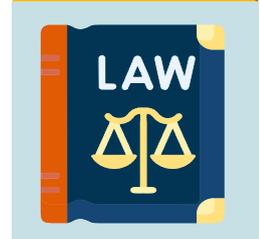
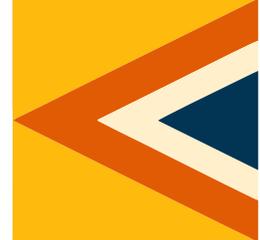
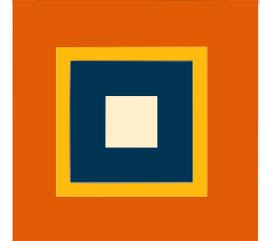
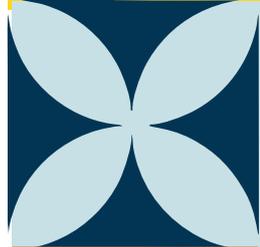


- I. membuat analisis dan telaahan terhadap konsep naskah perjanjian internasional serta implementasi hukum internasional agar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan nasional.





LAMPIRAN





KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN SEKRETARIAT JENDERAL

JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NOMOR 16
JAKARTA 10110, KOTAK POS 4130 JKP 10041
TELEPON (021) 3519070 (LACAK), FAKSIMILE (021) 3520351
LAMAN www.kkp.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023 BIRO HUKUM

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel, dan berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : **Effin Martiana**

Jabatan : Kepala Biro Hukum

Selanjutnya disebut Pihak Kesatu

Nama : **Effin Martiana**

Jabatan : Plh. Sekretaris Jenderal

Selaku atasan Pihak Kesatu, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Kesatu berjanji akan mewujudkan target kinerja sesuai lampiran perjanjian kinerja ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian dari perjanjian kinerja ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 9 Januari 2023

Pihak Kedua,
Plh. Sekretaris Jenderal

Pihak Kesatu,
Kepala Biro Hukum

Effin Martiana

Effin Martiana

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

BIRO HUKUM

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		TARGET
1	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik di Bidang Penyiapan Produk Hukum KKP	1	Komponen Nilai RB KKP yang Menjadi Tanggung Jawab Biro Hukum (nilai)	4,32
		2	Nilai Penilaian Mandiri Reformasi Hukum KKP (nilai)	79
		3	Indeks Kualitas Kebijakan KKP (nilai)	65
		4	Persentase Penyelesaian Penyusunan Peraturan Perundang-undangan di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan (persen)	100
		5	Permasalahan Hukum di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan yang Ditangani (persen)	100
		6	<i>Legal Drafting</i> Perjanjian Bidang Kelautan dan Perikanan yang Siap untuk Ditandatangani (persen)	100
		7	Nilai Kinerja Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Kementerian Kelautan dan Perikanan (nilai)	91
2	Terwujudnya Layanan Dukungan Manajemen yang Baik Lingkup Biro Hukum	8	Nilai Rekonsiliasi Kinerja Biro Hukum (nilai)	92
		9	Indeks Profesionalitas ASN di Lingkungan Biro Hukum (indeks)	79
		10	Persentase Penyelesaian Temuan BPK di Lingkungan Biro Hukum (persen)	100
		11	Persentase Unit Kerja yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan yang Terstandar di Lingkungan Biro Hukum (persen)	92
		12	Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Biro Hukum (persen)	75
		13	Persentase Penyerapan Anggaran Biro Hukum (persen)	95
		14	Persentase Penyelesaian Program Penyusunan Peraturan Perundang-undangan Bidang Pengelolaan Regulasi dan Advokasi (persen)	100

Data Anggaran

NO.	KEGIATAN	ANGGARAN (Rp.)
1.	Legislasi, Litigasi, dan Kerja sama	
	Perundang-undangan I	1.606.607.000,00
	Perundang-undangan II	1.557.187.000,00
	Perundang-undangan III	1.284.575.000,00
	Perjanjian dan Hukum Internasional	1.505.200.000,00
	Advokasi Hukum	1.736.982.000,00
2.	Pengelolaan Komunikasi, Informasi Publik, dan Umum	
	Layanan Umum	3.406.576.000,00
	Layanan Perkantoran	2.176.400.000,00
Total Anggaran Biro Hukum Tahun 2023		13.273.527.000,00

Jakarta, 9 Januari 2023

Pihak Kedua,
Plh. Sekretaris Jenderal

Pihak Kesatu,
Kepala Biro Hukum

Effin Martiana

Effin Martiana



**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
SEKRETARIAT JENDERAL**

JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NOMOR 16
JAKARTA 10110 KOTAK POS 4130 JKP 10041
TELEPON (021) 3519070 (LACAK), FAKSIMILE (021) 3520351
LAMAM www.kkp.go.id SUREL setjen@kkp.go.id

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
BIRO HUKUM**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel, dan berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : **Effin Martiana**

Jabatan : Kepala Biro Hukum

Selanjutnya disebut Pihak Kesatu

Nama : **Effin Martiana**

Jabatan : Plh. Sekretaris Jenderal

Selaku atasan Pihak Kesatu, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Kesatu berjanji akan mewujudkan target kinerja sesuai lampiran perjanjian kinerja ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian dari perjanjian kinerja ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, **20** Maret 2023

Pihak Kedua,
Plh. Sekretaris Jenderal

Effin Martiana

Pihak Kesatu,
Kepala Biro Hukum

Effin Martiana

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

BIRO HUKUM

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		TARGET
1	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik di Bidang Penyiapan Produk Hukum KKP	1.	Komponen Nilai RB KKP yang Menjadi Tanggung Jawab Biro Hukum (Nilai)	4,32
		2.	Nilai PM Reformasi Hukum KKP (Nilai)	79
		3.	Indeks Kualitas Kebijakan KKP (Indeks)	65
		4.	Persentase Penyelesaian Program Penyusunan Peraturan Menteri dan Keputusan Menteri di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan (%)	100
		5.	Permasalahan Hukum melalui jalur pengadilan/litigasi di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan yang Ditangani (%)	100
		6.	Permasalahan Hukum di luar jalur pengadilan/nonlitigasi di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan yang Ditangani (%)	100
		7.	Perjanjian Nasional Bidang Kelautan dan Perikanan yang Siap untuk Ditandatangani (%)	100
		8.	Instrumen Hukum Internasional Bidang Kelautan dan Perikanan yang Diberikan Pertimbangan Hukum (%)	100
		9.	Nilai Kinerja Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Kementerian Kelautan dan Perikanan (Nilai)	91
2	Terwujudnya Layanan Dukungan Manajemen yang Baik Lingkup Biro Hukum	10.	Nilai Rekonsiliasi Kinerja Biro Hukum (Nilai)	92
		11.	Indeks Profesionalitas ASN di Lingkungan Biro Hukum (Indeks)	79
		12.	Persentase Penyelesaian Temuan BPK di Lingkungan Biro Hukum (%)	100
		13.	Persentase Unit Kerja yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan yang Terstandar di Lingkungan Biro Hukum (%)	92
		14.	Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Biro Hukum (%)	75

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		TARGET
		15.	Persentase Penyerapan Anggaran Biro Hukum (%)	95
		16.	Persentase Penyelesaian Program Penyusunan Peraturan Perundang-undangan Bidang Pengelolaan Regulasi dan Advokasi (%)	100

Data Anggaran

NO.	KEGIATAN	ANGGARAN (Rp.)
1.	Legislasi, Litigasi, dan Kerja sama	
	Perundang-undangan I	1.606.607.000,00
	Perundang-undangan II	1.557.187.000,00
	Perundang-undangan III	1.284.575.000,00
	Perjanjian dan Hukum Internasional	1.505.200.000,00
	Advokasi Hukum	1.736.982.000,00
2.	Pengelolaan Komunikasi, Informasi Publik, dan Umum	
	Layanan Umum	3.406.576.000,00
	Layanan Perkantoran	2.176.400.000,00
Total Anggaran Biro Hukum Tahun 2023		13.273.527.000,00

Jakarta, 20 Maret 2023

Pihak Kedua,
Plh. Sekretaris Jenderal

Pihak Kesatu,
Kepala Biro Hukum



Effin Martiana



Effin Martiana



KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
SEKRETARIAT JENDERAL

JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NOMOR 16
JAKARTA 10110 KOTAK POS 4130 JKP 10041
TELEPON (021) 3519070 (LACAK), FAKSIMILE (021) 3520351
LAMAN www.kkp.go.id SUREL setjen@kkp.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

BIRO HUKUM

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel, dan berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : **Effin Martiana**

Jabatan : Kepala Biro Hukum

Selanjutnya disebut **Pihak Kesatu**

Nama : **Antam Novambar**

Jabatan : Plt. Sekretaris Jenderal

Selaku atasan Pihak Kesatu, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Kesatu berjanji akan mewujudkan target kinerja sesuai lampiran perjanjian kinerja ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian dari perjanjian kinerja ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 21 November 2023

Pihak Kedua,
Plt. Sekretaris Jenderal

Antam Novambar

Pihak Kesatu,
Kepala Biro Hukum

Effin Martiana

Handwritten initials

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

BIRO HUKUM

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		TARGET
1	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik di Bidang Penyiapan Produk Hukum KKP	1.	Nilai Komponen RB KKP yang Menjadi Tanggung Jawab Biro Hukum (Nilai)	4,32
		2.	Indeks Reformasi Hukum KKP (Indeks)	79
		3.	Indeks Kualitas Kebijakan KKP (Indeks)	65
		4.	Persentase Penyelesaian Program Penyusunan Peraturan Menteri dan Keputusan Menteri di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan (%)	100
		5.	Permasalahan Hukum melalui jalur pengadilan/litigasi di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan yang Ditangani (%)	100
		6.	Permasalahan Hukum di luar jalur pengadilan/nonlitigasi di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan yang Ditangani (%)	100
		7.	Perjanjian Nasional Bidang Kelautan dan Perikanan yang Siap untuk Ditandatangani (%)	100
		8.	Instrumen Hukum Internasional Bidang Kelautan dan Perikanan yang Diberikan Pertimbangan Hukum (%)	100
		9.	Nilai Kinerja Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Kementerian Kelautan dan Perikanan (Nilai)	91
2	Terwujudnya Layanan Dukungan Manajemen yang Baik Lingkup Biro Hukum	10.	Nilai Penilaian Mandiri SAKIP Biro Hukum (Nilai)	80,5
		11.	Indeks Profesionalitas ASN Biro Hukum (Indeks)	79
		12.	Persentase Penyelesaian Temuan BPK lingkup Biro Hukum (%)	100
		13.	Persentase Unit Kerja Biro Hukum yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan yang Terstandar (%)	92
		14.	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Biro Hukum (%)	75
		15.	Persentase Penyerapan Anggaran Biro Hukum (%)	95

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET
	16. Persentase Penyelesaian Program Penyusunan Peraturan Perundang-undangan Bidang Pengelolaan Regulasi dan Advokasi (%)	100

Data Anggaran

NO.	KEGIATAN	ANGGARAN (Rp.)
1.	Legislasi, Litigasi, dan Kerja sama	
	Layanan Hukum	6.090.564.000,00
	Layanan Bantuan Hukum	1.511.982.000,00
2.	Pengelolaan Komunikasi, Informasi Publik, dan Umum	
	Layanan Umum	3.336.576.000,00
	Layanan Perkantoran	2.176.400.000,00
Total Anggaran Biro Hukum Tahun 2023		13.115.522.000,00

Jakarta, 21 November 2023

Pihak Kedua,
Plt. Sekretaris Jenderal

Antam Novambar

Pihak Kesatu,
Kepala Biro Hukum

Effin Martiana

